

Jadual Sementara					
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	16 November 2009	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	30 November 2009
Tanggal Efektif	:	16 November 2009	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	1 Desember 2009
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	:		Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	:	30 November - 4 Desember 2009
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	23 November 2009	Periode Perdagangan HMETD	:	1 - 7 Desember 2009
• Pasar Tunai	:	26 November 2009	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	1- 7 Desember 2009
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (ExRight)	:		Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	3 - 9 Desember 2009
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	24 November 2009	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	:	9 Desember 2009
• Pasar Tunai	:	30 November 2009	Tambahan	:	
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	:	26 November 2009	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	10 Desember 2009
			Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Distribusi Saham hasil Penjatahan	:	11 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM DAN LK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

Kegiatan Usaha:

Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

grhaXL

Jl. Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta 12950, Indonesia

Telepon : (021) 576 1881; Faksimili : (021) 579 59025

Website: www.xl.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) Saham Biasa Atas Nama (“Saham”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp2.836.000.000.000 (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah).

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2009. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 DESEMBER 2009. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2009. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 7 DESEMBER 2009 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 16,67%.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Indocel Holding Sdn. Bhd., akan melaksanakan seluruh kewajibannya selaku Pembeli Siaga untuk membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp2.000,- setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PUT I PT Excelcomindo Pratama Tbk. No. 116 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DALAM MENGHADAPI KOMPETISI YANG KETAT DARI PESAING-PESAING LAMA DAN PARA PENDATANG BARU DI PASAR TELEKOMUNIKASI SELULER.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Excelcomindo Pratama Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) di Jakarta melalui surat No. 107/CSEC/X/2009 pada tanggal 15 Oktober 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak, termasuk Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lain yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan BAPEPAM No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD sebagaimana tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	3
RINGKASAN	9
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I	14
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	18
III. PERNYATAAN HUTANG	20
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
V. RISIKO USAHA	49
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	57
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	59
3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	60
4. SUMBER DAYA MANUSIA	67
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	71
6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	71
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM	73
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN	75
9. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN, PEMEGANG SAHAM DAN ANAK PERUSAHAAN	79
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	81
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	85
12. AMDAL	87
13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	89
14. ASURANSI	89
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	90
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	102
1. KEGIATAN USAHA	102
2. FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR	107
3. PEMASARAN, PENJUALAN, DAN DISTRIBUSI	110
4. PERSAINGAN	111
5. PENAGIHAN DAN MANAJEMEN KREDIT	112
6. <i>REVENUE ASSURANCE</i> DAN <i>FRAUD PREVENTION</i>	113
7. <i>DISASTER RECOVERY CENTER</i>	113
8. PROPERTI	113
9. PROSPEK USAHA	113
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	115
X. EKUITAS	117



XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	118
XII.	PERPAJAKAN.....	119
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	121
XIV.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	123
XV.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	124
XVI.	KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	130
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	133
XVIII.	INFORMASI TAMBAHAN.....	134



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut:

“3G”	: Berarti layanan telekomunikasi generasi ketiga.
“Afiliasi”	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
“AIF”	: Berarti AIF (Indonesia) Limited.
“Anak Perusahaan”	: Berarti perusahaan-perusahaan yang: 1) pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan 2) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Anggaran Dasar”	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya.
“Anggota Bursa”	: Berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
“ARPM”	: (<i>Average Revenue Per Minute</i>) adalah rata-rata pendapatan dari pelanggan prabayar dan pelanggan pasca bayar untuk periode tertentu dibagi dengan total MoU pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode yang bersangkutan.
“ARPU”	: (<i>Average Revenue Per User</i>) adalah jumlah pendapatan baik dari pelanggan prabayar maupun pelanggan pasca bayar (diluar pendapatan jasa jelajah internasional dari para pengunjung internasional ke Indonesia, penjualan kartu perdana kepada pelanggan prabayar, biaya aktivasi, jika ada, untuk pelanggan pasca bayar dan diluar potongan harga untuk agen penjual) untuk setiap bulan dalam periode tertentu dibagi oleh jumlah rata-rata pelanggan prabayar atau pasca bayar per bulan untuk periode tertentu.
“Backbone”	: Berarti jaringan transmisi jalur utama.
“Bakrie Telecom”	: Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“Bandwidth”	: Berarti lebar pita frekuensi yang merupakan ukuran kapasitas suatu jaringan komunikasi.
“BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PUT I yang ditunjuk oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, yang berkedudukan di Jakarta.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



“Bapepam dan LK”	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal sebagai Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM).
“BEI”	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu yang berkedudukan selaku bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM; suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
“BEJ”	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta.
“BHP”	: Berarti singkatan dari Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.
“BSC”	: Berarti singkatan dari <i>Base Station Controller</i> , adalah peralatan yang dipergunakan pada jaringan telekomunikasi GSM untuk mengatur persiapan pembicaraan, pemakaian sinyal dan pemeliharaan. Alat ini dapat juga dipergunakan sebagai alat bantu penyiaran dari beberapa stasiun radio.
“BTS”	: Berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> yaitu stasiun transmisi yang berfungsi menerima dan memancarkan sinyal dan merupakan penghubung pelanggan telepon seluler dalam tiap <i>cell site</i> dan menghubungkannya dengan <i>mobile switching center</i> .
“Bursa Efek”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak yang lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
“DPS”	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“EBIT”	: Berarti singkatan dari <i>Earning Before Interest and Tax</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.
“EBITDA”	: Berarti singkatan dari <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
“Fiber Optic Cable”	: Berarti merupakan jaringan komunikasi berupa kabel transmisi yang terbuat dari material serat optik dengan menggunakan teknologi laser sebagai sarana perpindahan data. Serat optik memberikan kapasitas transmisi yang besar dan gangguan sinyal yang rendah dibandingkan kabel <i>copper</i> .
“FKP”	: Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjataan.
“FPPS Tambahan”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT I.
“GCG”	: Berarti singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> .
“GPRS”	: Berarti singkatan dari <i>General Packet Radio Services</i> , yaitu standar untuk komunikasi seluler yang membutuhkan spektrum yang luas dan khususnya digunakan untuk mengirim dan menerima data termasuk e-mail dan data pada standar GSM.
“GSM”	: Berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile telephones</i> , yaitu sistem telekomunikasi seluler digital yang distandarisasi oleh ETSI berdasarkan arsitektur jaringan seluler dan transmisi digital yang digunakan di seluruh Eropa, Asia dan beberapa negara lainnya. Sistem GSM digunakan pada frekuensi 900 MHz (GSM 900), 1800 MHz (GSM 1800) dan 1900 MHz (GSM 1900).
“Harga Pelaksanaan”	: Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT I untuk melaksanakan haknya membeli 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham.



“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“HMETD”	: Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“HSDPA”	: Berarti singkatan dari <i>High Speed Downlink Packet Access</i> .
“Hutchison”	: Berarti PT Hutchison Charoen Pokphan Telecom Indonesia.
“IDD”	: Berarti singkatan dari <i>International Direct Dialing</i> , yaitu kemampuan untuk melakukan telepon dari satu negara ke negara yang lain tanpa membutuhkan telepon operator hanya dengan telepon international <i>prefix</i> .
“Indocel Holding Sdn. Bhd.”	: Berarti suatu badan hukum berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Malaysia, yang seluruh sahamnya dimiliki 100% oleh Axiata Group Berhad.
“Indosat”	: Berarti PT Indosat Tbk.
“Interkoneksi”	: Berarti keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
“IT”	: Berarti singkatan dari <i>Information Technology</i> , umumnya mencakup telekomunikasi, komputer dan media teknologi.
“Kegiatan Usaha Utama Perseroan”	: Berarti bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dasar dan dapat menyediakan fasilitas dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi seluler dan jasa jaringan.
“Kartu SIM”	: Berarti <i>Subscriber Identity Module Cards</i> adalah kartu elektronik yang dimasukkan ke dalam ponsel untuk mengidentifikasi pelanggan pada jaringan. Kartu SIM ini berisikan nomor identifikasi pelanggan dan lokasi (jaringan) dari pelanggan.
“KSEI”	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
“Menkominfo”	: Berarti Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
“MHz (Megahertz)”	: Berarti unit satuan frekuensi dimana 1 MHz setara dengan satu juta siklus per detik.
“Mitsui”	: Berarti Mitsui & Co., Ltd.
“MMS”	: Berarti singkatan dari <i>Multimedia Messaging Services</i> , yaitu layanan komunikasi berupa multimedia bagi pelanggan seluler yang memungkinkan pengiriman teks, gambar, video dan suara.
“Mobile 8”	: Berarti PT Mobile-8 Telecom Tbk.
“MoU”	: Berarti singkatan dari <i>Minutes of Usage</i> yang berarti total menit dari panggilan keluar yang dilakukan oleh pelanggan prabayar dan pelanggan pasca bayar untuk periode tertentu.



“MSM”	: Berarti singkatan dari MoU per Subscriber per Month atau rata-rata MoU per pelanggan per bulan yang berarti total MoU untuk 1 bulan tertentu dibagi dengan rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode bulan tersebut.
“MPLS”	: Berarti singkatan dari <i>Multi Protocol Label Switching</i> .
“MSC”	: Berarti singkatan dari <i>Mobile Switching Center</i> , pusat yang mengontrol BSC dan <i>routing</i> panggilan telepon.
“NAP”	: Berarti singkatan dari <i>Network Access Provider</i> .
“NTS”	: Berarti PT Natrindo Telepon Seluler.
“Jaringan Infrastruktur”	: Berarti merupakan perangkat infrastruktur tetap yang terdiri dari kabel fiber optik, kabel <i>copper</i> , perangkat transmisi, peralatan <i>multiplexing switches</i> , pemancar radio, antena, sistem informasi manajemen dan peralatan lainnya dimana menerima, mengirim dan memproses sinyal dan untuk peralatan pelanggan dan/atau antara jaringan nirkabel dan jaringan tetap.
“Node B”	: Berarti merupakan stasiun transmisi yang melayani layanan jaringan 3G.
“PDB”	: Berarti singkatan dari Produk Domestik Bruto.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I”	: Berarti kegiatan penawaran sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) Saham Biasa Atas Nama Baru (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dimana pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, yang setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>).
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Berarti pernyataan pendaftaran yang ditujukan kepada Ketua Bapepam dan LK oleh Perseroan dalam rangka PUT I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulanannya.
“Perseroan”	: Berarti PT Excelcomindo Pratama Tbk. berkedudukan di Jakarta, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pihak/ Perusahaan Terafiliasi”	: Berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPM.
“Prospektus”	: Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.



“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
“PMA”	: Berarti singkatan dari Penanaman Modal Asing.
“PSTN”	: Berarti singkatan dari <i>Public Switched Telephone Network</i> , yaitu jaringan infrastruktur Telkom yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa telepon domestik.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.
“Roaming”	: Berarti merupakan suatu layanan dari jasa seluler yang memungkinkan pelanggan suatu jaringan menggunakan jaringan milik operator lain.
“RNC”	: Berarti singkatan dari <i>Radio Network Core</i> , adalah peralatan yang dipergunakan pada jaringan telekomunikasi 3G untuk mengatur persiapan pembicaraan, pemakaian sinyal dan pemeliharaan. Alat ini dapat juga dipergunakan sebagai alat bantu penyiaran dari beberapa stasiun radio.
“RUPS”	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“Saham Baru”	: Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
“Saham Biasa Atas Nama”	: Berarti saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.
“Saham Lama”	: Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan per tanggal 26 November 2009, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”	: Berarti saham hasil pelaksanaan HMETD merupakan saham yang diperoleh oleh pemegang HMETD sebagai pemegang saham Perseroan setelah melaksanakan seluruh hak proporsionalnya dalam PUT I yaitu sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) Saham Biasa Atas Nama.
“Sampoerna Telecom”	: Berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SBHMETD”	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
“SMS”	: Berarti singkatan dari <i>Short Messaging Service/ Layanan Pesan Singkat</i> , merupakan salah satu bentuk layanan seluler yang memungkinkan pelanggannya mengirimkan/menerima data berbentuk teks dari/ke ponsel.
“Starter pack”	: Berarti paket kartu perdana yang berisikan kartu SIM untuk dijual kepada pelanggan baru.
“Switch”	: Berarti merupakan suatu perangkat untuk menginstalasi dan pengalihan koneksi telepon dimana untuk nomor yang ditelepon maupun untuk pengalihan dalam rute layanan. Perangkat ini juga merekam informasi untuk tujuan tagihan dan pengaturan.



“Tingkat Churn”	: Berarti jumlah total nomor pelanggan yang diputuskan dari jaringan Perseroan baik secara sepihak atau tidak dalam suatu periode dibagi dengan jumlah pelanggan pada akhir periode tersebut, dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut, dan dinyatakan dalam persentase.
“UUPM”	: Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“USD”	: Berarti Dolar Amerika Serikat.
“Verizon”	: Berarti Verizon dan perusahaan-perusahaan sebelumnya seperti Bell Atlantic, Nynex, dan GTE.
“VSAT”	: Berarti singkatan dari <i>Very Small Aperture Terminal</i> adalah stasiun yang dipergunakan dalam komunikasi satelit baik untuk sinyal suara, data maupun video. Peralatan ini terdiri dari alat penerima dan alat lainnya, yang ditempatkan di dalam ruangan untuk mengirim sinyal kepada alat komunikasi pelanggan.
“VoIP”	: Berarti singkatan dari <i>Voice over Internet Protocol</i> berarti layanan komunikasi suara melalui jaringan internet atau Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).
“XL”	: Berarti Perseroan, yaitu PT Excelcomindo Pratama Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

- Perseroan (dahulu bernama "PT Grahame Metropolitan Lestari") berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kantor pusat Perseroan yang terletak di grhaXL, Jl. Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta.
- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
- Perseroan memiliki ijin-ijin sebagai berikut:
 - (1). Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
 - (2). Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet
 - (3). Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup
 - (4). Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
 - (5). Ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
- Pendapatan kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2009 sebesar Rp6.254,3 miliar dan EBITDA sebesar Rp2.567,9 miliar. Pendapatan kotor Perseroan sebesar Rp12.155,9 miliar dan EBITDA sebesar Rp5.131,5 miliar pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, dibandingkan dengan pendapatan kotor sebesar Rp8.364,7 miliar dan EBITDA sebesar Rp3.509,2 miliar pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007.
- Basis pelanggan Perseroan terdiri dari sekitar 24,3 juta pelanggan prabayar dan sekitar 372 ribu pelanggan pasca bayar, dengan jumlah total sekitar 24,7 juta pelanggan pada 30 Juni 2009; sekitar 25,6 juta pelanggan prabayar dan sekitar 417 ribu pelanggan pasca bayar, dengan jumlah total sekitar 26,0 juta pelanggan pada 31 Desember 2008; sekitar 15 juta pelanggan prabayar dan sekitar 481 ribu pelanggan pasca bayar, dengan jumlah total sekitar 15,5 juta pelanggan pada 31 Desember 2007; sekitar 9,1 juta pelanggan prabayar dan sekitar 387 ribu pelanggan pasca bayar, dengan jumlah total sekitar 9,5 juta pelanggan pada 31 Desember 2006. Dengan terus meningkatnya pasar layanan telekomunikasi di Indonesia, Perseroan mengharapkan jumlah total pelanggan akan terus meningkat dan jumlah pelanggan prabayar tetap menjadi porsi terbesar dari jumlah total pelanggan.
- Berikut ini adalah penyertaan saham Perseroan pada anak perusahaan saat ini:

Penyertaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Domisili	Persentase Kepemilikan saat ini (%)	Status
Excel Phoneloa 818 BV	Jasa Manajemen Keuangan	1997	Belanda	100	Tidak Aktif
Excelcomindo Finance Company BV	Jasa Manajemen Keuangan	2003	Belanda	100	Aktif
GSM One (L) Limited	Jasa Manajemen Keuangan	1996	Malaysia	100	Tidak Aktif
GSM Two (L) Limited	Jasa Manajemen Keuangan	1997	Malaysia	100	Tidak Aktif

2. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

- Jenis Penawaran : Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham.
- Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah).
- Harga Penawaran : Setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
- Rasio Konversi : Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 26 November 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham.
- Dilusi Kepemilikan : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen).



- Pencatatan : Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dicatatkan di BEI bersama-sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dikeluarkan dalam rangka PUT I menjadi sebanyak 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) saham dengan demikian jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan menjadi sejumlah 8.508.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan juta) saham.
- Pembeli Siaga : Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Indocel Holding Sdn. Bhd., selaku Pembeli Siaga akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan Harga Pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PUT I PT Excelcomindo Pratama Tbk. No. 116 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).....	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732
3. Direksi			
- Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072
- Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012
- Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000		22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932	7.129.124.400	712.912.440.000	83,7932
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732	1.358.997.000	135.899.700.000	15,9732
3. Direksi						
- Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072	614.400	61.440.000	0,0072
- Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012	100.800	10.080.000	0,0012
- Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003	29.400	2.940.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249	19.134.000	1.913.400.000	0,2249
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000	8.508.000.000	850.800.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000		14.142.000.000	1.414.200.000.000	



Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya tidak diambil oleh pemegang saham lainnya kecuali Indocel Holding Sdn Bhd, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000		22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932	7.358.937.000	735.893.700.000	86,4943
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732	1.132.497.500	113.249.750.000	13,3110
3. Direksi						
– Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072	512.000	51.200.000	0,0060
– Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012	84.000	8.400.000	0,0010
– Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003	24.500	2.450.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249	15.945.000	1.594.500.000	0,1874
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000	8.508.000.000	850.800.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000		14.142.000.000	1.414.200.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai PUT I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT I ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya PUT I, akan digunakan seluruhnya untuk membayar hutang Perseroan.

Rincian mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil PUT I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Risiko-risiko usaha Perseroan sesuai dengan besar dampaknya terhadap kinerja keuangan Perseroan:

1. Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dari pesaing-pesaing lama dan para pendatang baru di pasar telekomunikasi seluler.
2. Teknologi baru mungkin akan memiliki dampak yang negatif terhadap kemampuan kompetitif Perseroan.
3. Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan kemungkinan akan mengalami perlawanan dari masyarakat terhadap beberapa lokasi transmisi BTS yang telah ada.
4. Perseroan beroperasi pada lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat mengakibatkan bertambahnya persaingan, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.
5. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup untuk tetap kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia.
6. Kepadatan jaringan seluler dan ketersediaan spektrum yang terbatas dapat membatasi MoU Perseroan dan pertumbuhan jumlah pelanggan dan akan memaksa Perseroan untuk mengeluarkan lebih banyak beban modal daripada pesaing-pesaing utama Perseroan agar tetap kompetitif.
7. Perseroan dapat terpengaruh oleh pembatasan kepemilikan oleh asing di dalam kegiatan usaha jasa telekomunikasi.
8. Jumlah pelanggan Perseroan atau MoU dapat meningkat tanpa peningkatan yang sejalan dengan ARPU, ARPM, pendapatan atau profitabilitas Perseroan walaupun telah membelanjakan sumber daya keuangan yang signifikan untuk memperluas basis pelanggan dan MoU.
9. Strategi penetapan harga yang ekonomis oleh Perseroan dapat gagal jika perilaku pelanggan berbeda dari ekspektasi model bisnis Perseroan.
10. Perseroan tidak dapat memberi jaminan bahwa Perseroan akan mencapai tingkat profitabilitas yang stabil di masa depan.
11. Pertumbuhan MoU Perseroan tergantung pada peningkatan kapasitas jaringan termasuk jumlah BTS Perseroan.
12. Peningkatan yang signifikan terhadap biaya frekuensi dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif.
13. Perseroan wajib memiliki izin dalam pelayanan telekomunikasi seluler, yang mana izin tersebut dapat dibatalkan jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu.
14. Kegagalan dalam operasi jaringan Perseroan, beberapa sistem kunci, interkoneksi pada jaringan Perseroan atau jaringan dari operator lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan secara negatif.



15. Apabila Perseroan dinyatakan bertanggungjawab untuk kegiatan pengaturan harga yang melanggar hukum oleh KPPU, Perseroan akan memiliki kewajiban yang bisa menyebabkan penurunan pada pendapatan Perseroan dan mempengaruhi kegiatan usaha, reputasi, dan profitabilitas Perseroan.
16. Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan saluran tetap (*fixed-line telephone*) para pesaing Perseroan.

Sedangkan risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, politik dan keamanan nasional, regional dan global adalah sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan sosial dan politik akan berpengaruh terhadap Perseroan.
2. Kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia akan memperburuk stabilitas negara sehingga berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.
3. Usaha Perseroan sangat bergantung pada sistem penagihan dan pengendalian kredit yang canggih, permasalahan sistem yang terjadi dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan.
4. Perseroan dapat gagal dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asing.
5. Bencana alam akan berpengaruh buruk terhadap Perseroan.

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Konsolidasian penting Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Aset	29.123,1	28.911,7	18.800,5	12.636,6	9.353,9	6.474,5
Kewajiban	24.108,8	24.603,8	14.335,7	8.355,4	5.724,6	5.443,8
Ekuitas	5.014,3	4.307,9	4.464,8	4.281,2	3.629,3	1.030,7

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Pendapatan Usaha Bruto	6.254,3	12.156,0	8.364,7	6.466,1	4.301,5	3.323,2
Beban Usaha	(5.461,3)	(10.308,2)	(6.229,7)	(4.749,8)	(3.219,9)	(2.470,7)
Laba / (Rugi) Bersih	706,4	(15,1)	250,8	651,9	(224,1)	(45,3)

Rasio-rasio penting dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direktur. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa apabila Perseroan membukukan laba bersih pada tahun berjalan, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi Direksi setelah pembagian tersebut disetujui dalam RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sebesar 15% sampai dengan 20% atas laba bersih konsolidasian Perseroan setelah pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian atas laba/(rugi) kurs yang belum direalisasi.

Pada tahun 2008 Perseroan membukukan rugi senilai Rp15,1 miliar, oleh karena itu manajemen Perseroan tidak akan membagikan dividen tunai.



Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI.

7. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 116 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga adalah Indocel Holding Sdn. Bhd. Keterangan mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

8. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham ("BAE") dan sebagai Agen Pelaksana PUT I PT Excelcomindo Pratama Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I PT Excelcomindo Pratama Tbk. No. 121 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Keterangan selengkapnya mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT I dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

9. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.836.000.000.000 (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah).

Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dengan harga penawaran sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham.

Keterangan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selengkapnya dicantumkan pada Bab XVI dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.836.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah).

Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham melalui pelaksanaan HMETD. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar bursa efek sesuai Peraturan Bapepam IX.D.1 selama 5 Hari Bursa mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2009. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Desember 2009. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 7 Desember 2009 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Indocel Holding Sdn. Bhd., selaku Pembeli Siaga akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PUT I PT Excelcomindo Pratama Tbk. No. 116 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.



PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

Kegiatan Usaha :

Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

grhaXL

Jl. Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta 12950, Indonesia

Telepon : (021) 576 1881; Faksimili : (021) 579 59025

Website : www.xl.co.id

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko persaingan dalam menghadapi kompetisi yang ketat dari pesaing-pesaing lama dan para pendatang baru di pasar telekomunikasi seluler.

Risiko usaha lainnya yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dapat dilihat pada Bab V dalam Prospektus ini.



Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070 tanggal 8 November 1991.

Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.229, tanggal 29 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang merubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-83359.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan no. AHU-0106524.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan agenda no. 1223/RUB.09.03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009. Saat ini, proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 229 tanggal 29 Juli 2008 masih berlangsung, sesuai dengan keterangan Kantor Notaris Sutjipto, SH, dalam suratnya tanggal 15 Mei 2009.

Adapun riwayat pencatatan saham Perseroan secara kronologis mulai dari Penawaran Umum Perdana (IPO) adalah sebagai berikut:

Jenis Corporate Action	Tanggal Pencatatan	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham yang dicatatkan (lembar)
Penawaran Perdana	29 September 2005	1.427.500.000	1.427.500.000
Company Listing	29 September 2005	5.662.500.000	7.090.000.000

Selanjutnya kronologis pencatatan efek bersifat hutang yang telah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Nama Efek	Dicatatkan di	Tanggal Efektif	Tanggal pencatatan	Jumlah Pokok	Kupon	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Excelcom I Tahun 2003	BEI	10 Oktober 2003	23 Oktober 2003	Rp 1.250.000.000.000	Seri A, kupon = 14.25% tetap selama umur obligasi Seri B, kupon = 14.25% untuk 2 tahun pertama. Kupon tahun ke-3 – ke-5 mengambang sebesar SBI 3 bulan plus 5%, dengan ketentuan tingkat bunga mengambang tersebut tidak lebih rendah dari 11% dan tidak lebih tinggi dari 17% per tahun	21 Oktober 2008, namun telah dibeli kembali lebih awal pada tanggal 21 Juli 2005
Obligasi Excecom II Tahun 2007	BEI	13 April 2007	27 April 2007	Rp 1.500.000.000.000	10.35%	26 April 2012
8% Guaranteed Notes Due 2009	Singapore Stock Exchange	15 Januari 2004	27 Januari 2004	USD 350.000.000	8.0%	27 Januari 2009, namun telah dibeli kembali lebih awal pada tanggal 25 Januari 2008
7.125% Guaranteed Notes Due 2013	Singapore Stock Exchange	12 January 2006	18 January 2006	USD 250.000.000	7.125%	18 Januari 2013, namun sebagian telah dilunasi.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).....	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732
3. Direksi			
- Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072
- Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012
- Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000		22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932	7.129.124.400	712.912.440.000	83,7932
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732	1.358.997.000	135.899.700.000	15,9732
3. Direksi						
- Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072	614.400	61.440.000	0,0072
- Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012	100.800	10.080.000	0,0012
- Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003	29.400	2.940.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249	19.134.000	1.913.400.000	0,2249
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000	8.508.000.000	850.800.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000		14.142.000.000	1.414.200.000.000	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya tidak diambil oleh pemegang saham lainnya kecuali Indocel Holding Sdn Bhd, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000		22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932	7.358.937.000	735.893.700.000	86,4943
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732	1.132.497.500	113.249.750.000	13,3110
3. Direksi						
- Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072	512.000	51.200.000	0,0060
- Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012	84.000	8.400.000	0,0010
- Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003	24.500	2.450.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249	15.945.000	1.594.500.000	0,1874
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000	8.508.000.000	850.800.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000		14.142.000.000	1.414.200.000.000	

Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT I ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.



Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka:

- HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 melalui Bursa dan di luar Bursa;
- Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan;
- Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2009 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Saham Baru yang berasal dari PUT I ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebanyak 7.090.000.000 (tujuh miliar sembilan puluh juta) Saham Lama dan sebanyak 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) Saham Baru yang berasal dari PUT I ini, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian seluruh saham yang dicatatkan akan berjumlah 8.508.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan juta) saham.

Jika Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN BERENCANA AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari PUT I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk membayar hutang Perseroan (dengan menggunakan kurs nilai tukar Rp9.485,-/USD yaitu *spot rate* Bloomberg tanggal 12 Oktober 2009), yaitu antara lain :

1. Sekitar 47,64% (empat puluh tujuh koma enam puluh empat persen) atau Rp1.327.900.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) atau setara dengan USD 140.000.000 (seratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran pinjaman sindikasi dengan DBS Bank Ltd., Export Development Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dan Chinatrust Commercial Bank, Ltd., dengan ringkasan struktur pembayaran sebagai berikut:

Jenis Hutang	: Pinjaman Kredit Sindikasi
Saldo Hutang per 30 Juni 2009	: USD 140.000.000 atau ekuivalen Rp1.327.900.000.000,-
Jumlah Hutang Yang Akan Dilunasi	: USD 140.000.000 atau ekuivalen Rp1.327.900.000.000,- (100% dari saldo hutang)
Tingkat Bunga	: SIBOR 1 bulan + margin (2,00-2,35%)
Jangka Waktu	: 3 tahun
Tanggal Perjanjian Kredit	: 06 November 2008
Tanggal Jatuh Tempo	: 05 November 2011
Jaminan	: Tidak ada jaminan
Opsi Pembayaran Lebih Awal	: Diperkenankan dilakukan pembayaran lebih awal dari tanggal jatuh tempo

2. Sekitar 14,35% (empat belas koma tiga puluh lima persen) atau Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) untuk pembayaran pinjaman kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jenis Hutang	: Pinjaman Kredit Bilateral
Saldo Hutang per 30 Juni 2009	: Rp3.600.000.000.000,-
Jumlah Hutang Yang Akan Dilunasi	: Rp400.000.000.000,- (11% dari saldo hutang)
Tingkat Bunga	: JIBOR 1 bulan + margin 1,5%
Jangka Waktu	: 5 tahun (dengan cicilan setiap tahun)
Tanggal Perjanjian Kredit	: 19 Desember 2007
Tanggal Jatuh Tempo	: 18 Desember 2012 (cicilan terakhir)
Jaminan	: Tidak ada jaminan

3. Sekitar 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) atau Rp474.250.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran pinjaman kredit dengan PT Bank Mizuho Indonesia.

Jenis Hutang	: Pinjaman Kredit Bilateral
Saldo Hutang per 30 Juni 2009	: USD 50.000.000 atau ekuivalen Rp474.250.000.000,-
Jumlah Hutang Yang Akan Dilunasi	: USD 50.000.000 atau ekuivalen Rp474.250.000.000,- (100% dari saldo hutang)
Tingkat Bunga	: LIBOR 1 bulan + margin 0,95%
Jangka Waktu	: 3 tahun
Tanggal Perjanjian Kredit	: 15 Januari 2007
Tanggal Jatuh Tempo	: 29 Januari 2010
Jaminan	: Tidak ada jaminan
Opsi Pembayaran Lebih Awal	: Diperkenankan dilakukan pembayaran lebih awal dari tanggal jatuh tempo

4. Sekitar 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) atau Rp474.250.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan USD 50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran pinjaman kredit dengan DBS Bank Ltd.

Jenis Hutang	: Pinjaman Kredit Bilateral
Saldo Hutang per 30 Juni 2009	: USD 50.000.000 atau ekuivalen Rp474.250.000.000,-
Jumlah Hutang Yang Akan Dilunasi	: USD 50.000.000 atau ekuivalen Rp474.250.000.000,- (100% dari saldo hutang)



Tingkat Bunga	: LIBOR 1 bulan + margin 1,00%
Jangka Waktu	: 3 tahun
Tanggal Perjanjian Kredit	: 19 April 2007
Tanggal Jatuh Tempo	: 26 April 2010
Jaminan	: Tidak ada jaminan
Opsi Pembayaran Lebih Awal	: Diperkenankan dilakukan pembayaran lebih awal dari tanggal jatuh tempo

5. Sekitar 3,99% (tiga koma sembilan puluh sembilan persen) atau Rp111.132.715.455,- (seratus sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) atau setara dengan USD 11.716.681 (sebelas juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran pinjaman kredit dengan Exportkreditnämnden (EKN) Buyer Credit Facility yang didanai oleh Swedish Export Credit Corporation.

Jenis Hutang	: Pinjaman Kredit Ekspor
Saldo Hutang per 30 Juni 2009	: USD 198.667.400,- atau ekuivalen Rp1.884.360.289.000,-
Jumlah Hutang Yang Akan Dilunasi	: USD 11.716.681,- atau ekuivalen Rp111.132.715.455,- (5,90% dari saldo hutang)
Tingkat Bunga	: LIBOR 6 bulan + 1,5% margin dan SEK <i>funding cost</i>
Jangka Waktu	: 7 tahun (dengan cicilan setiap 6 bulan)
Tanggal Perjanjian Kredit	: 12 Desember 2008
Tanggal Jatuh Tempo	: 15 Juli 2015 (cicilan terakhir)
Jaminan	: Tidak ada jaminan

Pembayaran pinjaman kredit sindikasi (DBS Bank Ltd., Export Development Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., dan Chinatrust Commercial Bank, Ltd.), pinjaman kredit bilateral dengan PT Bank Mizuho Indonesia, dan pinjaman kredit bilateral dengan DBS Bank Ltd. adalah merupakan pembayaran yang dipercepat. Sedangkan pembayaran terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Exportkreditnämnden (EKN) Buyer Credit Facility adalah sesuai dengan jatuh tempo dari hutang yang bersangkutan.

Kelima fasilitas kredit yang akan dibayarkan di atas bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,71% dari nilai PUT I yang meliputi:

No	Uraian	Persentase
1.	Biaya Jasa Profesi /Lembaga Penunjang Pasar Modal	
	- Akuntan Publik	0,32%
	- Konsultan Hukum	0,54%
	- Notaris, Biro Administrasi Efek, Biaya publikasi iklan, cetakan dll.....	0,01%
2.	Biaya Lain-lain	
	- Penasehat Keuangan	0,84%
	Jumlah	1,71%

Atas Hutang Perseroan yang akan dibayar dengan menggunakan dana hasil PUT I setelah dikurangi dengan biaya emisi, pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Bapepam dan LK secara periodik sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam No. X.K.4").

Sesuai laporan yang telah disampaikan ke Bapepam-LK, Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil emisi Obligasi Excelcom II Tahun 2007 sejumlah Rp1.492.135 juta.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke Bapepam dan LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.



III. PERNYATAAN HUTANG

KEWAJIBAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai total kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp24.108,8 miliar yang terdiri dari:

	30 Juni 2009
	(Rp miliar)
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha – pihak ketiga	2.282,8
Hutang usaha – pihak yang mempunyai hubungan istimewa ...	32,3
Hutang pajak	147,3
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar	702,2
Penghasilan tangguhan	770,3
Hutang derivatif	72,4
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.034,2
Jumlah Kewajiban Lancar	6.041,5
Kewajiban Tidak Lancar	
Hutang usaha – pihak ketiga	268,6
Pinjaman jangka panjang	14.112,8
Kewajiban pajak tangguhan	819,6
Obligasi jangka panjang	2.752,4
Hutang derivatif	25,2
Penyisihan imbalan kerja	88,7
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	18.067,3
Jumlah Kewajiban	24.108,8

A. KEWAJIBAN LANCAR

a. Hutang Usaha

1. Hutang usaha – pihak ketiga

Hutang usaha terutama terdiri dari hutang untuk pembelian aset tetap, hutang untuk biaya operasional dan hutang untuk biaya interkoneksi dan biaya jelajah internasional.

Saldo hutang usaha pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp2.282,8 miliar. Hutang usaha yang berdenominasi mata uang Rupiah adalah sebesar Rp793,7 miliar dan yang berdenominasi mata uang asing sebesar Rp1.489,1 miliar.

2. Hutang usaha – pihak yang memiliki hubungan istimewa

Saldo hutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp32,3 miliar.

b. Hutang pajak

Saldo hutang pajak pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp147,3 miliar yang terdiri dari:



30 Juni 2009

(Rp miliar)

Hutang pajak penghasilan badan – Anak Perusahaan	5,7
Pajak penghasilan karyawan (pasal 21)	3,8
Pajak atas sewa dan jasa lain-lain (pasal 23/26)	137,8
Jumlah	147,3

c. Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar

Saldo hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp702,2 miliar yang terdiri dari :

30 Juni 2009

(Rp miliar)

Biaya jasa telekomunikasi yang masih harus dibayar	179,8
Uang muka dari pelanggan	169,5
Hutang bunga	139,9
Biaya gaji dan kesejahteraan karyawan yang masih harus dibayar	136,2
Lain-lain	76,8
Jumlah	702,2

d. Penghasilan tangguhan

Saldo penghasilan tangguhan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp770,3 miliar. Penghasilan tangguhan tersebut berasal dari penjualan *voucher* isi ulang untuk produk jasa layanan prabayar, berupa total pulsa yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi.

e. Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Jumlah kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp2.034,2 miliar yang terdiri dari pembayaran cicilan atas fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fasilitas kredit Exportkreditnämnden (EKN), fasilitas kredit Standard Chartered Bank, fasilitas kredit PT Bank Mizuho Indonesia, fasilitas kredit DBS Bank Ltd.

f. Kewajiban Obligasi Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Perseroan telah melakukan sejumlah pembelian kembali atas obligasi yang beredar. Pada tanggal 30 Juni 2009, obligasi yang beredar sejumlah USD124,1 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2013 dan Rp1,5 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2012.

B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

a. Hutang usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp268,6 miliar yang terdiri dari hutang berdenominasi mata uang Rupiah sebesar Rp162,8 miliar dan hutang berdenominasi mata uang asing sebesar Rp105,8 miliar.

b. Pinjaman jangka panjang

Saldo pinjaman jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp14.112,8 miliar yang terdiri dari fasilitas pinjaman kredit dan obligasi sebagai berikut:

i. Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 19 Desember 2007, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp4.000 miliar. Fasilitas kredit akan jatuh tempo secara bertahap, yaitu 10% dari jumlah kredit yang ditarik untuk 4 (empat) tahun pertama sejak tanggal penarikan kredit yang pertama,



dan 60% dari jumlah kredit yang ditarik untuk tahun kelima sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Bunga dibayar bulanan dengan suku bunga mengambang JIBOR-bulanan ditambah margin 1,50%. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0. Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp3.600 miliar.

ii. Fasilitas Kredit PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 26 September 2007, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp1.000 miliar. Jumlah batas fasilitas kredit telah beberapa kali ditingkatkan, terakhir menjadi Rp3.000 miliar dengan amandemen tanggal 4 April 2008. Fasilitas kredit akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari setiap tanggal penarikan terakhir dari masing-masing fasilitas kredit. Bunga dibayar kuartalan dengan suku bunga mengambang JIBOR-tiga-bulan ditambah margin 1,25%.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan mempertahankan dari waktu ke waktu agar Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas. Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp3.000 miliar.

iii. Fasilitas Kredit Exportkreditnämnden (EKN)

Pada tanggal 12 Desember 2008, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit senilai USD 213.949.508 dengan EKN Buyer Credit Facility untuk pembiayaan pembelian peralatan dari Ericsson, Swedia. ABN AMRO Bank N.V., Stockholm dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai agen fasilitas. Fasilitas kredit akan jatuh tempo secara bertahap senilai USD 15.282.107,71 setiap 6 bulan, yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya sampai 15 Juli 2015.

Bunga dibayar enam bulanan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-enam-bulan ditambah margin 0,35% dan SEK *Funding Cost* 1,15%. Selain bunga, Perseroan juga dikenakan premi asuransi jaminan yang diberikan oleh EKN kepada Perseroan atas fasilitas pinjaman, yang telah dibayar oleh Perseroan senilai USD 13.949.508.

Pada tanggal 23 Maret 2009, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit kedua dengan EKN Buyer Credit Facility senilai USD 214.352.382, dengan ABN AMRO Bank N.V., cabang Hong Kong dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai *arranger*. Fasilitas kredit ini terdiri dari 2 fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas A senilai USD 123.579.208 yang akan jatuh tempo secara bertahap senilai USD 8.827.086,29 setiap 6 bulan, yakni setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya sampai 1 Oktober 2015. Bunga dibayar enam bulanan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-enam-bulan ditambah margin 0,35% dan SEK *Funding Cost*.
- Fasilitas B senilai USD 90.773.174 yang akan jatuh tempo secara bertahap senilai USD 6.483.798,14 setiap 6 bulan, yakni setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya sampai 15 Juli 2016. Bunga dibayar enam bulanan dengan suku bunga mengambang sebesar *Commercial Interest Reference Rate* (CIRR) ditambah margin 0,30%.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti aktivitas lindung nilai, pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset dan memastikan rasio hutang terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,5 berbanding 1,0 selama periode pinjaman.

Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 346.531.907 (setara dengan Rp3.543 miliar).

iv. Fasilitas Kredit Standard Chartered Bank

Pada tanggal 8 Januari 2007, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Standard Chartered Bank sebesar USD 50.000.000. Perjanjian kredit akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari tanggal pertama kali penarikan. Bunga dibayar kuartalan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan ditambah margin 1,05%.

Perjanjian ini telah diperbaharui beberapa kali sepanjang tahun 2007 dan 2008, dengan amandemen terakhir sebagai berikut:

- Peningkatan fasilitas kredit menjadi USD 100.000.000 yang tersedia sampai dengan 31 Maret 2008 dengan suku bunga mengambang sebesar SIBOR-tiga-bulan ditambah margin 1,05%. Perjanjian kredit ini akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari tanggal masing-masing penarikan.



- Penambahan fasilitas *bridging loan* sebesar USD 110.000.000 atau maksimum Rp1.000 miliar. Perjanjian kredit ini akan jatuh tempo 9 (sembilan) bulan dari tanggal masing-masing penarikan, tapi tidak melebihi 31 Desember 2008 dan bunga bulanan dengan suku bunga mengambang sebesar SBI-bulanan ditambah margin 1,10%.
- Menambah fasilitas kredit sebesar USD 50.000.000. Perjanjian kredit ini akan jatuh tempo 2 (tahun) dari tanggal masing-masing penarikan. Bunga dibayar kwartalan dengan suku bunga mengambang sebesar SIBOR-tiga-bulan ditambah margin 2,00%.

Dalam perjanjian fasilitas kredit terdapat klausa mengenai gangguan antar bank atau mata uang, dimana Standard Chartered Bank dapat menggunakan biaya pendanaan bank sebagai pengganti SIBOR.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan kepemilikan Axiata Group Berhad di Perseroan tidak kurang dari 51%.

Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 150.000.000 atau setara dengan Rp1.533,75 miliar.

v. Fasilitas Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 6 November 2008, Perseroan menandatangani perjanjian sindikasi fasilitas kredit dengan DBS Bank Ltd., Export Development Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dan Chinatrust Commercial Bank, Ltd., dengan PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas sebesar USD 140.000.000. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan setuju untuk membayar bunga dengan suku bunga mengambang sebesar SIBOR ditambah margin tertentu. Perjanjian kredit ini akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun setelah tanggal perjanjian. Sejak Mei 2009, periode pembayaran bunga diubah dari kwartalan menjadi bulanan.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti memastikan agar rasio hutang terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan rasio EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak boleh kurang dari 3,0 berbanding 1,0, dan kepemilikan Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung tidak kurang dari 51%.

Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 140.000.000 atau setara dengan Rp1.431,5 miliar.

vi. Fasilitas Kredit PT Bank DBS Indonesia dan DBS Bank Ltd.

Pada tanggal 19 April 2007, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebesar USD 50.000.000. Perjanjian kredit akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari tanggal pertama kali penarikan. Bunga dibayar kwartalan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan ditambah margin 1,00%. Sejak Maret 2009, periode pembayaran bunga diubah secara bertahap dari kwartalan menjadi bulanan.

Pada bulan November dan Desember 2007, fasilitas kredit ini telah diperbaharui dengan menambah fasilitas kredit baru sebesar Rp700 miliar. Bunga dibayar kwartalan dengan suku bunga mengambang sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditambah margin 1,10%.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan kepemilikan Axiata Group Berhad di Perseroan tidak kurang dari 51%.

Pada tanggal 29 September 2008 dan 27 Oktober 2008, Perseroan menandatangani *Notice of Assignment* di mana PT Bank DBS Indonesia mengalihkan pinjamannya sebesar USD 50.000.000 kepada DBS Bank Ltd., Singapura, efektif sejak tanggal 29 September 2008 dan 27 Oktober 2008.

Pokok pinjaman Perseroan dari PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp700 miliar. Pokok pinjaman Perseroan dari DBS Bank Ltd., Singapura pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 50.000.000 atau setara dengan Rp511,3 miliar.



vii. Fasilitas Kredit PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 15 Januari 2007, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mizuho Indonesia sebesar USD 50.000.000. Perjanjian kredit akan jatuh tempo tanggal 29 Januari 2010. Bunga dibayar kwartalan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan ditambah margin 0,95%. Sejak 31 Oktober 2008, periode pembayaran bunga diubah dari kwartalan menjadi bulanan.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi persyaratan yaitu kepemilikan Axiata Group Berhad tidak kurang dari 51% di Perseroan. Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 50.000.000 atau setara dengan Rp511,3 miliar.

viii. Fasilitas Kredit The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC)

Pada tanggal 18 Januari 2008, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC sebesar USD 50.000.000. Fasilitas kredit akan jatuh tempo 1 (satu) tahun dari tanggal penarikan pertama, yang kemudian diubah menjadi 3 (tiga) tahun. Bunga dibayar kwartalan dengan suku bunga mengambang SIBOR-tiga-bulan ditambah margin 1,75% dan kemudian diubah menjadi SIBOR ditambah margin 2,25%. Sejak April 2009, periode pembayaran bunga diubah dari kwartalan menjadi bulanan.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aset, dan tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan kepemilikan Axiata Group Berhad di Perseroan tidak kurang dari 51%.

Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 50.000.000 atau setara dengan Rp511,3 miliar.

ix. Fasilitas Kredit JPMorgan Chase Bank, N.A.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan JPMorgan Chase Bank, N.A. sebesar USD 30.000.000. Perjanjian kredit akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun dari tanggal masing-masing penarikan. Bunga dibayar kwartalan dengan suku bunga mengambang sebesar LIBOR-tiga-bulan ditambah margin 1,00%. Sejak Maret 2009, periode pembayaran bunga diubah dari kwartalan menjadi bulanan.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan kepemilikan Axiata Group Berhad di Perseroan tidak kurang dari 51%.

Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 50.000.000 atau setara dengan Rp306,8 miliar.

x. Fasilitas Kredit PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Pada tanggal 28 Juli 2008, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebesar Rp300 miliar. Perjanjian kredit akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011. Berdasarkan kontrak tersebut, Perseroan setuju untuk membayar bunga bulanan dengan suku bunga mengambang sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditambah margin 1,50%.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan kepemilikan Axiata Group Berhad di Perseroan tidak kurang dari 51%.

Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp300 miliar.

xi. Fasilitas Kredit PT ANZ Panin Bank

Pada tanggal 22 September 2008, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT ANZ Panin Bank sebesar Rp250 miliar. Perjanjian kredit akan jatuh tempo 2 (dua) tahun dari tanggal penarikan, atau paling lambat tanggal 3 Desember 2010. Bunga dibayar bulanan dengan suku bunga mengambang sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditambah margin 2,15%.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti tidak menambah hutang baru selama penambahan hutang baru tersebut akan mengakibatkan rasio hutang terhadap EBITDA lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan kepemilikan Axiata Group Berhad di Perseroan tidak kurang dari 51%.



Pokok pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp250 miliar.

c. Kewajiban pajak tangguhan

Saldo kewajiban pajak tangguhan pada 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp819,6 miliar.

d. Obligasi jangka panjang

Saldo obligasi jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp2.752,4 miliar.

Perincian kewajiban atas obligasi jangka panjang per tanggal 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2009
	(Rp miliar)
Obligasi USD	1.268,6
Obligasi IDR	1.500,0
	2.768,6
Diskonto yang belum diamortisasi	(16,2)
	2.752,4
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Jumlah bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.752,4

e. Hutang derivatif

Saldo hutang derivatif pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp25,2 miliar. Hutang derivatif merupakan hutang yang berasal dari kontrak berjangka dan kontrak swap tingkat bunga dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2009
	(Rp miliar)
Kontrak berjangka	65,3
Kontrak swap tingkat bunga	32,3
	97,6
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(72,4)
Jumlah bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	25,2

f. Penyisihan imbalan kerja

Saldo penyisihan imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp88,7 miliar dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2009
	(Rp miliar)
Saldo awal	76,9
Penyisihan selama periode berjalan	12,4
Pembayaran selama periode berjalan	(0,6)
Saldo akhir	88,7

	30 Juni 2009
	(Rp miliar)
Nilai kini kewajiban	106,0
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(21,9)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	4,6
Kewajiban di neraca	88,7



Perhitungan aktuarial atas penyisihan imbalan kerja per tanggal 30 Juni 2009 dilakukan oleh PT Mercer Indonesia, aktuaris independen. Perhitungan aktuarial tersebut dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Tingkat diskonto : 11,5% per tahun
- Tingkat kenaikan gaji : 11% per tahun
- Table mortalita : Tabel kematian Indonesia 1999 (TMI'99)
- Tingkat kecacatan : 10% dari TMI'99
- Tingkat pengunduran diri : 10% per tahun sampai dengan umur 25 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 1% per tahun pada umur 46 per tahun; 1% per tahun untuk umur 46 – 55 tahun
- Tingkat pensiun : 100% pada umur pensiun normal 56 tahun

Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian serta disajikan dalam Prospektus ini.

Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus.

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen, sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan-ikatan lain yang jumlahnya material selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996 dan merupakan operator seluler terbesar ketiga di Indonesia diukur dari jumlah pendapatan dan pelanggan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, Perseroan mencatat pendapatan kotor sebesar Rp6.254,3 miliar dan EBITDA sebesar Rp2.567,9 miliar. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008, Perseroan mencatat pendapatan kotor sebesar Rp12.156,0 miliar dan EBITDA sebesar Rp5.131,5 miliar dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007, Perseroan mencatat pendapatan kotor sebesar Rp8.364,7 miliar dan EBITDA sebesar Rp3.509,2 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan mencatat pendapatan kotor sebesar Rp6.466,1 miliar dan EBITDA sebesar Rp2.553,5 miliar.

Tingkat penetrasi telekomunikasi seluler di Indonesia dibandingkan dengan angka Pendapatan Domestik Bruto adalah salah satu yang terendah di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan telekomunikasi yang telah dikompilasi oleh Mandiri Sekuritas *research team* diperkirakan tingkat penetrasi operator seluler di Indonesia mengalami peningkatan dari 31% per tanggal 31 Desember 2006 menjadi 41% per tanggal 31 Desember 2007 dan menjadi 63% per tanggal 31 Desember 2008, yang disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan pelanggan yang melebihi 20 juta setiap tahun. Seiring dengan perkembangan pasar seluler di Indonesia, kenaikan jumlah pelanggan ini berasal dari pertumbuhan yang signifikan pada pelanggan prabayar.

Saat ini ada sembilan perusahaan yang bergerak sebagai operator telekomunikasi. Namun demikian, tiga perusahaan terbesar menguasai lebih dari 85% total pasar (*Credit Suisse Report*, Agustus 2009). Mulai dari pertengahan tahun 2007, biaya percakapan telah menurun secara drastis, sehingga biaya untuk melakukan percakapan saat ini sudah sangat murah. Operator-operator besar sudah menawarkan tarif percakapan yang murah. Perbedaan harga antara operator-operator besar dengan operator-operator kecil sudah semakin menipis, sehingga harga bukan lagi merupakan keunggulan kompetitif bagi operator-operator kecil. Di masa yang akan datang, hal-hal lain seperti layanan pelanggan, kecepatan akses data, dan lain-lain, akan merupakan keunggulan kompetitif bagi operator-operator telekomunikasi.

Basis pelanggan Perseroan berjumlah sekitar 24,3 juta pelanggan prabayar dan sekitar 371,7 ribu pelanggan pasca bayar dengan total pelanggan sebanyak 24,7 juta pelanggan per 30 Juni 2009; sekitar 25,6 juta pelanggan prabayar dan sekitar 416,7 ribu pelanggan pasca bayar dengan total pelanggan sebanyak 26,0 juta pelanggan per 31 Desember 2008; sekitar 15,0 juta pelanggan prabayar dan sekitar 481,0 ribu pelanggan pasca bayar dengan total pelanggan sebanyak 15,5 juta pelanggan per 31 Desember 2007; sekitar 9,1 juta pelanggan prabayar dan sekitar 386,6 ribu pelanggan pasca bayar dengan total pelanggan sebanyak 9,5 juta pelanggan per 31 Desember 2006. Seiring dengan terus berkembangnya layanan telekomunikasi, Perseroan mengharapkan jumlah total pelanggan akan terus meningkat dan pelanggan prabayar tetap menjadi porsi terbesar dari basis pelanggan.

Perseroan berkeyakinan permintaan pelanggan telepon seluler untuk layanan percakapan di Indonesia akan bertambah seiring dengan semakin murah nya tarif layanan percakapan dan selama Perseroan tetap memberikan kualitas layanan seluler dan cakupan jaringan yang sebanding dengan pesaing-pesaingnya. Perseroan telah membuat layanan percakapan prabayar yang terjangkau untuk pelanggan melalui promosi penurunan tarif yang terjadi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Waktu percakapan pun semakin meningkat karena biaya percakapan yang rendah. Dengan perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan akses untuk data juga semakin cepat. Hal ini dapat mengakibatkan semakin banyak pelanggan di masa mendatang untuk menggunakan layanan data selular.

Kondisi ini berakibat pertumbuhan daripada pendapatan data akan lebih tinggi daripada pendapatan percakapan. Semakin banyaknya produsen telepon seluler yang meluncurkan produk-produk baru dengan akses data yang berkecepatan tinggi dengan harga yang relatif murah juga mendukung tingginya penggunaan layanan data di masa mendatang.

Perseroan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan seluler dan cakupan jaringan seluler dengan meningkatkan jumlah BTS yang telah terpasang dari 7.260 pada 31 Desember 2006, 11.157 pada 31 Desember 2007, 16.729 pada 31 Desember 2008, dan 18.128 pada 30 Juni 2009. Sebagai hasil dari strategi ini, MoU Perseroan telah meningkat dari sekitar 2.886 juta menit pada 31 Desember 2006 menjadi sekitar 6.815 juta menit pada 31 Desember 2007, sekitar 54.886 juta menit pada 31 Desember 2008, mewakili CAGR sebesar 336,1%, dan sekitar 41.015 juta menit pada 30 Juni 2009, dan MSM Perseroan telah meningkat dari sekitar 29 menit pada 31 Desember 2006 menjadi sekitar 50 menit pada 31 Desember 2007, sekitar 212 menit pada 31 Desember 2008, mewakili CAGR 170,4% dan sekitar 268 menit pada



30 Juni 2009. Dengan informasi dari sistem penagihan terintegrasi dan sistem manajemen hubungan pelanggan, Perseroan berencana meninjau secara periodik dan merevisi harga dan tampilan produk dan paket layanan Perseroan. Perseroan juga berencana untuk melanjutkan penawaran tarif promosi regional untuk meningkatkan penetrasi pasar Perseroan pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada bulan Juli tahun 2007, Perseroan menurunkan secara drastis tarif percakapan sehingga mendorong durasi percakapan menjadi lebih panjang. Dengan menurunnya tarif percakapan secara drastis jumlah pelanggan Perseroan meningkat tajam, sehingga efek dari penurunan tarif dapat terkompensasi oleh peningkatan MoU pelanggan Perseroan. Sebagai hasilnya, pendapatan Perseroan di tahun 2007 meningkat sebesar 29% dibandingkan tahun 2006 dan di tahun 2008 meningkat sebesar 45% dibandingkan tahun 2007.

Perseroan secara berkala meninjau strategi distribusi produknya. Perseroan juga memiliki kebijakan mengenai target-target (*Key Performance Indicator*) yang harus dipenuhi oleh para distributor secara berkala. Apabila ada distributor yang tidak dapat memenuhi target yang telah diberikan maka Perseroan dapat mengganti distributor tersebut. Perseroan juga memiliki divisi *Direct Sales* yang melakukan penjualan secara langsung kepada calon pelanggan.

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian yang mulai membaik seiring dengan mulai menguatnya Rupiah dibandingkan pada awal tahun 2009 memberikan dampak yang positif terhadap industri telekomunikasi pada umumnya. Biaya bunga yang dibayar dalam mata uang asing secara Rupiah juga menurun dengan menguatnya nilai Rupiah terhadap USD.

Menurunnya suku bunga pinjaman Rupiah juga berdampak positif kepada menurunnya pembayaran biaya bunga dari Perseroan.

Harga komoditi yang meningkat mengakibatkan pendapatan dari sebagian pelanggan Perseroan juga ikut meningkat, yang secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan mereka menggunakan lebih banyak layanan seluler Perseroan.

3. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. Pendapatan Usaha

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Jasa telekomunikasi seluler				
Percakapan	3.207,5	6.622,6	3.866,3	2.747,2
Non-percakapan	1.737,0	3.140,7	2.632,5	2.239,4
Abonemen	3,1	4,4	1,9	0,9
	4.947,6	9.767,7	6.500,7	4.987,5
Jasa interkoneksi seluler				
Interkoneksi domestik	454,6	1.036,9	887,0	866,3
Jelajah internasional	285,1	483,5	465,3	306,9
SMS interkoneksi	8,8	13,8	25,9	23,7
Lain-lain	1,6	3,2	5,4	4,9
	750,1	1.537,4	1.383,6	1.201,8
Pendapatan usaha bruto seluler	5.697,7	11.305,1	7.884,3	6.189,3



Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)
Pendapatan bruto jasa telekomunikasi lainnya				
Sewa menara	288,5	276,7	-	-
Sirkuit langganan	225,0	478,5	408,7	238,7
Sewa internet	26,9	63,9	58,8	28,8
Lain-lain	16,2	31,8	12,9	9,3
	556,6	850,9	480,4	276,8
Pendapatan usaha bruto	6.254,3	12.156,0	8.364,7	6.466,1
Diskon				
Diskon atas pendapatan bruto usaha seluler	(43,7)	(94,8)	(375,1)	(688,1)
Diskon atas pendapatan bruto jasa telekomunikasi lainnya.	-	-	(0,1)	(0,3)
	(43,7)	(94,8)	(375,2)	(688,4)
Pendapatan usaha bruto setelah dikurangi diskon	6.210,6	12.061,2	7.989,5	5.777,7

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi seluler

Pendapatan dari jasa telekomunikasi seluler merupakan sumber utama pendapatan Perseroan dan meliputi pendapatan dari layanan percakapan, layanan non-percakapan, dan abonemen. Pendapatan dari layanan percakapan meliputi pendapatan dari penggunaan layanan percakapan GSM dan 3G oleh pelanggan prabayar dan pasca bayar. Pendapatan dari layanan non-percakapan meliputi pendapatan dari layanan SMS, layanan tambahan, dan *starter pack* oleh pelanggan prabayar dan pasca bayar. Pendapatan dari abonemen Perseroan adalah pendapatan yang berasal dari pelanggan pasca bayar berupa penggunaan minimum sebesar Rp25.000.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi seluler Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp4.947,6, dimana terdiri pendapatan dari layanan percakapan, pendapatan dari layanan non-percakapan dan abonemen sebesar Rp3.207,5 miliar, Rp1.737,0 miliar dan Rp3,1 miliar atau sebesar 64,8%, 35,1% dan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi seluler.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi seluler Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp9.767,7 miliar, meningkat 50,3% dibandingkan pendapatan pada tahun 2007 sebesar Rp6.500,7 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari layanan percakapan. Peningkatan pendapatan dari layanan percakapan ini disebabkan karena Perseroan menawarkan berbagai program pemasaran yang menarik seperti misalnya program "Nelpon Sepuasnya", "XL Semaumu" dan lain-lain.

Pendapatan dari layanan percakapan meningkat 71,3% menjadi Rp6.622,6 miliar pada tahun 2008 dari Rp3.866,3 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh meningkatnya MoU Perseroan dari 6.815 juta menit per 31 Desember 2007 menjadi sekitar 54.886 juta menit per 31 Desember 2008.

Pendapatan dari layanan non-percakapan meningkat 19,3% menjadi Rp3.140,7 miliar pada tahun 2008 dari Rp2.632,5 miliar pada tahun 2007, disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari SMS.

Pendapatan abonemen meningkat 131,6% menjadi Rp4,4 miliar pada tahun 2008 dari Rp1,9 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh meningkatnya abonemen dari program pelanggan baru korporat yang dimulai di bulan Oktober 2007.



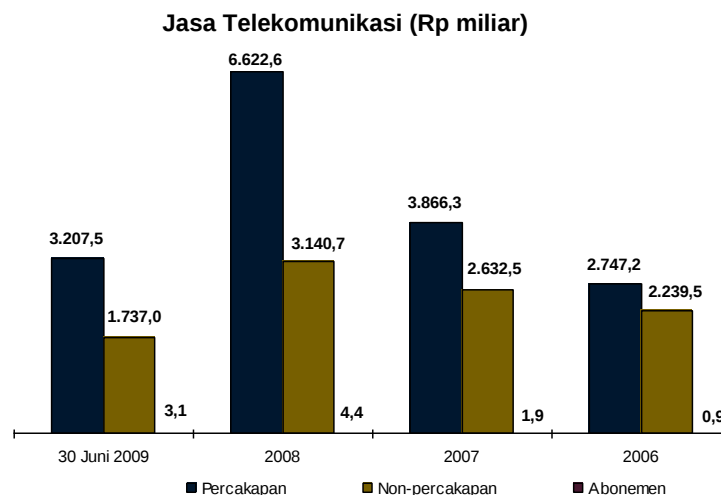
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi seluler Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp6.500,7 miliar, meningkat 30,3% dibandingkan pendapatan pada tahun 2006 sebesar Rp4.987,5 miliar. Peningkatan pendapatan dari jasa telekomunikasi seluler terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari layanan percakapan. Peningkatan pendapatan dari layanan percakapan ini disebabkan karena Perseroan menurunkan tarif percakapan sesama XL menjadi Rp1/detik pada bulan Juli 2007 dari sebelumnya Rp10/detik. Tarif Rp1/detik ini dapat dinikmati setelah pelanggan melakukan panggilan selama dua menit. Dengan diturunkannya tarif percakapan menjadi Rp1/detik, durasi percakapan pelanggan Perseroan meningkat tajam, sehingga efek dari penurunan tarif percakapan tersebut dapat terkompensasi oleh peningkatan MoU pelanggan Perseroan. Selain itu, dengan diturunkannya tarif percakapan tersebut, Perseroan mendapatkan banyak pelanggan baru, sehingga pendapatan Perseroan di tahun 2007 meningkat secara signifikan.

Pendapatan dari layanan percakapan meningkat 40,7% menjadi Rp3.866,3 miliar pada tahun 2007 dari Rp2.747,2 miliar pada tahun 2006, seiring dengan meningkatnya MoU Perseroan dari sekitar 2.886 juta menit per 31 Desember 2006 menjadi sekitar 6.815 juta menit per 31 Desember 2007, yang disebabkan oleh strategi penetapan harga yang terjangkau yang diperkenalkan pada bulan Juli 2007.

Pendapatan dari layanan non-percakapan meningkat 17,6% menjadi Rp2.632,5 miliar pada tahun 2007 dari Rp2.239,4 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh meningkatnya trafik SMS seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan prabayar dari sekitar 9,1 juta pelanggan per 31 Desember 2006 menjadi sekitar 15 juta pelanggan per 31 Desember 2007.

Pendapatan abonemen meningkat 111,1% menjadi Rp1,9 miliar pada tahun 2007 dari Rp0,9 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh kenaikan abonemen untuk layanan pasca bayar korporat (GSM *postpaid services*) yang diberikan kepada pelanggan korporat.



Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi seluler

Pendapatan yang berasal dari Jasa Interkoneksi Seluler termasuk pendapatan dari layanan interkoneksi domestik, jelajah internasional, SMS interkoneksi dan layanan lainnya.

Pendapatan layanan interkoneksi domestik meliputi pendapatan atas panggilan telepon dari PSTN ataupun pelanggan operator seluler lainnya kepada pelanggan Perseroan baik untuk panggilan lokal maupun jarak jauh dan panggilan internasional yang berasal dari luar negeri kepada pelanggan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006, tarif interkoneksi ditetapkan berdasarkan biaya yang harus dicantumkan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi dari masing-masing operator. Peraturan ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2007.

Perseroan menerima pembayaran dari operator di luar Indonesia terkait panggilan yang dibuat dan diterima oleh pelanggan mereka ketika melakukan *roaming* dengan jaringan Perseroan ketika melakukan kunjungan di Indonesia (*roaming in-bound*). Perjanjian jelajah internasional dengan mitra operator di luar negeri ini menetapkan biaya dari layanan ini. Perseroan menerima pembayaran dari layanan operator di luar Indonesia untuk layanan – layanan di atas dalam mata uang Dolar AS. Sebagai hasilnya, fluktuasi pada nilai



Rupiah terhadap Dolar AS mempengaruhi jumlah pendapatan yang berasal dari layanan *roaming in-bound* Perseroan yang dicatat dalam mata uang Rupiah.

Perseroan menerima pembayaran dari operator di luar Indonesia terkait dengan SMS yang dikirimkan dan diterima oleh pelanggan mereka ketika melakukan *roaming* dengan menggunakan jaringan Perseroan ketika sedang melakukan kunjungan di Indonesia. Perjanjian jelajah internasional dengan mitra operator di luar negeri dengan operator ini menetapkan biaya dari layanan-layanan di atas. Perseroan menerima pembayaran yang berasal dari operator di luar Indonesia untuk layanan ini dalam mata uang Dolar AS. Sebagai akibatnya, fluktuasi pada nilai Rupiah terhadap Dolar AS akan mempengaruhi jumlah pendapatan interkoneksi SMS yang dicatat oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pendapatan dari jasa interkoneksi seluler Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp750,1 miliar, dimana terdiri dari pendapatan interkoneksi domestik, pendapatan jelajah internasional, pendapatan SMS interkoneksi, dan pendapatan lain-lain sebesar masing-masing Rp454,6 miliar, Rp285,1 miliar, Rp8,8 miliar dan Rp1,6 miliar atau sebesar 60,6%, 38,0%, 1,2%, dan 0,2% dari jumlah pendapatan dari jasa interkoneksi seluler.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan dari jasa interkoneksi seluler Perseroan meningkat 11,1% menjadi Rp1.537,4 miliar pada tahun 2008 dari Rp1.383,6 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh meningkatnya pendapatan interkoneksi domestik dan jelajah internasional.

Pendapatan interkoneksi domestik meningkat 16,9% menjadi Rp1.036,9 miliar pada tahun 2008 dari Rp887,0 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan dari 15,5 juta pelanggan per 31 Desember 2007 menjadi 26,0 juta pelanggan per 31 Desember 2008 dan juga meningkatnya telepon masuk dari pelanggan operator telekomunikasi lain.

Pendapatan jelajah internasional meningkat 3,9% menjadi Rp483,5 miliar pada tahun 2008 dari Rp465,3 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan jelajah internasional oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia yang menggunakan jaringan Perseroan dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Rupiah adalah sebesar Rp9.419/USD per 31 Desember 2007 dan Rp10.950/USD per 31 Desember 2008.

Pendapatan SMS interkoneksi menurun 46,7% menjadi Rp13,8 miliar pada tahun 2008 dari Rp25,9 miliar pada tahun 2007, disebabkan karena menurunnya tarif program "SMS bulk" yang dijual ke pelanggan korporat.

Pendapatan lain-lain menurun 40,7% menjadi Rp3,2 miliar pada tahun 2008 dari Rp5,4 miliar pada tahun 2007, disebabkan karena menurunnya jumlah pelanggan korporat yang menggunakan program *Short Dialing Code* (SDC).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan dari jasa interkoneksi seluler Perseroan meningkat 15,1% menjadi Rp1.383,6 miliar pada tahun 2007 dari Rp1.201,8 miliar pada tahun 2006, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan jelajah internasional.

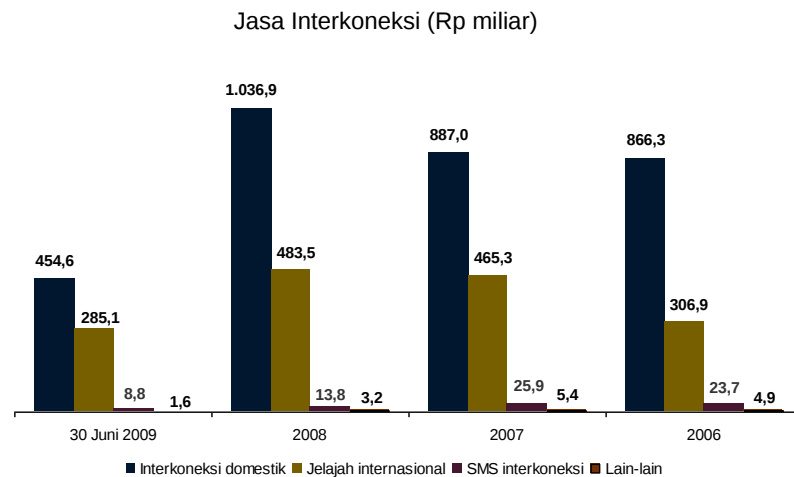
Pendapatan interkoneksi domestik meningkat 2,4% menjadi Rp887,0 miliar pada tahun 2007 dari Rp866,3 miliar pada tahun 2006, disebabkan oleh meningkatnya jumlah basis pelanggan prabayar yang mengkompensasi penurunan tarif interkoneksi.

Pendapatan jelajah internasional meningkat 51,6% menjadi Rp465,3 miliar pada tahun 2007 dari Rp306,9 miliar pada tahun 2006. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penggunaan jelajah internasional oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan menggunakan jaringan Perseroan juga melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Rupiah sebesar Rp9.020/USD per 31 Desember 2006 dan Rp9.419/USD per 31 Desember 2007.

Pendapatan SMS interkoneksi Perseroan meningkat 9,3% menjadi Rp25,9 miliar pada tahun 2007 dari Rp23,7 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan jumlah SMS internasional yang masuk ke jaringan Perseroan.



Pendapatan dari jasa interkoneksi lain-lain Perseroan meningkat 10,2% menjadi Rp5,4 miliar pada tahun 2007 dari Rp4,9 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan korporat yang menggunakan program promosi *Short Dialing Code* (SDC).



Pendapatan Usaha Bruto Seluler

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pendapatan usaha bruto seluler Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp5.697,7 miliar, yang mencerminkan 91,1% dari jumlah pendapatan usaha bruto.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan usaha bruto seluler Perseroan meningkat 43,4% menjadi Rp11.305,1 miliar pada tahun 2008 dari Rp7.884,3 miliar pada tahun 2007. Pendapatan usaha bruto seluler pada tahun 2008 mencerminkan 93,0% dari jumlah pendapatan usaha bruto dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencerminkan 94,3% dari jumlah pendapatan usaha bruto.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan usaha bruto seluler Perseroan meningkat 27,4% menjadi Rp7.884,3 miliar pada tahun 2007 dari Rp6.189,3 miliar pada tahun 2006. Pendapatan usaha bruto seluler pada tahun 2007 mencerminkan 94,3% dari jumlah pendapatan usaha bruto dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencerminkan 95,7% dari jumlah pendapatan usaha bruto.

Pendapatan usaha bruto dari jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan ini meliputi pendapatan yang berasal dari layanan sewa sirkit, sewa menara, sewa internet dan layanan lainnya. Perseroan mengakui pendapatan bulanan atas jasa sirkit langganan, sewa menara, sewa internet dan layanan lainnya berdasarkan tarif yang ditentukan dalam perjanjian antara Perseroan dan pelanggan-pelanggan Perseroan.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pendapatan usaha bruto dari jasa telekomunikasi lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp556,6 miliar, yang terdiri dari pendapatan sewa menara, pendapatan sirkit langganan, pendapatan sewa internet, dan pendapatan lain-lain sebesar masing-masing Rp288,5 miliar, Rp225,0 miliar, Rp26,9 miliar, Rp16,2 miliar atau sebesar 51,8%, 40,5%, 4,8%, dan 2,9% dari jumlah pendapatan bruto jasa telekomunikasi lainnya.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan bruto jasa telekomunikasi lainnya Perseroan meningkat 77,1% menjadi Rp850,9 miliar pada tahun 2008 dari Rp480,4 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh pendapatan dari sewa menara yang mulai diperoleh sejak Januari 2008 dan juga meningkatnya jumlah pelanggan korporat yang menggunakan layanan sewa sirkit.

Pendapatan sewa menara pada tahun 2008 adalah sebesar Rp276,7 miliar. Pendapatan ini diperoleh setelah Perseroan menyewakan sebagian ruang pada menara dan sebagian ruang pada lahan menara kepada beberapa penyelenggara telekomunikasi seluler sejak bulan Maret 2008.

Pendapatan dari layanan sewa sirkit meningkat 17,1% menjadi Rp478,5 miliar pada tahun 2008 dari Rp408,7 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan korporat yang menggunakan layanan sewa sirkit Perseroan.

Pendapatan sewa internet meningkat 8,7% menjadi Rp63,9 miliar pada tahun 2008 dari Rp58,8 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan karena meningkatnya jumlah pelanggan korporat untuk layanan internet.

Pendapatan dari layanan lain-lain meningkat 146,5% menjadi Rp31,8 miliar pada tahun 2008 dari Rp12,9 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari pelanggan korporat untuk layanan VoIP.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan bruto jasa telekomunikasi lainnya Perseroan meningkat 73,6% menjadi Rp480,4 miliar pada tahun 2007 dari Rp276,8 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan korporat untuk layanan sewa sirkit.

Pendapatan dari layanan sewa sirkit Perseroan meningkat 71,2% menjadi Rp408,7 miliar pada tahun 2007 dari Rp238,7 pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan korporat untuk layanan sewa sirkit.

Pendapatan sewa internet Perseroan meningkat 104,2% menjadi Rp58,8 miliar pada tahun 2007 dari Rp28,8 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan korporat untuk layanan internet.

Pendapatan dari layanan lain-lain Perseroan meningkat 38,7% menjadi Rp12,9 miliar pada tahun 2007 dari Rp9,3 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan korporat untuk layanan VoIP.

Pendapatan Usaha Bruto

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pendapatan usaha bruto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp6.254,3 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan usaha bruto Perseroan naik 45,3% menjadi Rp12.156 miliar pada tahun 2008 dari Rp8.364,7 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya MoU seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 67,7%, yaitu dari 15,5 juta pelanggan pada 31 Desember 2007 menjadi 26,0 juta pelanggan pada 31 Desember 2008.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan usaha bruto Perseroan meningkat 29,4% menjadi Rp8.364,7 miliar pada tahun 2007 dari Rp6.466,1 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya MoU seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan sebesar 63,2%, yaitu dari 9,5 juta pelanggan pada 31 Desember 2006 menjadi 15,5 juta pelanggan pada 31 Desember 2007.



Diskon

Diskon yang dicatat oleh Perseroan meliputi diskon atas pendapatan usaha bruto seluler dan diskon atas pendapatan bruto jasa telekomunikasi lainnya.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Diskon untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah berasal dari diskon atas pendapatan usaha bruto seluler sebesar Rp43,7 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Diskon atas pendapatan usaha bruto seluler menurun 74,7% menjadi Rp94,8 miliar pada tahun 2008 dari Rp375,1 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh perubahan strategi dari skema diskon menjadi penurunan tarif, karena lebih efektif untuk menarik pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Diskon atas pendapatan usaha bruto seluler menurun 45,5% menjadi Rp375,1 miliar pada tahun 2007 dari Rp688,1 miliar pada tahun 2006, dikarenakan pada tahun 2006, Perseroan masih memberikan diskon atas *starter pack* yang dijual, namun sejak bulan April 2007, Perseroan tidak mengenakan biaya untuk penjualan *starter pack* kepada pelanggan sehingga berdampak pada besaran diskon yang dicatat.

Pendapatan Usaha Bruto Setelah Dikurangi Diskon

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pendapatan usaha bruto setelah dikurangi diskon Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp6.210,6 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pendapatan usaha bruto setelah dikurangi diskon di tahun 2008 adalah Rp12.061,2 miliar, meningkat sebesar 51,0% dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp7.989,5 miliar. Peningkatan ini terjadi karena hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan usaha bersih Perseroan di tahun 2007 adalah sebesar Rp7.989,5 miliar, meningkat 38,3% dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp5.777,7 miliar. Peningkatan ini terjadi karena hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

B. Beban Usaha

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)
Beban penyusutan	1.798,8	3.335,3	1.705,4	1.508,0
Beban infrastruktur	1.502,6	1.988,6	1.076,7	613,3
Beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi	982,1	2.296,4	1.529,8	1.096,0
Beban penjualan dan pemasaran	493,3	1.374,5	913,8	661,6
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	390,1	722,5	573,9	494,4
Beban perlengkapan dan <i>overhead</i>	274,6	547,7	386,1	358,9
Lain-lain	19,8	43,2	44,0	17,6
Jumlah Beban Usaha	5.461,3	10.308,2	6.229,7	4.749,8

**Beban Penyusutan**

Beban penyusutan meliputi biaya penyusutan atas jaringan dan aset tetap Perseroan lainnya, termasuk biaya instalasi dan biaya konstruksi yang terkait, yang akan disusutkan sepanjang umur ekonomis dari aset tersebut.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban penyusutan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp1.798,8 miliar, yang mencerminkan 32,9% dari jumlah beban usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban penyusutan meningkat 95,6% menjadi Rp3.335,3 miliar pada tahun 2008 dari Rp1.705,4 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan karena penambahan peralatan jaringan dan peralatan non-jaringan serta adanya penyusutan dipercepat atas beberapa MSC Perseroan senilai Rp451 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban penyusutan Perseroan meningkat 13,1% menjadi Rp1.705,4 miliar pada tahun 2007 dari Rp1.508,0 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh pembelian peralatan jaringan dan non-jaringan yang terkompensasi dengan penyesuaian atas perubahan estimasi masa manfaat peralatan jaringan yang diperpanjang dari 8 tahun menjadi 10 tahun.

Beban Infrastruktur

Beban infrastruktur terdiri dari biaya frekuensi jaringan, biaya lisensi jaringan, biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan jaringan, biaya sewa lahan BTS dan biaya utilitas.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban infrastruktur untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp1.502,6 miliar, yang mencerminkan 27,5% dari jumlah beban usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban infrastruktur meningkat 84,7% menjadi Rp1.988,6 miliar pada tahun 2008 dari Rp1.076,7 miliar pada tahun 2007, terutama disebabkan karena meningkatnya biaya frekuensi seiring dengan perluasan jaringan Perseroan, meningkatnya biaya-biaya yang berkaitan dengan sewa lahan untuk BTS dan juga meningkatnya biaya pemeliharaan berkaitan dengan bertambahnya jumlah BTS Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban infrastruktur Perseroan meningkat 75,5% menjadi Rp1.076,7 miliar pada tahun 2007 dari Rp613,3 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh meningkatnya biaya frekuensi, biaya perbaikan dan pemeliharaan dan biaya utilitas yang berkaitan dengan penambahan jumlah BTS Perseroan.

Beban Interkoneksi dan Jasa Telekomunikasi

Beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi meliputi beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi seluler lain-lain, dan beban jasa telekomunikasi lainnya.

Beban interkoneksi merupakan biaya interkoneksi domestik yang dibayarkan ke operator telekomunikasi lainnya di Indonesia atas penggunaan jaringan mereka oleh pelanggan Perseroan saat melakukan percakapan, dan biaya jelajah *out-bound* yang dibayarkan ke operator telekomunikasi internasional atas penggunaan jaringan mereka oleh pelanggan Perseroan saat melakukan percakapan dan SMS.

Beban jasa telekomunikasi seluler lain-lain terdiri dari biaya sewa atas satelit komunikasi, biaya produksi *starter pack* dan *voucher*, kontribusi USO (*Universal Service Obligation*) dan BHP Telekomunikasi (Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi) ke pemerintah. Kontribusi USO dihitung berdasarkan 0,75% dari jumlah pendapatan usaha bruto Perseroan dikurangi biaya interkoneksi dan piutang tak tertagih. BHP



Telekomunikasi dihitung berdasarkan 1,0% dari jumlah pendapatan usaha bruto Perseroan dikurangi biaya interkoneksi dan piutang tak tertagih.

Beban jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari biaya layanan sewa sirkit, internet, dan layanan non-GSM lainnya.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp982,1 miliar, yang mencerminkan 18,0% dari jumlah beban usaha. Beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi terdiri dari beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi seluler lain-lain, dan beban jasa telekomunikasi lainnya sebesar masing-masing Rp626,4 miliar, Rp285,3 miliar dan Rp70,4 miliar atau sebesar 63,8%, 29,0%, dan 7,2% dari jumlah beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban interkoneksi meningkat 38,8% menjadi Rp1.555,3 miliar pada tahun 2008 dari Rp1.120,3 miliar pada tahun 2007, khususnya disebabkan oleh meningkatnya panggilan ke pelanggan operator telekomunikasi lain dan kenaikan jumlah pelanggan Perseroan.

Beban jasa telekomunikasi seluler lain-lain meningkat 77,4% menjadi Rp601,1 miliar pada tahun 2008 dari Rp338,9 miliar pada tahun 2007, disebabkan karena meningkatnya jumlah penjualan *starter pack*, dan juga meningkatnya BHP & USO yang seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban jasa telekomunikasi lainnya meningkat 98,3% menjadi Rp140,0 miliar pada tahun 2008 dari Rp70,6 miliar pada tahun 2007, disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan korporat yang menggunakan layanan sewa sirkit Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban interkoneksi Perseroan meningkat 31,4% menjadi Rp1.120,3 miliar pada tahun 2007 dari Rp852,8 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan panggilan untuk panggilan ke operator lain dan kenaikan jumlah pelanggan Perseroan.

Beban jasa telekomunikasi seluler lain-lain Perseroan meningkat 60,5% menjadi Rp338,9 miliar pada tahun 2007 dari Rp211,2 miliar pada tahun 2006, disebabkan oleh meningkatnya jumlah *starter pack* yang terjual kepada pelanggan.

Beban jasa telekomunikasi lainnya meningkat 120,6% menjadi Rp70,6 miliar pada tahun 2007 dari Rp32,0 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan korporat atas layanan sewa sirkit dan juga jumlah sirkit yang disewa.

Beban Penjualan dan Pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran terdiri dari beban komisi yang dibayarkan untuk penjualan *voucher* isi ulang dan penjualan *starter pack* dan beban iklan.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban penjualan dan pemasaran untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp493,3 miliar, yang mencerminkan 9,0% dari jumlah beban usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban penjualan dan pemasaran meningkat 50,4% menjadi Rp1.374,5 miliar pada tahun 2008 dari Rp913,8 miliar pada tahun 2007, disebabkan karena meningkatnya beban promosi dan iklan berkaitan dengan strategi harga baru serta meningkatnya komisi penjualan seiring dengan kenaikan pendapatan usaha bruto Perseroan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan meningkat 38,1% menjadi Rp913,8 miliar pada tahun 2007 dari Rp661,6 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh kegiatan periklanan dan promosi dalam hubungannya dengan program rebranding dan adanya peningkatan komisi penjualan yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha bruto Perseroan.

Beban Gaji dan Kesejahteraan Karyawan

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan terdiri dari biaya gaji, bonus, tunjangan kesehatan dan rumah sakit, dan kontribusi Perseroan untuk dana pensiun iuran pasti dan Jamsostek, serta penyesuaian untuk imbalan kerja. Sejak bulan April 2002 Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Program ini disediakan untuk semua karyawan tetap yang berumur dibawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini di bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7% berasal dari Perseroan dan 3% berasal dari karyawan. Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari Dana Pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Sesuai dengan UU 13/2003, Perseroan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum mencukupi untuk menutupi kewajiban sesuai UU 13/2003. Penyesuaian imbalan kerja, dihitung berdasarkan kewajiban imbalan kerja, dengan membandingkan mana yang lebih tinggi antara Kesepakatan Kerja Bersama dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan aktuaris independen, PT Watson Wyatt Purbajaga untuk tahun 2006 dan PT Mercer Indonesia untuk tahun 2007 dan 2008 dan periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2009 dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp390,1 miliar, yang mencerminkan 7,2% dari jumlah beban usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat 25,9% menjadi Rp722,5 miliar pada tahun 2008 dari Rp573,9 miliar pada tahun 2007, disebabkan oleh penyesuaian gaji tahunan, pencatatan bonus dan pesangon yang terkompensasi dengan menurunnya jumlah karyawan dari 2.136 pada 31 Desember 2007 menjadi 2.097 pada 31 Desember 2008.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan Perseroan meningkat 16,1% menjadi Rp573,9 miliar pada tahun 2007 dari Rp494,4 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh penyesuaian gaji tahunan dan peningkatan jumlah karyawan dari 2.042 pada 31 Desember 2006 menjadi 2.136 pada 31 Desember 2007.

Beban Perlengkapan dan Overhead

Beban perlengkapan dan overhead termasuk biaya sewa kantor, biaya utilitas dan listrik, alat tulis kantor, asuransi, perjalanan dan komunikasi Perseroan, piutang tak tertagih dan biaya profesional termasuk biaya untuk pengacara, akuntan dan jasa profesional lainnya.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban perlengkapan dan overhead untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp274,6 miliar, yang mencerminkan 5,0% dari jumlah beban usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban perlengkapan dan overhead meningkat 41,9% menjadi Rp547,7 miliar pada tahun 2008 dari Rp386,1 miliar pada tahun 2007, disebabkan karena meningkatnya beban jasa profesional berkaitan dengan penerapan strategi harga baru dan kenaikan biaya sewa kantor.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban perlengkapan dan *overhead* meningkat 7,6% menjadi Rp386,1 miliar pada tahun 2007 dari Rp358,9 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh peningkatan biaya jasa profesional berkaitan dengan penerapan strategi harga baru dan kenaikan biaya utilitas dan listrik.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain terdiri dari biaya amortisasi atas *upfront fee* untuk lisensi 3G dan beban tangguhan lainnya.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Beban lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp19,8 miliar, yang mencerminkan 0,4% dari jumlah beban usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban lain-lain menurun 1,8% menjadi Rp43,2 miliar pada tahun 2008 dari Rp44,0 miliar pada tahun 2007, disebabkan karena berakhirnya pencatatan biaya amortisasi atas instalasi *fiber optic cables* di Desember 2007.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban lain-lain meningkat 150,0% menjadi Rp44,0 miliar pada tahun 2007 dari Rp17,6 miliar pada tahun 2006, khususnya disebabkan oleh pencatatan amortisasi *upfront fee* untuk lisensi 3G selama 12 bulan di tahun 2007 dan hanya 4 bulan di tahun 2006.

C. Laba

Berikut ini adalah Laba Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Laba Usaha	749,3	1.753,0	1.759,8	1.027,9
Penghasilan/ (Beban) Lain-lain	224,2	(1.828,2)	(1.241,7)	(25,5)
Laba/ (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	973,5	(75,2)	518,1	1.002,4
(Beban) / Manfaat Penghasilan	(267,1)	60,1	(267,3)	(350,5)
Laba/ (Rugi) Bersih	706,4	(15,1)	250,8	651,9

Laba Usaha

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp749,3 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba usaha adalah Rp1.753,0 miliar di tahun 2008, menurun 0,4% dibandingkan laba usaha tahun 2007 sebesar Rp1.759,8 miliar karena alasan-alasan tersebut di atas.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Laba usaha adalah Rp1.759,8 miliar di tahun 2007, meningkat 71,2% dibandingkan laba usaha tahun 2006 sebesar Rp1.027,9 miliar karena alasan-alasan tersebut di atas.

Penghasilan / (Beban) Lain-lain

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Penghasilan lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp224,2 miliar, yang terdiri dari beban bunga, pendapatan bunga, laba selisih kurs-bersih, keuntungan dari transaksi sewa pembiayaan dan pendapatan lain-lain sebesar masing-masing Rp713,6 miliar, Rp27,2 miliar, Rp425,1 miliar, Rp463,9 miliar dan Rp21,6 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Beban lain-lain meningkat 47,2% menjadi Rp1.828,2 miliar pada tahun 2008 dari Rp1.241,8 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Biaya bunga meningkat 61,6% menjadi Rp1.122,3 miliar pada tahun 2008 dari Rp694,4 miliar pada tahun 2007, terutama dikarenakan diperolehnya hutang baru dalam Rupiah dan USD, walaupun terjadi penebusan seluruh obligasi USD 350 juta dan penebusan parsial obligasi USD 250 juta senilai USD 122,3 juta dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.
- Kenaikan kerugian valuta asing karena melemahnya Rupiah terhadap Dolar AS, yang sebagian dikompensasikan dengan kenaikan nilai piutang derivatif akibat "mark to market". Kurs penutupan Rupiah per Dolar AS pada 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp10.950/USD dan Rp9.419/USD, sedangkan kurs penutupan pada 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp9.419/USD dan Rp9.020/USD.
- Biaya lain-lain naik 2% menjadi Rp401,4 miliar pada tahun 2008 dari Rp393,7 miliar pada tahun 2007. Biaya lain-lain di 2008 terdiri dari: provisi untuk penalti dalam kartel SMS sebesar Rp25 miliar, pajak dan penalti untuk PPN atas program bonus pulsa pada 2006 and 2007 sebesar Rp110,1 miliar, biaya penerbitan dan diskon obligasi untuk menebus obligasi USD 350 juta sebesar Rp13,2 miliar di Januari 2008, biaya premi tender parsial dan *consent solicitation* dari obligasi USD 250 juta yang ditebus pada bulan Juni 2008 masing-masing sebesar Rp11,3 miliar dan Rp20,9 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban lain-lain Perseroan meningkat 4.769,4% menjadi Rp1.241,7 miliar pada tahun 2007 dari Rp25,5 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- Beban bunga yang lebih tinggi 66,8% menjadi Rp694,4 miliar pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp416,2, yang disebabkan oleh beberapa pinjaman baru di tahun 2007.
- Kerugian selisih kurs akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, pada tahun 2007 terjadi rugi selisih kurs sebesar Rp204,4 miliar sementara pada tahun 2006 terjadi laba selisih kurs sebesar Rp344,8 miliar. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah Rp9.419/USD dan Rp9.020/USD.
- Beban lain-lain juga meningkat 6.807,0% menjadi Rp393,7 miliar pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp5,7 miliar oleh karena pencatatan pajak penghasilan atas bunga dari obligasi Dolar AS untuk periode 2004-2007 sebesar Rp368 miliar.

Manfaat / (Beban) Pajak Penghasilan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, Perseroan mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp267,1 miliar.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008 Perseroan mencatat manfaat pajak penghasilan sebesar Rp60,1 miliar, sementara pada tahun 2007 Perseroan mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp267,3 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Beban pajak penghasilan menurun 23,7% menjadi Rp267,3 miliar pada tahun 2007 dari Rp350,5 miliar pada tahun 2006. Perubahan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan.

Laba / (Rugi) Bersih

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009

Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp706,4 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp15,1 miliar pada tahun 2008, sedangkan di tahun 2007 Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp250,8 miliar. Hal ini karena faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya di atas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

Pendapatan bersih menurun 61,5% menjadi Rp250,8 miliar pada tahun 2007 dari Rp651,9 miliar pada tahun 2006. Penurunan laba bersih ini karena faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya di atas.

D. Aset

Komposisi Aset Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	971,5	1.170,2	805,8	587,2
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	384,9	903,8	308,4	204,3
Piutang lain-lain	19,9	34,8	2,1	3,8
Persediaan	34,6	127,6	59,0	35,4
Pajak dibayar dimuka	720,0	754,9	283,9	185,5
Uang muka dan biaya dibayar dimuka lain-lain	643,5	378,3	219,9	167,1
Piutang derivatif	88,2	333,3	-	-
Aset lain-lain	46,9	16,7	0,2	0,1
Jumlah Aset Lancar	2.909,5	3.719,6	1.679,3	1.183,4
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	24.211,6	23.179,7	15.810,2	10.462,0
Piutang derivatif	257,5	625,7	125,7	-
Aset lain-lain	1.744,5	1.386,7	1.185,3	991,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.213,6	25.192,1	17.121,2	11.453,2
Jumlah Aset	29.123,1	28.911,7	18.800,5	12.636,6

**Aset Lancar**

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp2.909,5 miliar.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp3.719,6 miliar, naik 121,5% dibandingkan dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp1.679,3 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas, piutang usaha, pajak dibayar dimuka dan piutang derivatif. Kenaikan kas berasal dari arus kas aktivitas pendanaan dan operasi yang melebihi pemanfaatan arus kas untuk investasi. Piutang usaha meningkat sehubungan dengan tagihan atas penyewaan menara telekomunikasi pada akhir tahun 2008. Pajak dibayar dimuka terdiri dari kelebihan bayar pajak penghasilan Perseroan dan pajak pertambahan nilai atas pembelian aset tetap. Piutang derivatif diakui sehubungan dengan perubahan nilai wajar transaksi derivatif.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.679,3 miliar, naik 41,9% dibandingkan dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp1.183,4 miliar. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan kas, piutang usaha, pajak dibayar dimuka serta biaya dibayar dimuka.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp26.213,6 miliar.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp25.192,1 miliar, naik 47,1% dibandingkan dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp17.121,2 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari jumlah penambahan BTS di 2008 yang 50% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007, serta peningkatan piutang derivatif yang disebabkan adanya kontrak SWAP tingkat bunga baru pada tahun 2008.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp17.121,2 miliar, naik 49,5% dibandingkan dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp11.453,2 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan infrastruktur jaringan yang cukup tinggi (peningkatan jumlah BTS sebesar 54%).

Aset

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp29.123,1 miliar.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp28.911,7 miliar, mengalami peningkatan sebesar 53,8% dibandingkan dengan posisi aset pada 31 Desember 2007 sebesar Rp18.800,5 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp18.800,5 miliar, mengalami peningkatan 48,8% dibandingkan dengan posisi aset pada 31 Desember 2006 sebesar Rp12.636,6 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.



E. Kewajiban

Komposisi kewajiban konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Kewajiban Lancar				
Hutang usaha	2.315,1	3.278,9	2.677,7	1.671,5
Hutang pajak	147,3	100,9	96,0	46,2
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar	702,2	428,6	512,0	325,7
Penghasilan tangguhan	770,3	1.110,2	410,4	256,8
Hutang derivatif	72,4	-	-	-
Pinjaman jangka pendek	-	547,5	-	-
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	2.034,2	730,5	40,0	-
Bagian obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	-	-	3.283,4	-
Jumlah Kewajiban Lancar	6.041,5	6.196,6	7.019,5	2.300,2
Kewajiban Tidak Lancar				
Hutang usaha	268,6	296,9	295,8	282,2
Pinjaman jangka panjang	14.112,8	14.563,7	2.526,4	-
Kewajiban pajak tangguhan	819,6	553,6	613,7	347,1
Obligasi jangka panjang	2.752,4	2.879,3	3.814,1	5.345,2
Hutang derivatif	25,2	36,8	-	42,2
Penyisihan imbalan kerja	88,7	76,9	66,2	38,5
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	18.067,3	18.407,2	7.316,2	6.055,2
Jumlah Kewajiban	24.108,8	24.603,8	14.335,7	8.355,4

Kewajiban Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah kewajiban lancar Perseroan pada 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp6.041,5 miliar.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah kewajiban lancar pada 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp6.196,6 miliar, menurun 11,7% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2007 sebesar Rp7.019,5 miliar. Hal ini dikarenakan penurunan pada bagian obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, walaupun terjadi kenaikan pada hutang usaha dan penghasilan tangguhan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah kewajiban lancar pada 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp7.019,5 miliar, meningkat 205,2% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2006 sebesar Rp2.300,2 miliar. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan hutang usaha dan reklasifikasi obligasi USD 350 juta dari kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban lancar karena akan dibayar pada tanggal 25 Januari 2008.

Kewajiban Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan pada 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp18.067,3 miliar.



Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah kewajiban tidak lancar pada 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp18.407,2 miliar, meningkat 151,6% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2007 sebesar Rp7.316,2 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari didapatnya pinjaman baru di 2008 sejumlah USD 424 juta dan Rp8,85 triliun, yang terkompensasi dengan pembelian kembali obligasi USD 350 juta di bulan Januari 2008 dan pembelian kembali sebagian dari obligasi USD 250 juta di bulan Juni 2008.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah kewajiban tidak lancar pada 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp7.316,2 miliar, meningkat 20,8% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2006 sebesar Rp6.055,2 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi sebesar Rp1,5 triliun pada bulan April 2007 dan pinjaman bank di tahun 2007 sebesar USD 230 juta dan Rp400 miliar.

Kewajiban

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah kewajiban Perseroan pada 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp24.108,8 miliar.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

Jumlah kewajiban Perseroan pada 31 Desember 2008 adalah Rp24.603,8 miliar, mengalami peningkatan 71,6% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp14.335,7 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perolehan pinjaman baru di tahun 2008 seperti disebutkan di atas.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah Kewajiban Perseroan pada 31 Desember 2007 adalah Rp14.335,7 miliar, mengalami peningkatan 71,6% dibandingkan posisi pada 31 Desember 2006 sebesar Rp8.355,4 miliar. Hal ini terutama karena penerbitan obligasi Rp1,5 triliun di bulan April 2007 dan juga penambahan pinjaman bank.

F. Ekuitas

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Ekuitas				
Modal saham – modal dasar	709,0	709,0	709,0	709,0
Tambahan modal disetor	2.691,7	2.691,7	2.691,7	2.691,7
Saldo laba	1.613,6	907,2	1.064,1	880,5
Jumlah Ekuitas	5.014,3	4.307,9	4.464,8	4.281,2

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2009

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2009 adalah Rp5.014,3 miliar.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2007

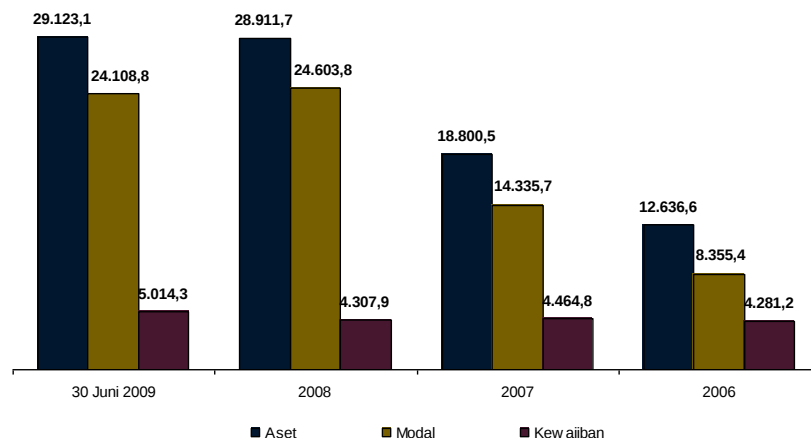
Jumlah Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2008 adalah Rp4.307,9 miliar, mengalami penurunan 3,5% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu sebesar Rp4.464,8 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen untuk kinerja tahun 2007 yang dilakukan di tahun 2008.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2007 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2006

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2007 adalah Rp4.464,8 miliar, mengalami peningkatan 4,3% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2006 yaitu sebesar Rp4.281,2 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba bersih yang dihasilkan di tahun 2007.



Pertumbuhan Aset, Modal dan Kewajiban



G. Aset dan Kewajiban Moneter dalam Mata Uang Asing

Per tanggal 30 Juni 2009, aset moneter dalam mata uang asing Perseroan mencapai Rp665,8 miliar yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan aset lain-lain dalam Dolar AS. Kewajiban moneter dalam mata uang asing Perseroan mencapai Rp11.326,4 miliar yang terutama terdiri dari pinjaman jangka panjang, obligasi jangka panjang dan hutang usaha dalam Dolar AS. Perincian dari aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

		30 Juni 2009	
Keterangan		Mata Uang Asing (dalam ribuan)	Setara dengan miliar Rupiah
Aset			
Kas dan setara kas	USD	7.293,4	74,6
Piutang usaha	USD	8.419,6	86,1
Aset lain-lain	USD	49.403,0	505,1
Jumlah Aset			665,8
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	157.914,8	1.614,7
	EUR	783,6	11,3
	SGD	110,9	0,8
	CHF	39,9	0,4
Hutang lain-lain	USD	7.982,7	81,6
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – nominal	USD	160.583,6	1.641,9
Pinjaman jangka panjang – nominal	USD	655.948,3	6.707,1
Obligasi jangka panjang – nominal	USD	124.067,0	1.268,6
Jumlah Kewajiban			11.326,4
Kewajiban Bersih			10.660,6

H. Likuiditas dan Solvabilitas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar pada suatu tanggal tertentu. Berikut adalah tabel tingkat likuiditas Perseroan:



Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Aset lancar	2.909,5	3.719,6	1.679,3	1.183,4
Kewajiban lancar	6.041,5	6.196,6	7.019,5	2.300,2
Rasio Likuiditas	48,2%	60,0%	23,9%	51,4%

Karena hampir seluruh penjualan Perseroan dilakukan secara tunai, maka Perseroan hanya memiliki nilai piutang usaha yang kecil. Perseroan juga tidak memiliki persediaan yang tinggi karena sifat bisnisnya adalah memberikan jasa penyediaan telekomunikasi seluler. Dengan demikian, rasio likuiditas Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan industri lain pada umumnya yang disebabkan karakteristik bisnis Perseroan yang berbeda.

Pada tanggal 31 Desember 2008, rasio likuiditas meningkat dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2007, terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas serta meningkatnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2007, rasio likuiditas menurun dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2006, terutama karena peningkatan yang besar pada hutang usaha dan pencatatan obligasi USD 350 juta sebagai kewajiban lancar karena akan dibayar pada bulan Januari 2008.

Tingkat solvabilitas aset Perseroan mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset. Berikut adalah tabel tingkat solvabilitas aset Perseroan:

Keterangan	30 Juni	tanggal 31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Jumlah kewajiban	24.108,8	24.603,8	14.335,7	8.355,4
Jumlah aset	29.123,1	28.911,7	18.800,5	12.636,6
Solvabilitas Aset	82,8%	85,1%	76,3%	66,1%

Kenaikan solvabilitas aset 2008 dibandingkan dengan solvabilitas aset 2007 sebagian besar disebabkan oleh persentase perolehan pinjaman dan peningkatan jumlah kewajiban Perseroan dalam bentuk hutang usaha lancar dan tidak lancar yang melebihi persentase kenaikan aset.

Solvabilitas aset 2007 juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan solvabilitas aset 2006, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman yang melebihi peningkatan jumlah aset.

I. Arus Kas dan Sumber-sumber Permodalan

Penggunaan dana Perseroan terutama adalah untuk ekspansi jaringan. Sumber likuiditas utama Perseroan merupakan dana yang diperoleh dari kegiatan operasi, obligasi Rupiah maupun Dolar AS dan pinjaman dari bank yang jatuh temponya berkisar antara 3 tahun sampai 7 tahun.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)
Diperoleh dari kegiatan operasi	3.070,3	4.709,5	3.986,1	2.860,6
Digunakan untuk kegiatan investasi	(3.511,5)	(11.514,0)	(7.154,0)	(4.517,9)
Diperoleh dari kegiatan pendanaan	244,2	7.263,2	3.382,9	1.366,8
Kenaikan / (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(197,0)	458,7	215,0	(290,5)

**Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi**

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi meliputi penerimaan dari pelanggan dan operator telekomunikasi lain dikurangi pembayaran kepada pemasok, karyawan, pembayaran pajak, dan pendapatan bunga.

Dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, penerimaan dari pelanggan dan operator lain berjumlah Rp6.389,6 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp3.304,1 miliar. Setelah memasukkan dana yang diperoleh dari pendapatan bunga dan pembayaran pajak penghasilan, jumlah dana yang diperoleh dari kegiatan operasi adalah sebesar Rp3.070,3 miliar.

Pada tahun 2008, penerimaan dari pelanggan dan operator lain berjumlah Rp12.165,6 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp7.270,6 miliar. Setelah memasukkan dana yang diperoleh dari pendapatan bunga dan pembayaran pajak penghasilan, jumlah dana yang diperoleh dari kegiatan operasi adalah sebesar Rp4.709,5 miliar untuk tahun 2008, yang mencerminkan peningkatan pendapatan dari layanan telekomunikasi seluler dan layanan interkoneksi seluler, khususnya peningkatan jumlah pelanggan dan MoU Perseroan.

Pada tahun 2007, penerimaan dari pelanggan dan operator layanan lain berjumlah Rp8.039,0 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp4.063,0 miliar. Setelah memasukkan dana yang diperoleh dari pendapatan bunga dan pembayaran pajak penghasilan, jumlah dana yang diperoleh dari kegiatan usaha sebesar Rp3.986,1 miliar untuk tahun 2007, mencerminkan peningkatan pendapatan dari layanan telekomunikasi seluler dan layanan interkoneksi seluler, khususnya peningkatan jumlah pelanggan dan MoU Perseroan.

Pada tahun 2006, penerimaan dari pelanggan dan operator layanan lain berjumlah Rp5.902,5 miliar dan pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp3.099,8 miliar. Setelah memasukkan dana yang diperoleh dari pendapatan bunga dan pembayaran pajak penghasilan, jumlah dana yang diperoleh dari kegiatan operasi sebesar Rp2.860,6 miliar untuk tahun 2006, mencerminkan peningkatan pendapatan dari layanan telekomunikasi seluler dan layanan interkoneksi seluler, khususnya peningkatan jumlah pelanggan dan MoU Perseroan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi terdiri dari pengeluaran modal untuk pembelian dan pemasangan peralatan jaringan untuk menambah kapasitas dan memperbaiki kualitas jaringan Perseroan.

Arus kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi Perseroan sebesar Rp3.511,5 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, Rp11.514,0 miliar pada tahun 2008, Rp7.154,0 miliar pada tahun 2007 dan Rp4.517,9 miliar pada tahun 2006. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap terkait dengan penambahan BTS.

Dengan menurunnya capex Perseroan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengakibatkan kondisi arus kas Perseroan semakin membaik. Hal ini juga ditunjang dengan semakin meningkatnya EBITDA yang diperoleh Perseroan dari tahun ke tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas yang diperoleh dari operasi Perseroan akan lebih besar daripada arus kas yang digunakan untuk investasi. Dengan semakin meningkatnya EBITDA dan capex yang relatif rendah di tahun-tahun mendatang, Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah hutang Perseroan akan semakin berkurang di masa yang akan datang.

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp244,2 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp7.263,3 miliar, meningkat 114,7% dibandingkan dengan tahun 2007. Khususnya berasal dari tambahan pinjaman bank baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar AS, yang terkompensasi dengan pembelian kembali obligasi USD 350 juta, penawaran tender sebagian atas obligasi USD 250 juta dan pembayaran hutang bank yang jatuh tempo.



Pada tahun 2007 arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan Perseroan adalah sebesar Rp3.382,9 miliar, meningkat 147,5% bila dibandingkan dengan tahun 2006. Hal ini khususnya berasal dari penerbitan obligasi Rupiah senilai Rp1,5 triliun dan perolehan fasilitas kredit baru.

J. Belanja Modal

Perseroan melakukan investasi dalam infrastruktur jaringan selama tahun 2006 sampai dengan saat ini untuk meningkatkan kapasitas jaringan, kualitas layanan seluler, dan jangkauan jaringan. Secara historis, Perseroan mendanai belanja modal dengan arus kas dari kegiatan operasi, fasilitas kredit jangka pendek maupun jangka panjang.

Perseroan akan terus melakukan pembelian barang modal untuk terus mengembangkan kemampuan jaringan Perseroan baik dari segi kualitas maupun kapasitas. Pembelian barang modal ini diperlukan supaya Perseroan dapat tetap kompetitif dalam pasar telekomunikasi Indonesia. Saat ini tarif yang murah bukan lagi merupakan keunggulan kompetitif yang utama bagi operator seluler, karena semua operator seluler telah menawarkan tarif yang kompetitif. Hal-hal lain seperti kualitas jaringan dan layanan pelanggan akan menjadi keunggulan kompetitif bagi para operator seluler. Dengan melakukan pembelian barang modal secara benar, Perseroan dapat menjadikan kualitas jaringan sebagai keunggulan kompetitifnya.

Berikut ini adalah belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2007, dan 2006:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Peralatan jaringan	2.781,1	10.615,6	6.935,0	4.394,1
Mesin dan peralatan.....	51,7	111,5	70,6	41,7
Sistem pendukung	20,9	88,9	52,4	16,7
Tanah, bangunan dan prasarana kantor.....	10,7	16,8	18,4	38,3
Perabot, perlengkapan kantor dan kendaraan	6,9	12,1	11,3	12,3
Jumlah	2.871,3	10.844,9	7.087,7	4.503,1

Perseroan telah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia, dan karenanya Perseroan akan lebih berfokus untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kualitas jaringan untuk mengatasi peningkatan MoU.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp2.871,3 miliar.

K. Perikatan

Pada tanggal 30 Juni 2009, Perseroan mempunyai berbagai perikatan pembelian yang berkaitan dengan ekspansi jaringan dimana Perseroan telah membayar uang muka sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2009	
	Dalam jutaan USD	Setara dengan miliar Rupiah
Perikatan pembelian	99	1.014
Uang muka	(5)	(50)
	94	964

Sumber dana pembelian barang modal yang belum terealisasi adalah dari arus kas internal Perseroan dan fasilitas kredit.



Pada tahun 1999 Perseroan menandatangani perjanjian sewa kantor dalam mata uang Rupiah dengan PT Caraka Citra Sekar Lestari (pihak ketiga) untuk jangka waktu selama 10 tahun. Pada tanggal 23 Maret 2007 Perseroan memperbaharui perjanjian sewa kantor ini yang kemudian berlaku sampai 31 Oktober 2020, dengan jumlah perikatan sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2009
	(Rp miliar)
Terhutang dalam satu tahun	11,1
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	94,3
Terhutang lebih dari lima tahun	116,4
	221,8

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan sebesar 10 tahun selama Perseroan memegang ijin 3G. Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006. Tidak ada sanksi yang akan dikenakan jika Perseroan mengembalikan ijin.

L. Volatilitas Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mata uang fungsional yang digunakan dalam pelaporan pembukuan Perseroan adalah Rupiah, oleh karena itu terdapat risiko atas fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Karena pendapatan utama Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan kewajiban utama Perseroan dalam mata uang Dolar AS, Perseroan rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari pinjaman Perseroan dalam mata uang Dolar AS.

Perseroan melakukan transaksi derivatif lindung nilai untuk melindungi pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing.

Perseroan memiliki kebijakan untuk melindungi 50% pinjaman dalam mata uang asing dengan melakukan transaksi derivatif lindung nilai. Per 30 Juni 2009, Perseroan melindungi 27% pinjaman mata uang asingnya, karena pada kondisi ekonomi saat ini biaya untuk *hedging* cukup tinggi dan tidak dimungkinkan secara komersial.

M. Kebijakan Akuntansi Penting

Seluruh kebijakan akuntansi penting dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian" yang terdapat dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain:

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SELULER

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dari pesaing-pesaing lama dan para pendatang baru di pasar telekomunikasi seluler

Pasar seluler Indonesia saat ini menghadapi persaingan yang ketat. Saat ini Perseroan menghadapi persaingan dengan pesaing lama, seperti Telkomsel dan Indosat, dalam menarik dan mempertahankan pelanggan pada layanan telekomunikasi seluler. Secara khusus, Perseroan menghadapi persaingan yang ketat dengan Telkomsel dimana Telkomsel memiliki jumlah BTS yang lebih banyak daripada Perseroan dan dapat menggandakan jumlah infrastruktur jaringan transmisi dari perusahaan BUMN yang merupakan perusahaan induk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("Telkom"). Perseroan juga menghadapi persaingan dengan pendatang baru maupun pemain lama, yang menyediakan layanan seluler GSM dan layanan seluler CDMA. Sebagai contoh, PT Hutchinson CP Telecommunications ("HCPT") meluncurkan layanan seluler GSM di bulan Maret 2007 dan PT Natrindo Telepon Seluler yang menggunakan merek dagang Axis, meluncurkan layanan seluler 3G pada bulan Oktober 2007. Sebagai tambahan, PT Telkom Tbk dan PT Bakrie Telekom Tbk menawarkan *fixed wireless service* (layanan tetap tanpa kabel) dibawah merek dagang "Flexi" dan merek dagang "ESIA". Teknologi seluler CDMA memerlukan modal yang lebih sedikit dan menawarkan harga yang lebih kompetitif daripada teknologi seluler GSM, dan sebagai hasilnya memiliki *barrier to market entry* yang lebih rendah. Perseroan memperkirakan persaingan di pasar pada seluler dan telekomunikasi tanpa kabel akan meningkat, sehingga dapat memiliki efek yang merugikan terhadap pangsa pasar Perseroan dan hasil dari operasi. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena kompetisi yang ketat

Teknologi baru mungkin akan berdampak negatif terhadap kemampuan kompetitif Perseroan

Industri telekomunikasi seluler dicirikan oleh perubahan yang dinamis dan signifikan di bidang teknologi. Perseroan dapat menghadapi tingkat persaingan yang tinggi yang berasal dari pengembangan teknologi sekarang maupun di masa yang akan datang. Perkembangan di masa yang akan datang atau aplikasi baru atau teknologi alternatif, layanan atau standar dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap bisnis model Perseroan, perkembangan dari produk baru, ketentuan dari layanan tambahan dan penanaman investasi yang sangat besar dari Perseroan. Produk dan layanan baru mungkin memerlukan biaya yang sangat besar untuk dikembangkan dan dapat mengakibatkan munculnya pesaing baru di pasar. Perseroan tidak dapat memprediksi secara akurat bagaimana perkembangan dan perubahan teknologi di masa yang akan datang, atau Perseroan akan mampu menghasilkan teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing pada keadaan yang berubah pada ketentuan yang dapat diterima secara komersial, yang dapat memiliki efek yang negatif pada usaha Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil operasional maupun prospek usaha Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya , pembelian barang modal (*capex*), yang berakibat pada meningkatnya biaya depresiasi.

Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan menghadapi kemungkinan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap beberapa lokasi transmisi BTS yang telah ada

Perkembangan infrastruktur jaringan Perseroan yang termasuk pemasangan BTS pada menara transmisi dan atap memerlukan persetujuan dan perizinan yang diterbitkan dari pejabat yang berwenang. Konsisten dengan praktik umum yang berlaku di Indonesia dan sehubungan dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan tersebut, termasuk izin membangun (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin gangguan pada publik, maka Perseroan membangun dan menyelesaikan pembangunan menara dan instalasi BTS sebelum semua persetujuan dan perizinan yang diperlukan telah didapatkan dari otoritas setempat. Akan tetapi, jika persetujuan dan perizinan tidak diperoleh, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan peringatan agar lokasi transmisi BTS dibongkar dan dipindahkan. Lokasi transmisi BTS tersebut harus direlokasi untuk memelihara kapasitas dan cakupan jaringan Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pejabat yang berwenang tidak akan menutup lokasi transmisi BTS dan memberikan sanksi pada Perseroan terhadap tindakan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menghambat proses kegiatan usaha sehingga memberikan dampak yang sangat negatif bagi kondisi keuangan Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya pendapatan Perseroan karena ditutupnya lokasi transmisi BTS yang disebabkan karena Perseroan tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan.



Perseroan beroperasi pada lingkungan hukum dan perundang-undangan yang dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat mengakibatkan bertambahnya persaingan, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan

Perubahan Undang-undang pada sektor telekomunikasi di Indonesia, yang dicetuskan oleh Pemerintah pada tahun 1999, sampai dengan batas tertentu telah menghasilkan liberalisasi pada industri telekomunikasi, termasuk fasilitasi pendatang baru dan perubahan pada struktur kompetisi dari industri telekomunikasi. Akan tetapi, pada beberapa tahun terakhir, volume dan kompleksitas dari perubahan Undang-undang yang mempengaruhi industri telekomunikasi dan telah menciptakan keadaan perundang-undangan yang tidak pasti. Pada bulan April 2008, peraturan tarif interkoneksi baru telah efektif. Berdasarkan peraturan baru tersebut, Pemerintah memberikan formula yang digunakan untuk menentukan biaya interkoneksi, yang diterapkan untuk semua operator layanan telekomunikasi, dan DJPT bertanggungjawab untuk menyetujui biaya interkoneksi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008, dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009, pendapatan interkoneksi secara berturut-turut adalah sekitar 13,4%, 10,6%, 8,5% dan 7,3% dari pendapatan kotor Perseroan dan pada periode yang sama biaya interkoneksi secara berturut-turut sebesar 8,8%, 9,6%, 9,4%, dan 6,1% dari pendapatan kotor Perseroan. Segala kenaikan pada hutang biaya interkoneksi oleh Perseroan kepada operator telekomunikasi lain, jika tidak ditutup dengan kenaikan biaya interkoneksi yang dibayarkan oleh operator telekomunikasi lain kepada Perseroan akan mengurangi pendapatan bersih Perseroan. Lebih lanjut, penurunan tarif interkoneksi yang dibayarkan oleh operator telekomunikasi lainnya kepada Perseroan apabila tidak ditutup dengan penurunan biaya interkoneksi yang dibayarkan oleh Perseroan kepada operator telekomunikasi lainnya akan juga mengurangi pendapatan bersih Perseroan. Di masa yang akan datang, Pemerintah mungkin akan mengumumkan atau menerapkan perubahan peraturan dimana dapat merugikan kegiatan usaha Perseroan dan izin Perseroan yang dimiliki saat ini. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memenangkan persaingan dengan perusahaan operator telekomunikasi domestik maupun asing, atau perubahan peraturan, amandemen atau penafsiran dari hukum atau peraturan yang berlaku saat ini maupun masa yang akan datang yang akan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah tidak akan merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Hal ini dapat memberikan dampak yang negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunkan pendapatan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup untuk tetap kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia

Penyediaan jasa telekomunikasi seluler adalah bisnis padat modal. Dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan MoU dan tetap kompetitif, Perseroan harus secara kontinu mengembangkan kapasitas jaringan serta memodernisasi teknologi Perseroan yang mencakup investasi modal substansial. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah Rp4.503,1 miliar, Rp7.087,7 miliar, Rp10.844,9 miliar, dan Rp2.871,3 miliar secara berurutan. Belanja modal ini terutama berhubungan dengan penambahan jumlah BTS yang terpasang dan pengembangan infrastruktur transmisi jaringan Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mendanai belanja modal di masa depan tergantung pada kinerja operasional Perseroan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, tingkat suku bunga dan keuangan, persaingan usaha, dan faktor lainnya di luar kendali Perseroan, dan tergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa penambahan pembiayaan melalui hutang atau ekuitas akan tersedia dengan kondisi yang dapat diterima, atau pembiayaan tersebut sama sekali tidak tersedia. Perseroan hanya dapat melakukan penambahan pembiayaan melalui hutang sesuai dengan persyaratan dari perjanjian kredit Perseroan yang telah ada. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan mempunyai sumber daya modal yang cukup untuk mengembangkan atau memperluas kapasitas jaringan atau memodernisasi dan memperbaharui teknologi yang diperlukan untuk tetap kompetitif pada pasar telekomunikasi Indonesia. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber daya modal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah tidak bertumbuhnya pendapatan Perseroan.

Kepadatan jaringan seluler dan ketersediaan spektrum yang terbatas dapat membatasi MoU Perseroan dan pertumbuhan jumlah pelanggan dan akan memaksa Perseroan untuk mengeluarkan lebih banyak beban modal daripada pesaing-pesaing utama Perseroan agar tetap kompetitif

Kapasitas jaringan telekomunikasi seluler Perseroan dibatasi oleh jumlah spektrum yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada Perseroan. Frekuensi yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan izin GSM Perseroan adalah 2 x 7,5 MHz pada frekuensi 907.5 - 915 MHz dan pada frekuensi 952.5 - 960 MHz untuk layanan telekomunikasi seluler GSM 900 dan 2 x 7,5 MHz pada frekuensi 1710 - 1717,5 MHz dan frekuensi 1805 - 1812,5 MHz untuk layanan telekomunikasi seluler GSM 1800. Selain itu, frekuensi yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan izin 3G Perseroan adalah sebesar 2 x 5 MHz pada frekuensi



1945 - 1950 dan frekuensi 2135 - 2140 MHz. Pesaing Utama Perseroan seperti PT Telekomunikasi Seluler ("Telkomsel") dan PT Indosat Tbk. ("Indosat"), masing-masing telah dialokasikan sebesar 2 x 15 MHz untuk jasa telekomunikasi seluler GSM 900 dan 2 x 15 MHz untuk jasa telekomunikasi seluler GSM 1800. Perseroan perlu menempatkan jumlah BTS yang lebih besar untuk memberikan kualitas layanan seluler yang sepadan dengan pesaing utamanya untuk kepadatan lalu lintas panggilan di wilayah yang sama karena Perseroan telah mendapat alokasi spektrum yang jumlahnya lebih kecil dari pesaing utamanya seperti Telkomsel dan Indosat. Oleh karena itu, Perseroan memerlukan penambahan belanja modal untuk kapasitas dan kualitas jaringan yang sama dibandingkan pesaing utamanya dimana Perseroan memerlukan pendanaan tambahan untuk memberikan kualitas layanan seluler yang sepadan dengan kualitas layanan seluler pesaingnya, terutama di wilayah perkotaan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa spektrum yang telah dialokasikan saat ini cukup untuk dapat memberikan kualitas layanan seluler yang sepadan dengan para pesaing, atau Perseroan dapat memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai belanja modal untuk penambahan kapasitas jaringan. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pembelian barang modal (*capex*), yang berakibat pada meningkatnya beban depresiasi

Perseroan dapat terpengaruh dengan pembatasan kepemilikan oleh asing di dalam kegiatan usaha jasa telekomunikasi

Berdasarkan Keputusan Presiden No.77 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.111 tahun 2007 ("Keputusan") yang mengatur (antara lain) industri dan kegiatan usaha dimana kepemilikan asing dilarang, dibatasi atau tergantung kepada pemenuhan kondisi tertentu sebagaimana diatur oleh lembaga Pemerintah yang berwenang (Daftar Negatif). Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang masuk dalam Daftar Negatif, dengan demikian investasi asing dalam industri telekomunikasi di Indonesia terkena pembatasan dan kondisi tertentu. Daftar Negatif diimplementasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"). Pembatasan yang berhubungan dengan industri telekomunikasi tergantung pada jenis kegiatan usaha telekomunikasi yang dijalankan suatu perusahaan. Perbedaan pembatasan diaplikasikan tergantung pada kegiatan usaha yang berhubungan dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Pembatasan pada kepemilikan asing pada perusahaan yang bergerak di bidang jaringan telekomunikasi adalah sebesar 49%-65%, dan pembatasan untuk kepemilikan asing dalam perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa telekomunikasi (termasuk komunikasi data seperti layanan broadband nirkabel) adalah sebesar 49%-95%. Merujuk pada pasal 5 dari Keputusan, pembatasan yang diatur dalam pasal tersebut tidak akan berlaku untuk investasi yang telah disahkan sebelum Keputusan ini dinyatakan efektif. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menkominfo seperti yang diumumkan pada harian koran Bisnis Indonesia tanggal 8 Juli 2008. Dengan demikian, pembatasan yang diatur pada pasal tersebut tidak berlaku untuk investasi yang persetujuannya telah didapat sebelum Keputusan efektif. Perseroan yakin walaupun persentasi kepemilikan asing dalam Perseroan melebihi 49%, pembatasan dalam Daftar Negatif tidak berlaku terhadap Perseroan karena Perseroan merupakan perusahaan publik. Apabila pihak berwenang yang terkait akan mengaplikasikan Daftar Negatif kepada Perseroan walaupun status Perseroan adalah perusahaan publik dan pembatasan aplikasi retroaktif Keputusan, pemegang saham pengendali Perseroan atau pemegang saham asing lainnya diharuskan mengurangi kepemilikan saham mereka dalam Perseroan sehingga dapat menciptakan tekanan terhadap harga perdagangan saham Perseroan sehingga kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya beban bunga karena Perseroan mendapatkan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Jumlah pelanggan Perseroan atau MoU dapat meningkat tanpa peningkatan yang sejalan dengan ARPU, ARPM, pendapatan atau profitabilitas Perseroan walaupun telah membelanjakan sumber daya keuangan yang signifikan untuk memperluas basis pelanggan dan MoU.

Walaupun telah terjadi pembelanjaan sumber daya keuangan yang signifikan untuk memperluas dan meningkatkan basis pelanggan Perseroan, jumlah pelanggan Perseroan telah meningkat tanpa peningkatan yang sebanding pada ARPU Perseroan, dan MoU Perseroan telah meningkat tanpa peningkatan yang sebanding pada ARPM Perseroan. Perluasan cakupan jaringan dan kapasitas jaringan Perseroan memberikan kontribusi terhadap peningkatan dalam jumlah pelanggan Perseroan dari sekitar 9,5 juta pelanggan per 31 Desember 2006 menjadi 15,5 juta, 26,0 juta dan 24,7 juta pelanggan per 31 Desember 2007, 2008, dan 30 Juni 2009. Hal ini juga telah menyebabkan peningkatan pada MoU Perseroan dari sekitar 2,9 miliar menit per 31 Desember 2006 menjadi 6,8 miliar menit, 54,9 miliar menit, dan 41,0 miliar menit per 31 Desember 2007, 2008, dan 30 Juni 2009. Pada periode yang sama, ARPU Perseroan sedikit meningkat dari sekitar Rp46.000 per 31 Desember 2006 menjadi sekitar Rp47.000 per 31 Desember 2007 kemudian menurun menjadi Rp37.000 per 31 Desember 2008 dan menurun menjadi sekitar Rp32.000 per 30 Juni 2009 dan, ARPM Perseroan menurun dari sekitar Rp870 per 31 Desember 2006 menjadi sekitar Rp540, Rp120, dan Rp80 per 31 Desember 2007, 2008, dan 30 Juni 2009. Hal ini dapat memberikan dampak yang negatif bagi tingkat efisiensi Perseroan sehingga akan mempengaruhi keadaan keuangan dan



hasil usaha Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya beban usaha yang tidak diiringi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

Strategi penetapan harga yang ekonomis oleh Perseroan dapat gagal jika perilaku pelanggan berbeda dari ekspektasi model bisnis Perseroan

Perseroan bermaksud melakukan strategi penetapan harga yang ekonomis bagi para pelanggan prabayar untuk meningkatkan MSM sehingga pendapatan Perseroan meningkat. Strategi ini akan berhasil jika penurunan ARPM yang dihasilkan harus melebihi kenaikan MSM yang terjadi. Ada kemungkinan strategi ini tidak menyebabkan kenaikan MSM yang cukup untuk mengimbangi penurunan ARPM atau kenaikan MoU tidak terjadi dalam jangka waktu yang diperkirakan sebelumnya.

Strategi harga yang digunakan oleh Perseroan tersebut mengasumsikan kenaikan ARPM untuk panggilan berdurasi pendek dan dengan menurunnya ARPM pada panggilan berdurasi panjang. Perseroan mengharapkan kenaikan MSM yang diakibatkan dari strategi tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah panggilan oleh pelanggan, termasuk peningkatan porsi panggilan berdurasi pendek yang menghasilkan ARPM yang lebih tinggi. Terdapat kemungkinan jumlah panggilan tidak meningkat atau peningkatan MSM disebabkan oleh panggilan berdurasi panjang yang mana ARPM dapat menurun atau secara signifikan lebih rendah dari harapan Perseroan. Sekalipun MSM meningkat karena strategi harga Perseroan, namun jika kenaikan tersebut tidak cukup untuk menutupi efek yang terjadi akibat harga yang lebih murah apakah karena panggilan yang lebih lama atau sebaliknya, ARPM dapat mengalami penurunan atau lebih rendah dari antisipasi Perseroan.

Selanjutnya, strategi bisnis Perseroan juga ditujukan untuk meningkatkan MoU pada periode non sibuk, yaitu ketika jaringan tidak digunakan secara maksimal. Dengan meningkatnya utilisasi jaringan selama periode non sibuk, diharapkan pendapatan Perseroan dapat meningkat tanpa menambah investasi pada kapasitas jaringan baru. Walaupun demikian, jika peningkatan MSM Perseroan terkonsentrasi saat periode sibuk, Perseroan harus menambah investasi pada kapasitas jaringan untuk melayani permintaan yang meningkat, dimana Perseroan akan membutuhkan pendanaan tambahan. Hal ini dapat memberikan dampak yang negatif bagi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya pendapatan Perseroan.

Perseroan tidak dapat memberi jaminan bahwa Perseroan akan mencapai tingkat profitabilitas yang stabil di masa depan

Perseroan telah berusaha dan berencana untuk mencapai dalam waktu dekat, strategi pertumbuhan untuk mengkapitalisasi ekspansi pasar telekomunikasi nirkabel di Indonesia dan meningkatkan nilai masa depan Perseroan. Walaupun demikian, meskipun terjadi pengeluaran sumber daya keuangan secara signifikan untuk memperluas basis pelanggan dan area cakupan jaringan, Perseroan mungkin tidak berhasil dalam mencapai peningkatan MoU, pendapatan atau profitabilitas, karena:

- Tingkat pertumbuhan pasar telekomunikasi nirkabel di Indonesia,
- Persaingan jasa telekomunikasi seluler,
- Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan MoU Perseroan, untuk menginsentif pelanggan Perseroan untuk meningkatkan jumlah panggilan, dan meningkatkan kapasitas BTS Perseroan sejalan dengan MoU Perseroan yang meningkat,
- Kemampuan Perseroan untuk memperluas basis pelanggan Perseroan MoU, menyediakan jasa-jasa baru untuk memenuhi permintaan para pelanggan dan untuk mengkapitalisasi dari *economies of scale* dari basis pelanggan yang lebih besar dan MoU yang meningkat, dan
- Peraturan-peraturan Pemerintah dan kebijakan harga pesaing Perseroan.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa strategi pertumbuhan Perseroan akan berhasil dan akan mencapai profitabilitas yang stabil di masa depan. Kegagalan strategi pertumbuhan Perseroan dapat mempengaruhi bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek secara material dan merugikan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah tidak bertumbuhnya pendapatan Perseroan.

Pertumbuhan MoU Perseroan tergantung pada peningkatan kapasitas jaringan termasuk jumlah BTS Perseroan

Strategi penetapan harga yang ekonomis oleh Perseroan untuk para pelanggan prabayar ditujukan untuk meningkatkan MoU, dimana akan meningkatkan permintaan atas kapasitas jaringan Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa infrastruktur transmisi jaringan yang dimiliki cukup untuk mengakomodasi peningkatan MoU sesuai dengan strategi harga Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan MoU dibatasi oleh alokasi spektrum dan kapasitas cakupan BTS, terutama pada daerah perkotaan saat periode sibuk dimana tingkat utilisasi jaringan dapat menyebabkan penurunan kualitas panggilan seluler. Demi



meningkatkan MoU, Perseroan perlu meningkatkan alokasi spektrum dan/atau kapasitas cakupan BTS pada area-area tersebut. Disamping itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan, Perseroan dapat menghadapi hambatan dari Pemerintah atau masyarakat sehubungan dengan instalasi BTS tambahan atau infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Walaupun Perseroan mendapatkan izin untuk menginstalasi BTS tambahan, Perseroan masih memerlukan pendanaan tambahan dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam mendapatkan lokasi instalasi BTS tambahan atau terhambat karena pertimbangan biaya yang cukup tinggi. Segala hambatan dalam menginstalasi BTS tambahan dapat menghalangi Perseroan dalam meningkatkan kapasitas jaringan, menurunkan jumlah pelanggan atau MoU, dan mempengaruhi kegiatan usaha serta kondisi keuangan yang dihasilkan dari prospek usaha dan operasional Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah tidak bertumbuhnya pendapatan Perseroan.

Peningkatan yang signifikan terhadap biaya frekuensi dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif

Perseroan diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi berdasarkan jumlah TRU untuk jaringan telekomunikasi GSM dan pada *bandwidth* untuk jaringan telekomunikasi 3G Perseroan. Biaya frekuensi untuk jaringan telekomunikasi GSM Perseroan adalah terhutang dimuka secara tahunan berdasarkan formula yang disusun oleh Pemerintah. Seiring peningkatan jumlah BTS yang dilakukan Perseroan untuk mengakomodasi peningkatan pada jumlah pelanggan atau MoU, biaya frekuensi bagi jaringan telekomunikasi GSM akan meningkat, dengan demikian akan meningkatkan biaya operasi Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah beban infrastruktur Perseroan.

Perseroan wajib memiliki izin dalam pelayanan telekomunikasi seluler, yang mana izin tersebut dapat dibatalkan jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu

Izin yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika mutlak dimiliki Perseroan untuk pengadaan layanan telekomunikasi seluler serta penggunaan spektrum frekuensi yang telah dialokasikan. Dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, Departemen Komunikasi dan Informatika dapat merubah persyaratan izin tersebut. Pelanggaran persyaratan dan kondisi perizinan atau kelalaian mentaati peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan izin tersebut. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena pembatalan izin seluler.

Kegagalan dalam operasi jaringan Perseroan, beberapa sistem kunci, interkoneksi pada jaringan Perseroan atau jaringan dari operator lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan secara negatif

Perseroan sangat bergantung pada operasi jaringan untuk memberikan layanan kepada para pelanggannya. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada akses kepada PSTN untuk terminasi dan originasi panggilan telepon seluler kepada dan dari telepon saluran tetap, dan porsi signifikan dari tarif panggilan jarak jauh internasional dan panggilan seluler dirutekan melalui PSTN. Fasilitas interkoneksi yang terbatas dari PSTN yang tersedia bagi Perseroan telah mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif di masa lalu dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif di masa depan. Karena batasan kapasitas interkoneksi tersebut, pelanggan seluler Perseroan terkadang mengalami kegagalan dalam melakukan panggilan telepon. Perseroan tidak dapat memberi keyakinan bahwa fasilitas interkoneksi tersebut dapat ditingkatkan atau dipertahankan pada tingkat yang sama seperti saat ini. Perseroan juga bergantung pada sistem informasi manajemen yang canggih dan sistem-sistem lainnya, seperti sistem penagihan terintegrasi, untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai tambahan, Perseroan bergantung pada interkoneksi jaringan dari operator telekomunikasi lainnya dan kepada PSTN untuk menyambungkan panggilan dari pelanggan Perseroan kepada pelanggan operator jalur khusus dan operator seluler lainnya, keduanya antara Indonesia dan luar negeri. Jaringan Perseroan, termasuk sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur dan jaringan operator lainnya dimana para pelanggan saling terhubung, rentan terhadap kerusakan atau gangguan dalam operasi dari beragam sumber termasuk gempa bumi, kebakaran, banjir, mati listrik, kerusakan peralatan, ketidaksempurnaan perangkat lunak jaringan, virus, gangguan transmisi kabel atau gangguan lainnya. Segala kegagalan yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan secara Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus menurunnya pendapatan Perseroan karena pelanggan Perseroan tidak dapat melakukan panggilan kepada pelanggan operator lain.



Apabila Perseroan dinyatakan bertanggungjawab untuk kegiatan pengaturan harga yang melanggar hukum oleh KPPU, Perseroan akan memiliki kewajiban yang bisa menyebabkan penurunan pada pendapatan Perseroan dan mempengaruhi kegiatan usaha, reputasi, dan profitabilitas Perseroan

Pada tanggal 1 November 2007, KPPU mengeluarkan keputusan mengenai penyelidikan awal terhadap 8 (delapan) perusahaan telekomunikasi (termasuk Perseroan) berdasarkan tuduhan pengaturan harga SMS dan melanggar pasal 5 dari Peraturan Anti-Monopoli (Peraturan no. 5/1999). Pada tanggal 19 Juni 2008, Perseroan dan 5 (lima) perusahaan telekomunikasi lainnya dinyatakan bertanggungjawab atas pengaturan harga. Perseroan diperintahkan oleh KPPU untuk membayar denda sebesar Rp25 miliar dan merubah tarif SMS Perseroan. Walaupun Perseroan bermaksud untuk melakukan kasasi terhadap keputusan dari KPPU dalam pengadilan di Indonesia, Perseroan rentan terhadap tuntutan *class action* sebagai akibat dari keputusan KPPU. Persyaratan revisi tarif SMS dan *class action* dari pelanggan yang timbul dari keputusan KPPU dapat mengakibatkan Perseroan mengalami penurunan pendapatan dan mempengaruhi kegiatan usaha, reputasi, dan profitabilitas Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya pendapatan Perseroan.

Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan saluran tetap (fixed-line telephone) para pesaing Perseroan

Perseroan bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan saluran tetap (*fixed-line telephone*) para pesaing Perseroan dan infrastruktur yang terkait dalam kesuksesan operasi pada kegiatan usaha Perseroan. Apabila timbul perselisihan yang melibatkan pengaturan interkoneksi tersebut, baik akibat kegagalan mitra untuk melaksanakan kewajiban kontrak atau untuk alasan lain, satu atau lebih dari layanan telekomunikasi Perseroan akan mengalami keterlambatan, terganggu atau dihentikan, kualitas dari layanan telekomunikasi akan berkurang, *churn* rata-rata bulanan akan meningkat atau tarif interkoneksi Perseroan meningkat yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan secara negatif.

Pemerintah telah menetapkan sistem interkoneksi baru pada bulan Februari 2006, yang telah efektif pada tanggal 1 Januari 2007 dan ditujukan untuk menurunkan biaya interkoneksi yang dibayar kepada para "operator dominan" yang memiliki pangsa pasar lebih dari 25% pada saat skema tarif interkoneksi yang berbasis biaya ditetapkan, dimana panggilan yang berakhir pada jaringan operator tertentu akan menerima *fee* interkoneksi berdasarkan formula yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Struktur interkoneksi sebelumnya menguntungkan operator telekomunikasi yang disebabkan oleh tingkat skala ekonomi yang tinggi karena volume panggilan percakapan yang tinggi. Bagaimanapun, seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan dan MoU, peningkatan pada proporsi panggilan keluar yang dilakukan pelanggan Perseroan kepada pelanggan operator telekomunikasi lainnya telah menyebabkan kenaikan yang signifikan atas biaya interkoneksi yang dibayarkan kepada operator telekomunikasi lainnya. Perseroan tidak dapat memberi keyakinan bahwa biaya interkoneksi tidak akan berubah lagi di masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah beban interkoneksi Perseroan.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KONDISI EKONOMI, POLITIK DAN KEAMANAN NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL

Ketidakstabilan sosial dan politik akan berpengaruh terhadap Perseroan

Perubahan pada Pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dapat berdampak langsung terhadap usaha Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh berbagai tindakan yang dapat diambil oleh Pemerintah, termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan harga minyak mentah dan gas alam, harga tarif dasar listrik, reaksi terhadap perang dan tindakan anarkisme serta terorisme, negosiasi ulang atau pembatalan atas konsesi dan kontrak yang tengah berlaku, perubahan kebijakan perpajakan dan investasi, pemberlakuan pembatasan mata uang asing serta reaksi terhadap perkembangan di dunia internasional.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia yang terjadi di masa lalu terbukti tidak dapat diprediksi. Orientasi sistem pemerintahan yang mengarah kepada desentralisasi maupun dekonsentrasi pada prosesnya juga mengalami berbagai kendala kontraproduktif antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, hal ini akan membawa Perseroan kepada kondisi yang dilematis. Meskipun saat ini kondisi sosial dan politik dalam negeri cukup stabil, namun tidak ada kepastian bahwa segala masalah politik dan sosial tersebut di atas tidak akan terulang kembali, dan tidak ada kepastian bahwa perubahan tersebut tidak akan berpengaruh buruk terhadap kondisi Perseroan. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena buruknya kondisi perekonomian yang disebabkan oleh ketidakstabilan sosial dan politik di Indonesia..

***Kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia akan memperburuk stabilitas negara sehingga berdampak pada kegiatan usaha Perseroan***

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di Indonesia telah terjadi beberapa insiden yang mengarah pada kegiatan terorisme dengan peledakan bom yang ditujukan pada fasilitas Pemerintahan, komersial dan sarana publik lainnya yang sering dikunjungi oleh berbagai kalangan baik, warga domestik maupun asing. Di Jakarta target pengeboman fasilitas tersebut terjadi pada gedung Bursa Efek Indonesia, Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Hotel J.W. Marriot, dan kedutaan Besar Australia. Sementara di luar Jakarta, peristiwa yang sama terjadi antara lain di beberapa tempat di Pulau Bali pada tahun 2003 dan tahun 2005.

Insiden bom tersebut diindikasikan terkait dengan jaringan organisasi teroris internasional, dan memungkinkan akan berlanjut pada masa mendatang. Segala upaya antisipatif dan represif dari kepolisian tengah digalakkan agar Negara terhindar dari kesan sarang teroris maupun negara yang menjadi objek kegiatan terorisme. Dampak kejahatan teroris ini menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan keresahan publik sehingga berpengaruh negatif terhadap iklim investasi, menurunkan atau bahkan meniadakan kepercayaan terhadap Pemerintahan Indonesia, dan kondisi perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena buruknya kondisi perekonomian yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia.

Usaha Perseroan sangat bergantung pada sistem penagihan dan pengendalian kredit yang canggih, permasalahan sistem yang terjadi dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan

Sistem penagihan dan pengendalian kredit yang canggih dan kebijakan pencegahan kecurangan yang baik adalah hal yang sangat penting untuk dapat meningkatkan arus pendapatan, dan mencegah kerugian, memonitor biaya dan masalah kredit potensial, mengurangi piutang tak tertagih dan menagih pelanggan Perseroan secara tepat waktu. Setiap kerusakan atau gangguan pada operasi ataupun server, yang akan digunakan untuk sistem penagihan dan pengendalian kredit, dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara negatif. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena permasalahan dalam sistem penagihan dan pengendalian kredit.

Perseroan dapat gagal dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan pada nilai tukar mata uang telah dan dapat terus mempengaruhi hasil operasi dan arus kas Perseroan. Kebanyakan dari kewajiban hutang dan belanja modal Perseroan berbentuk mata uang Dollar Amerika Serikat. Sebagian besar dari pendapatan Perseroan berbentuk mata uang lokal yaitu Rupiah. Perseroan dapat mempunyai tambahan kewajiban hutang dalam bentuk mata uang asing selain Rupiah, termasuk Dollar Amerika Serikat, untuk membiayai pengeluaran modal selanjutnya.

Perseroan saat ini melakukan lindung nilai mata uang asing terutama disebabkan oleh jumlah pendapatan operasi Perseroan yang berbentuk Dollar Amerika Serikat lebih kecil dari jumlah pengeluaran modal dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat, hal ini juga terjadi pada pembayaran pokok pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat lebih kecil dari pada pembayaran bunga. Perseroan tidak dapat memberi keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengelola risiko nilai tukar secara baik di masa yang akan datang atau bahwa usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil dari operasi dan prospek usaha tidak akan memiliki dampak yang merugikan bagi risiko eksposur nilai tukar mata uang asing. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya rugi selisih kurs yang terealisasi yang mengakibatkan semakin rendahnya laba bersih Perseroan.

Bencana alam akan berpengaruh buruk terhadap Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Bencana alam yang terjadi di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia dan prospek bisnis Perseroan.

Walaupun upaya perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi telah diasuransikan ke dalam berbagai polis asuransi kerugian yang meliputi risiko atas bencana alam, kerusakan peralatan telekomunikasi (*property damage*), risiko kehilangan potensi pendapatan (*business interruption*), maupun risiko lainnya yang ditimbulkan atau menimpa pihak ketiga (*third party liability*), Perseroan tidak dapat menjamin bahwa setiap perlindungan tersebut di atas telah mencukupi bagi kelangsungan bisnis Perseroan, karena masih terdapat faktor-faktor risiko lainnya yang sama sekali di luar kendali Perseroan seperti kondisi *force majeure* maupun risiko lain yang bersifat katastrofik. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena adanya bencana alam.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Selain perjanjian fasilitas keuangan dan pembayaran atas fasilitas kredit sebagaimana disebutkan di bawah ini, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian tertanggal 12 November 2009 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

Selain perjanjian fasilitas keuangan dan pembayaran atas fasilitas kredit sebagaimana disebutkan di bawah ini, seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian".

Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Kantor Cabang Jakarta, untuk fasilitas sampai dengan jumlah Rp500 miliar, yang akan jatuh tempo 3 (tiga) tahun setelah tanggal 30 September 2009. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti menjaga kondisi keuangan Perseroan agar rasio hutang terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan mempertahankan dari waktu ke waktu agar Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 12 Oktober 2009, Perseroan menandatangani perjanjian sindikasi fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk., dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai agen fasilitas sebesar Rp1.600 miliar. Pinjaman ini akan jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal 12 Oktober 2009. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti menjaga kondisi keuangan Perseroan agar rasio hutang terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,5 berbanding 1,0 dan mempertahankan dari waktu ke waktu agar Axiata Group Berhad baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Perseroan melakukan pembayaran atas fasilitas kredit dari Standard Chartered Bank sebesar USD 50,000,000.

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan melakukan pembayaran atas fasilitas kredit dari HSBC sebesar USD 25,000,000.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 190, tanggal 26 Juni 1995, dibuat oleh Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan terhadap Pasal 1, 2 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 190") mengenai nama, maksud, tujuan, dan modal dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8741.HT.01.04.TH.95, tanggal 19 Juli 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1550/A.Not/HKM/1995.PN.JAK.SEL, tanggal 7 Agustus 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan No. 8070, tanggal 29 September 1995.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 November 1995 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10, tanggal 20 November 1995, dibuat di hadapan Endang Sugiharti Antariksa, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk susunan permodalan Perseroan, sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi suatu Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 *juncto* Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ("Akta No. 10"). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-15.601 HT.01.04.Th.95, tanggal 30 November 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1373/1995, tanggal 18 Desember 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 1141, tanggal 30 Januari 1996.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 18 Maret 1997 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 2 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ("Akta No. 4"). Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 7 Juni 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 312/RUB.IX.5/VI/1997, tanggal 17 Juni 1997.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 20, tanggal 5 Februari 1999, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("Akta No. 20"). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11478 HT.01.04.TH.99, tanggal 21 Juni 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 252.3/RUB.09.03/III/2000, tanggal 14 Maret 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 2187 tanggal 2 Mei 2000.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 16 April 2002 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 63, tanggal 18 April 2002, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 63"). Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Laporan No. C-06817 HT.01.04.TH.2002, tanggal 23 April 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 540/RUB.09.03/IV/2002, tanggal 30 April 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan No. 562, tanggal 13 Agustus 2002.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 13 Januari 2005 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24, tanggal 4 Februari 2005, yang dibuat dihadapan Mercy Mareta, SH, pengganti Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Komisaris ("Akta No. 24"). Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-12169 HT.01.04.TH.2005,



tanggal 4 Mei 2005, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 759 RUB.09.03/VI/2005, tanggal 30 Juni 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 697, tanggal 26 Juli 2005.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.127, tanggal 19 Juli 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.8, tanggal 2 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan nilai nominal saham Perseroan, perubahan permodalan Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-21974 HT.01.04.TH.2005, tanggal 8 Agustus 2005 didaftarkan di kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 947/RUB.09.03/VIII/2005 dan No. 948/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, Tambahan No. 9425, tanggal 1 September 2005.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.47, tanggal 6 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp566.250.000.000 menjadi Rp709.000.000.000. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-28115 HT.01.04.TH.2005, tanggal 12 Oktober 2005, didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1331/RUB.09.03/X/2005, tanggal 28 Oktober 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103, Tambahan No.1218, tanggal 27 Desember 2005.

Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.229, tanggal 29 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang merubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-83359.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan no. AHU-0106524.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1223/RUB.09.03/VI/2009, tanggal 4 Juni 2009 dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 229 tanggal 29 Juli 2008 masih berlangsung, sesuai dengan keterangan Kantor Notaris Sutjipto, SH dalam suratnya tanggal 15 Mei 2009.

Perseroan memiliki izin-izin sebagai berikut:

- (1). Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 100/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tertanggal 11 Oktober 2006, untuk menyelenggarakan (i) jaringan bergerak seluler sistem GSM900/DCS1800 pada pita frekuensi radio 907,5 – 915 MHz berpasangan dengan 952,5 – 960 MHz dan 1710 – 1717,5 MHz berpasangan dengan 1805 – 1812,5 MHz; (ii) jaringan bergerak seluler sistem IMT-2000/3G pada pita frekuensi radio 1945 – 1950 MHz berpasangan dengan 2135 – 2140 MHz (berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006, Perseroan ditetapkan sebagai salah satu Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2006 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz; dan (iii) jasa teleponi dasar. Izin penyelenggaraan ini menggantikan izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang diberikan kepada Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.158 Tahun 2003 tertanggal 7 Mei 2003, yang sebelumnya telah mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar yang diberikan kepada Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.86/PT.102/MPPT-96 tertanggal 7 Oktober 1996;
- (2). Izin Penyelenggaraan Jasa Internet berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 235/DIRJEN/2000, tanggal 1 Desember 2000, tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet. Namun, izin ini telah diubah sebagian dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi No.114/DIRJEN/2002, tanggal 24 Mei 2002 tentang Perubahan dan Tambahan Izin Penyelenggaraan Jasa Internet atas nama Perseroan dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 197/Dirjen/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- (3). Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 133 Tahun 2009 tanggal 29 April 2009. Izin ini diberikan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup dengan sistem transmisi kabel (*fiber optic*) dan transmisi radio gelombang mikro dengan menggunakan jaringan akses *wireless*, *wireline* dan teknologi lainnya;



- (4). Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 207/Dirjen/2004, tanggal 29 Juni 2004, yang mencakup ITKP tahap pertama dan tahap kedua. Izin ini berlaku untuk jangka waktu tak terbatas, tapi merupakan subyek evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun;
- (5). Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 17/Dirjen/2005 tanggal 16 Februari 2005, untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan 31 Desember 2006 telah dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Obligasi Excelcom II Tahun 2007. Struktur permodalan sejak Penerbitan Obligasi hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tahun 2007

Pada tanggal 29 Mei 2007, terjadi perubahan kepemilikan saham dimana AIF (Indonesia) Limited menjual saham yang dimilikinya kepada Indocel Holding Sdn Bhd sebanyak 523.532.100 lembar saham yang mana meningkatkan persentase kepemilikan saham Indocel Holding Sdn. Bhd. menjadi sebesar 67,02% per 4 Juni 2007.

Pada tanggal 31 Mei 2007, terjadi perubahan kepemilikan saham dimana PT Rajawali Corpora (dahulu PT Telekomindo Primabhakti) menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada Bella Sapphire Ventures Limited sebanyak 1.132.497.500 lembar saham atau setara dengan 15,97%.

Pada tanggal 12 Desember 2007, terjadi perubahan kepemilikan saham dimana Bella Sapphire Ventures Limited menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) International Indonesia Limited sebanyak 1.132.497.500 lembar saham atau setara dengan 15,97%.

Indocel Holding Sdn. Bhd. telah melepas sebagian saham miliknya dalam Perseroan kepada masyarakat pada tanggal 12 Desember 2007 dan 13 Desember 2007, berturut-turut sebanyak 1.100.000 lembar saham dan 950.000 lembar saham, sehingga kepemilikan saham Indocel Holding Sdn Bhd menjadi sebesar 66,99%.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2007 yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, mengenai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 5% atau lebih, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	4.749.383.500	474.938.350.000	66,9871
2. Khazanah Nasional Berhad	1.191.553.500	119.155.350.000	16,8061
3. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).....	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732
4. Masyarakat	16.565.500	1.656.550.000	0,2336
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ..	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000	



Tahun 2008

Pada tanggal 25 April 2008, terjadi perubahan kepemilikan saham dimana Khazanah Nasional Berhad menjual seluruh sahamnya kepada Indocel Holding Sdn Bhd sebanyak 1.191.553.500 lembar saham sehingga kepemilikan saham Indocel Holding Sdn Bhd menjadi sebesar 83,80%.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2008 yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, mengenai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 5% atau lebih, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000.	83,7932
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).....	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732
3. Masyarakat	16.565.500	1.656.550.000	0,2336
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ...	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000	

Tahun 2009

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2009 yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Indocel Holding Sdn Bhd (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	5.940.937.000	594.093.700.000	83,7932
2. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd (Etisalat).....	1.132.497.500	113.249.750.000	15,9732
3. Direksi			
- Willem Lucas Timmermans	512.000	51.200.000	0,0072
- Joy Wahjudi	84.000	8.400.000	0,0012
- Dian Siswarini	24.500	2.450.000	0,0003
4. Masyarakat	15.945.000	1.594.500.000	0,2249
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.090.000.000	709.000.000.000	100,0000
Saham dalam portepel	15.560.000.000	1.556.000.000.000	

3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 jo. 3 dan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur masing-masing dalam Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76, tanggal 19 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	:	Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	:	Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
Komisaris	:	Dato' Yusof Annuar bin Yaacob
Komisaris	:	Gita Irawan Wirjawan ^{*)}
Komisaris (Independen)	:	Peter John Chambers
Komisaris (Independen)	:	Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono
Komisaris (Independen)	:	Elisa Lumbantoruan

Direksi

Presiden Direktur	:	Hasnul Suhaimi
Direktur	:	Joris de Fretes
Direktur	:	Paul Nicanor V. Santiago III
Direktur	:	Joy Wahjudi
Direktur	:	Willem Lucas Timmermans
Direktur	:	Dian Siswarini

Keterangan

*) berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 Oktober 2009, Gita Irawan Wirjawan menyatakan mengundurkan diri sebagai Komisaris terhitung efektif pada RUPS PUT I

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan direksi:

Komisaris

Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor

Presiden Komisaris



Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 68 tahun.

Meraih gelar *Diploma Electrical Engineering* pada tahun 1962 dari Faraday House Engineering College, London dan memperoleh gelar *Master of Science* di bidang *Technological Economics* dari University of Stirling, Skotlandia pada tahun 1975.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Mei 2006. Jabatan beliau sampai dengan saat ini lainnya adalah sebagai *Chairman* dan *Director* di Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, *Chairman* dari Kumpulan Fima Berhad dan Multimedia Development Corporation ("MDec") Sdn Bhd, serta *Co-Chairman* di Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT). Sejak Juli 1999 sampai Juli 2009, beliau pernah menjabat sebagai *Chairman* dan *Director* Telekom Malaysia Berhad & Group.

Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim

Komisaris



Warga Negara Malaysia. Sat ini berusia 50 tahun.

Beliau menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1978 di California State University, AS dengan mendapat gelar *Bachelor of Science in Business Administration* dan *Minor in Mathematics*. Gelar *Master of Business Administration* beliau raih dari Portland State University, Oregon AS pada tahun 1980 dengan spesialisasi pada Metode Kuantitatif.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2008. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *President* dan *Group Chief Executive Officer* Axiata Group Berhad ("Axiata") –d/h TM International Berhad – sejak Maret 2008 dan *Board Member* Axiata serta *Chairman* Celcom (Malaysia) Berhad. Sebelum bergabung dengan Axiata, sejak tahun 1997 beliau bergabung dengan Maxis Communications Berhad dan ditunjuk sebagai *Chief Operating Officer* pada tahun yang sama dan sebagai *Chief Executive Officer (CEO)* pada tahun 1998, selanjutnya pada tahun 2006 mendapat penunjukan sebagai Group CEO. Beliau pensiun dari Maxis Juli 2007 namun tetap menjabat sebagai *Board Member* sampai Februari 2008. Sebelum bergabung dengan Maxis, beliau telah memiliki pengalaman 16 tahun di industri TI dengan menjabat sebagai *Managing Director* dan *CEO Digital Equipment* selama 4 tahun, setelah sebelumnya berkarya di IBM selama 12 tahun.

**Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar***Komisaris*

Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 48 tahun. Mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang Teknik Sipil (dengan *minor in Computer Science*) dari Gonzaga University, AS tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak April 2008. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri telekomunikasi dan sejak tahun 2006 menjabat sebagai *Group Chief Operations Officer* (COO) Etisalat, perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Uni Emirat Arab. Sebelumnya, beliau pernah menjabat berbagai posisi penting dalam Etisalat Group sejak 1986 dan berperan aktif dalam berbagai proyek penting Etisalat Group.

**Dato' Yusof Annuar bin Yaacob***Komisaris*

Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 44 tahun. Meraih kualifikasi profesional *the Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) dari London School of Accountancy pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Mei 2006. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Group Chief Financial Officer* (CFO) Axiata sejak Maret 2008, setelah sebelumnya menjabat sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) Axiata sejak bulan Juni 2005. Beliau juga tercatat sebagai *Board member* dan *Executive Committee* dari Celcom (Malaysia) Berhad dan *Board member* di beberapa anak perusahaan Axiata lainnya, antara lain Dialog Telekom Plc (Sri Lanka), Spice Communications Limited (India) and MobileOne Ltd (Singapore). Selain industri telekomunikasi, beliau juga memiliki pengalaman yang luas di bidang *investment banking* dan *corporate management* dari berbagai perusahaan internasional seperti S.G. Warburg & Co (sekarang UBS Warburg), ING Barings Securities Singapore dan afiliasi Merrill Lynch & Co di Malaysia.

Gita Irawan Wirjawan*Komisaris*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 44 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Texas, AS pada tahun 1988 dan memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari Baylor University, AS pada tahun 1989 dan *Master of Public Administration, Mason Fellow* dari Kennedy School of Government, Harvard University, AS pada tahun 2000. Beliau juga merupakan *Certified Public Accountant* (CPA) dan *Chartered Financial Analyst* (CFA).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada Juli 2008. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Independent Non-Executive Director* dari Axiata serta merupakan Komisaris dari BUMN Pertamina, *Senior Advisor*, Southeast Asia di JP Morgan dan *Co-Chairman* di Ancora Capital. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai *Senior Vice President, International Business Development* pada Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd dan pernah berkarir sebagai bankir senior di Goldman Sachs dan Citibank. Selain itu, aktif dalam bidang layanan publik di Indonesia serta merupakan anggota KADIN, Presiden Komite biodiesel/energi yang dapat diperbaharui.

Peter John Chambers*Komisaris Independen*

Warga Negara Australia. Saat ini berusia 54 tahun.

Memperoleh gelar sarjana dalam bidang bisnis dari Royal Melbourne Institute of Technology di Melbourne Australia pada tahun 1985 dan CPE (Accountant) Australia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Mei 2006 dan diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak April 2008. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Managing Director* dan *Company Director* di Rajawali Corpora sejak tahun 2005. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Keuangan dan Telekomunikasi, beliau pernah menduduki berbagai jabatan di berbagai perusahaan internasional, seperti Sperry New Holland, Coopers and Lybrand, the Australian Telecommunication Consulting Practice, the South East Asian Telecommunication Consulting Practice, LHS Communications, Redfern Broadband Networks dan Affinity Internet. Beliau sempat bergabung dengan Perseroan pada tahun 1996 sebagai *Vice President Director* sebelum akhirnya meninggalkan Perseroan pada tahun 1999 dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Financial Officer*.

Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 68 tahun.

Meraih gelar Insinyur di bidang Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1964 dan memperoleh gelar *Master of Science in Engineering – Mechanical Engineering* (MSEME) dari University of Michigan, AS pada tahun 1966 dan gelar Doktor dalam bidang Teknik dari ITB pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juli 2008. Jabatan beliau lainnya saat ini antara lain adalah Penasehat Senior untuk PT Jababeka Tbk. serta dosen senior pada fakultas Teknik Industri ITB. Pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998 sampai 1999. Selain itu, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Transportasi Darat dari 1984 sampai 1991.

Elisa Lumbantoruan*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Memperoleh gelar Insinyur di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juli 2008. Jabatan beliau lainnya saat ini adalah sebagai *EVP of Corporate Strategy and IT* pada PT Garuda Indonesia dan Komisaris pada PT Gapura Angkasa. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang penjualan, pemasaran, serta teknologi informasi, beliau pernah memegang jabatan penting di berbagai perusahaan ternama, diantaranya Direktur Marketing PT Digital Astra Nusantara dan PT Compaq Computer Indonesia, dan Presiden Direktur PT Hewlett-Packard Indonesia.

**Direksi**

Hasnul Suhaimi
Presiden Direktur



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981 dan gelar *Master of Business Administration* dari the University of Hawaii pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak September 2006. Sebelumnya, pernah menjabat berbagai posisi Direktur di PT Indosat Tbk pada tahun 1997-1998 dan 2002-2006 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama. Selain itu, pernah menduduki jabatan Direktur Utama Indosat Multi Media Mobile (IM3) tahun 2001-2002 dan *Director of Commerce* di PT Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel) tahun 1998-2000.

Joris de Fretes
Direktur, Corporate Services



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun. Meraih gelar kesarjanaan dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak November 2003. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *General Manager of HRD* Perseroan sejak tahun 1999 sampai 2002. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengembangan sumber daya manusia baik di perusahaan lokal maupun multi nasional.

Paul Nicanor V. Santiago III
Direktur, Consumer Marketing



Warga Negara Filipina. Saat ini berusia 44 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang *Business Management* dari University of Ateneo de Manila pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2005. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang pemasaran dan penjualan produk, dan pernah menjabat berbagai posisi eksekutif di berbagai perusahaan di Filipina termasuk beberapa perusahaan *consumer goods* dan perminyakan serta perusahaan telekomunikasi Globe Telecom Inc., sebelum akhirnya bergabung dengan Perseroan.

Joy Wahjudi
Direktur, Commerce



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 38 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* jurusan Manajemen dari California State University, Amerika Serikat pada tahun 1992 dan gelar *Master of Business Administration* dari universitas yang sama pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2006. Sebelumnya, beliau pernah menjabat berbagai posisi senior di Perseroan sejak tahun 1997, terakhir menjabat sebagai VP-Jabodetabek Area. Pernah bergabung dengan PT General Motors dan PT Mobile Seluler Indonesia.



Willem Lucas Timmermans
Direktur, Finance



Warga Negara Belanda. Saat ini berusia 45 tahun. Memperoleh gelar sarjana *Business Economics and Financing* dari University of Groningen, Belanda pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2006. Memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan hubungan investor setelah berkecimpung di bidang ini selama lebih dari 20 tahun. Pernah menjabat sebagai *VP Business Control & Investor Relations* di PT Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel) tahun 2003 sampai dengan November 2006 dan menduduki posisi Direktur Keuangan PT Bakrie Elektronik (Indonesia) dan berbagai posisi strategis di KPN, sebuah perusahaan telekomunikasi di Belanda.

Dian Siswarini
Direktur, Network Services



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun. Meraih gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Elektro pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2007. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri telekomunikasi, terutama di bidang *network* dan *engineering*. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1996 sebagai *Manager Radio Network Design Engineering*, dan jabatan terakhir sebelum diangkat menjadi Direktur adalah sebagai *SVP Network Planning & Development*.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.1.6, tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.

Kompensasi Komisaris Dan Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 Maret 2009 ("Rapat") diputuskan bahwa Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Emiten adalah sebesar Rp19,0 miliar. Sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 besarnya jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing adalah sebesar Rp35,1 miliar, Rp19,7 miliar dan Rp28,8 miliar. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh Komite Audit yaitu:

Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris, antara lain dalam mengevaluasi integritas laporan keuangan dan operasional yang dibuat oleh Direksi, integritas sistem pengendalian internal Perseroan dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam Perseroan yang berindikasi bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Pedoman Kerja Komite Audit, yang menerangkan peran serta tugas mereka dengan memperhatikan seluruh peraturan Bapepam-LK dan BEI.

Sampai dengan saat ini, Komite Audit terdiri dari dua Komisaris Independen yang baru serta dua anggota lagi yang berasal dari luar Perusahaan.



Anggota Komite Audit terdiri dari:

Ketua : Peter J. Chambers
 Anggota : Dr. Djoko Susanto, M.S.A
 Heru Prasetyo
 Elisa Lumbantoruan

Ketua : **Peter J. Chambers**, 54 tahun, warga Negara Australia.

Anggota : **Dr. Djoko Susanto, M.S.A**, 58 tahun.

Warga negara Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Gajah Mada jurusan Ekonomi pada tahun 1979, dan memperoleh gelar M.S dari University of Arkansas jurusan Akuntansi pada tahun 1989 dan mendapatkan gelar Ph.D di Akuntansi dari University of Arkansas pada tahun 1992. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Dekan Sekolah Bisnis di YKPN, Yogyakarta (1983 - 1987) dan (1997 – 2005)
- Direktur Sekolah Bisnis di YKPN, Yogyakarta (1992 - sekarang)
- Staf Pengajar Program Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada dan Jakarta (1994 - sekarang)
- Staf Pengajar Fakultas Ekonomi di Universitas Gajah Mada (1998 - sekarang)
- Staf Pengajar Program Doktor di Universitas Padjajaran (2000 - sekarang)

Anggota : **Heru Prasetyo**, 61 tahun.

Warga negara Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Industri pada tahun 1974 dan memperoleh gelar Master in Business Management dari Asian Institute of Management pada tahun 1978. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Konsultan Manajemen dan Sumber Daya Manusia SGV Utomo (1974 - 1981)
- Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Eksekutif Pengembangan dan Pelatihan Center SGV Utomo/Andersen (1981 - 1990)
- Partner Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Eksekutif Pengembangan dan Pelatihan Center SGV Utomo/Andersen (1984)
- Konsultan Desain dan Pengembangan Proses dan Sistem Informasi Teknologi Andersen Consulting (1987 - 1994)
- Konsultan untuk Integrasi Bisnis Andersen Consulting/Accenture (1994 - 2002)
- Komisaris Independen PT Komatsu Indonesia (2004 - sekarang)
- Anggota Dewan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2004 - sekarang)

Anggota : **Elisa Lumbantoruan**, 49 tahun.

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Memperoleh gelar Insinyur di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1985.

Jabatan beliau lainnya saat ini adalah sebagai *EVP of Corporate Strategy and IT* pada PT Garuda Indonesia dan Komisaris pada PT Gapura Angkasa. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang penjualan, pemasaran, serta teknologi informasi, beliau pernah memegang jabatan penting di berbagai perusahaan ternama, diantaranya Direktur Marketing PT Digital Astra Nusantara dan PT Compaq Computer Indonesia, dan Presiden Direktur PT Hewlett-Packard Indonesia.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan *oversight* terhadap pelaporan keuangan, termasuk internal control dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), proses audit oleh auditor eksternal serta oversight terhadap implementasi GCG.

Fungsi tersebut dilaksanakan dengan cara :

- Melakukan *overview* terhadap objektivitas laporan keuangan bank dan proses pengendalian intern yang terkait, terutama kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas eksternal auditor terutama kesesuaiannya dengan standar audit yang berlaku.
- Memberdayakan fungsi SKAI dalam melaksanakan tugasnya.
- Memberikan masukan yang profesional dan independen yang dapat membantu pengambilan keputusan Dewan Komisaris



Komposisi anggota Komite Audit Perseroan tersebut di atas menyatukan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang luas serta independensi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 dan Peraturan BEJ Nomor I-A.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan pemenuhan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, dimana berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perseroan No. 22/09 tanggal 25 Juni 2009, Perseroan telah menentukan bahwa kepala Divisi *Corporate Secretary* sebagai Sekretaris Perusahaan, sehingga dalam hal ini jabatan Sekretaris Perusahaan dipegang oleh Sutrisman.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara sungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang baik, yang dapat mendorong karyawan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya melalui kompetisi yang sehat serta menyediakan berbagai program pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial.

Sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang handal, maka selain sistem imbal jasa yang kompetitif dan telah memenuhi standar Upah Minimum Regional serta budaya kerja yang kondusif, Perseroan juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan melalui pengadaan berbagai fasilitas seperti:

- Mengikutsertakan karyawan dalam JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
- Program Tunjangan Hari Tua melalui dana pensiun;
- Tunjangan transportasi dan untuk jenjang tertentu tunjangan fasilitas kendaraan;
- Tunjangan pengobatan dan perawatan medis;
- Tunjangan Hari Raya;
- Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan pelatihan, pengembangan karir, peninjauan gaji dan bonus.

Ketentuan-ketentuan tentang syarat kerja, pengupahan, hak dan kewajiban karyawan Perseroan dimuat dalam Peraturan Perseroan, yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.878/PHIJSK/PKKAD/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2009.

Per 30 Juni 2009, Perseroan memiliki 2.047 karyawan tetap, jumlah ini turun sekitar 2,4% dari jumlah karyawan sebanyak 2.097 per 31 Desember 2008. Sebagian besar karyawan berada di bagian *Commerce*, yang mewakili 50,2% dari jumlah karyawan, dan *Network Services* yang mewakili 26,3% dari jumlah karyawan. Komposisi ini mencerminkan strategi Perseroan yang mengutamakan kualitas penyediaan jasa yang didukung oleh peralatan jaringan yang memadai untuk memberikan layanan pelanggan berkelas dunia. Perseroan meyakini bahwa perbandingan karyawan per pelanggan harus dikendalikan untuk memastikan agar pelanggan memperoleh layanan berkualitas tinggi.

Komposisi Jumlah Karyawan

Komposisi karyawan tetap Perseroan menurut jenjang pendidikan, jabatan dan usia adalah sebagai berikut

a. Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
Akademi dan Universitas (S1, S2, dan S3)	1.472	1.491	1.491	1.389
Diploma (D1-D4)	437	453	473	473
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sederajat	138	153	172	180
Jumlah	2.047	2.097	2.136	2.042



b. Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
Vice President / General Manager	72	73	62	57
Manager	444	442	408	326
Penyelia	681	672	628	552
Tenaga Pelaksana/Staf	850	910	1.038	1.107
Jumlah	2.047	2.097	2.136	2.042

c. Menurut Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
18 – 30 Tahun	669	715	550	801
31 – 40 Tahun	1.124	1.132	1.261	1.047
41 – 50 Tahun	227	221	280	172
Lebih dari 50 Tahun	27	29	45	22
Jumlah	2.047	2.097	2.136	2.042

Sedangkan jumlah karyawan kontrak per 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing adalah sebanyak 1.893 orang dan 1.896 orang.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan 6 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga		Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
			Negara	No. IMTA			
1.	Willem Lucas Timmermans	Director of Finance	Belanda	10642/MEN/P/IMTA/2008	6 Januari 2010	2C12JE7754-G	6 Januari 2010
2.	Paul Nicanor V. Santiago	Director of Sales and Marketing	Filipina	05184/MEN/P/IMTA/2008	27 Juni 2010	2C21JE7491-G	27 Juni 2010
3.	Evelyn B. Jimenez	General Manager of Customer Lifecycle Management	Filipina	07706/MEN/B/IMTA/2009	21 Maret 2010	2C11JE 2765-H	21 Maret 2010
4.	Mohammed Ali	Vice President Business Customer and Analytics	Inggris	10778/MEN/P/IMTA/2008	31 Maret 2010	2C11JE4250-H	31 Maret 2010
5.	Azmarin Bin Johari	Head of Internal Audit	Malaysia	09466/MEN/P/IMTA/2009	19 Oktober 2010	2C21JE2327AH	19 Oktober 2010
6.	Muhammad Charles Foo Seang Hock	General Manager Brand and Advertising	Malaysia	06901/MEN/P/IMTA/2009	3 Februari 2010	2C21AF1983-H	3 Februari 2010

Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan telah menerapkan suatu sistem *Competency-Based Human Resources Management* (CBHRM). Sistem ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan setiap keputusan SDM, seperti rekrutmen dan seleksi, pembelajaran dan pengembangan, perencanaan karir dan sebagainya. Setelah dilakukan identifikasi terhadap kompetensi yang diperlukan oleh setiap pekerjaan atau kelompok pekerjaan, setiap karyawan harus mengikuti proses *competency assessment*. Kesenjangan antara kompetensi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan dan kompetensi yang dimiliki seseorang menentukan jenis rencana pengembangan dan mempengaruhi keputusan untuk rotasi pekerjaan serta promosi. Salah satu wujud komitmen untuk mengembangkan karyawan adalah dengan dilakukannya *competency assessment* bagi karyawan dari semua tingkatan dengan menggunakan metode Pusat Penilaian dan metode umpan balik 360 derajat (*360 degree feedback*) dimana peserta dinilai oleh atasan, rekan kerja dan anak buahnya. Hasil penilaian diikuti dengan program pengembangan yang difokuskan pada peningkatan kemampuan pesertanya.



Untuk memastikan bahwa setiap kontribusi karyawan mendapat penghargaan, Perseroan menerapkan sistem Manajemen Kinerja bagi karyawan. Dengan sistem ini, setiap karyawan membuat Rencana Kerja yang kemudian dibicarakan bersama agar dapat membantu pencapaian rencana tersebut. Pada akhir tahun, kinerja karyawan akan dievaluasi. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar pemberian remunerasi dan pengembangan karir karyawan tersebut.

Untuk mendukung unit kerja dalam menyelesaikan masalah strategis dalam bidang Sumber Daya Manusia, seperti penempatan tenaga kerja secara strategis, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, dan sebagainya, Perseroan menempatkan *Human Capital Specialist* sebagai *Human Capital Business Partners* (HCBP) di unit-unit. Para HCBP ini akan membantu dan memfasilitasi penyelesaian masalah sumber daya manusia yang spesifik ada di unit itu. Keberadaan mereka merupakan kepanjangan tangan *Human Capital* di unit dan dengan demikian mempercepat pemecahan masalah yang ada.

Sejalan dengan komitmen di atas, Perseroan juga memiliki program *talent pool* dan *succession planning* yang didasarkan pada filosofi "pengembangan para pemimpin dari dalam Perseroan". Termasuk dalam program ini adalah penentuan atribut/kriteria utama yang diharapkan dari para pemimpin Perseroan, identifikasi terhadap individu yang berpotensi, serta pengembangan bagi individu yang terpilih, untuk mengantisipasi tantangan di masa yang akan datang.

Manajemen SDM

Dengan tujuan menarik dan mempertahankan individu yang berpotensi, Perseroan merancang dan menerapkan suatu strategi untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan yang sifatnya inovatif dan menjanjikan secara finansial. Secara regular Perseroan juga memastikan "ekuitas eksternal" paket kompensasi karyawan, dengan cara berpartisipasi dalam survey kompensasi dalam industri yang sama, TI dan telekomunikasi, yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa konsultan yang dikenal secara internasional.

Perseroan juga melaksanakan Program Penjatahan Saham Karyawan. Saham yang diterima oleh karyawan tetap yang berhak secara cuma-cuma didasarkan pada masa kerja dan level masing-masing. Tujuan dari pembagian saham ini adalah untuk meningkatkan rasa memiliki dan motivasi untuk bekerja semaksimal mungkin dalam memajukan perusahaan yang bukan hanya tempat bekerja tapi juga yang dimiliki sahamnya.

Perseroan merupakan organisasi dengan budaya dinamis, yang mendorong munculnya gagasan-gagasan inovatif dan partisipasi penuh dari karyawan dalam menciptakan lingkungan dengan kerjasama yang kuat. Untuk memastikan lancarnya arus komunikasi dan gagasan-gagasan baru, manajemen telah menerapkan beberapa metode komunikasi, seperti "*skip-level*" *interview*, program bicara terus terang, forum manajer, dan sebagainya. Budaya positif dan komunikasi terbuka ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas Perseroan.

Perseroan memiliki program pensiun bagi semua karyawan tetap yang berusia di bawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini, yaitu bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7% berasal dari Perseroan dan 3% berasal dari karyawan. Selain itu, Perseroan juga ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk semua karyawannya. Dalam program ini, kontribusi Perseroan adalah 4,5% dari gaji pokok bersih setiap karyawan dan karyawan membayar 2% dari gaji pokok bersihnya.

Pembelajaran dan Pengembangan

Untuk memastikan keberhasilan dari strategi yang telah diterapkan, Perseroan menanamkan investasi yang besar dalam program pembelajaran dan pengembangan yang berlandaskan pada kompetensi dan berkelas dunia bagi karyawannya. Perseroan mengalokasikan sekitar 5% dari keseluruhan biaya tenaga kerja untuk program pelatihan dan pengembangan. Program pengembangan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajemen: berfokus pada peningkatan kemampuan para pemimpin struktural, yaitu VP/General Manager, Manajer dan Penyelia, untuk mencapai tujuan Perseroan.
- Pelatihan Teknis: berfokus pada area bisnis utama yaitu jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi. Perseroan juga telah mengembangkan sertifikasi internal di bidang teknik, yang membantu karyawan dalam mengembangkan kompetensi teknis dan juga bermanfaat bagi pengembangan karirnya.
- Pelatihan Penjualan, Pemasaran dan Layanan Pelanggan: berfokus pada penjualan, pemasaran dan area layanan untuk secara terus-menerus melengkapi dan memotivasi para karyawan yang bekerja pada bidang ini.



- Pelatihan Umum: meliputi program pelatihan yang berkaitan dengan upaya untuk membangun budaya perusahaan, peningkatan motivasi untuk berprestasi, ketrampilan komunikasi, dan lain-lain.

Program pembelajaran di atas disampaikan melalui berbagai cara, seperti pelatihan dalam kelas, belajar sambil bekerja, pelatihan dan nasihat, *e-learning*, belajar sendiri, dan sesi berbagi pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyampaian program tersebut tidak hanya berpusat pada konsep atau teori, tetapi lebih penting lagi adalah pada pengalaman praktek. Standar rata-rata waktu yang digunakan untuk pelatihan adalah 12 hari per tahun per karyawan, yang bervariasi dari yang bersifat *in-house* sampai pelatihan di luar negeri. Meskipun demikian, lingkungan yang ada cukup kondusif dan mendukung karyawan untuk belajar sendiri tanpa dibatasi waktu.

Sistem Informasi SDM

HCIS membantu menggabungkan manusia, proses dan teknologi untuk memperluas layanan SDM secara efektif dan efisien. Perseroan telah menerapkan penggunaan portal e-HR yang memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi SDM yang relevan, melakukan sendiri proses administrasi SDM yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengembangan melalui "*one stop office*". Portal ini juga bermanfaat sebagai infrastruktur bagi para karyawan untuk berbagi pengetahuan dan menggunakan *e-learning*. Teknologi sistem informasi ini didukung dengan penggunaan SAP Human Resources Modules. HRD akan selalu berusaha untuk mengembangkan sistem informasi SDM untuk lebih mengefisiensi dan mengefektifkan setiap proses-proses SDM yang ada.

Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)

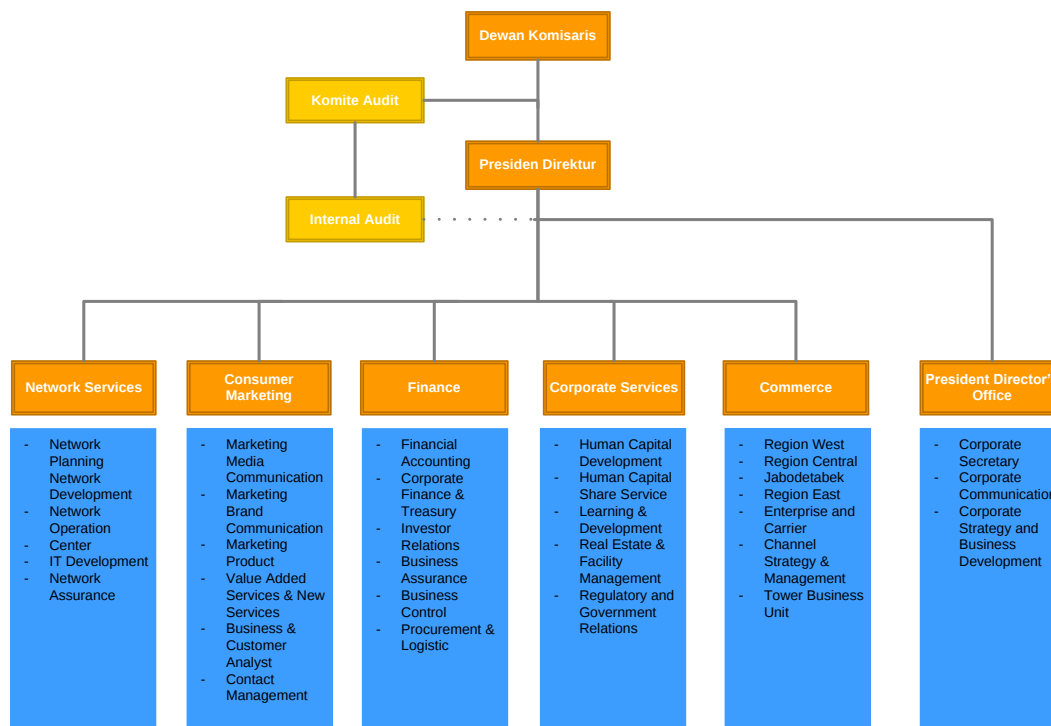
Sejak tahun 2003, Perseroan telah mengembangkan program *knowledge management* di seluruh jajaran organisasi. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menumbuhkan budaya yang dimotori oleh pengetahuan (*knowledge*), untuk menambah cara-cara pengembangan pengetahuan bagi karyawan, serta membantu tumbuhnya budaya berbagai pengetahuan di dalam organisasi.

Beberapa kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan diikuti oleh karyawan dengan antusiasme tinggi, seperti kegiatan *Community of Practice*, di mana karyawan yang baru menyelesaikan pelatihan bisa membagi pengetahuan kepada rekan-rekannya; pembelajaran melalui video, dan lain-lain.

Perseroan juga membuka kesempatan bagi para mahasiswa dari berbagai disiplin untuk melakukan kegiatan magang dalam penyelesaian studi mereka.

Segala upaya pengembangan program *knowledge management* ini ternyata mendapat pengakuan dari dunia luar. Pada tanggal 15 Juli 2008, diwakili oleh Bapak Joris de Fretes, Direktur Human Capital Development, Perseroan menerima penghargaan "Indonesian MAKE (*Most Admired Knowledge Enterprise*) Winner 2007", sebagai juara kedua. Penghargaan ini membuktikan bahwa perhatian, komitmen dan usaha Perseroan dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia mendapat apresiasi dari pihak independen.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Menjadi bangsa yang makmur dan tangguh adalah aspirasi dari setiap warga negara. Perseroan melihat bahwa Indonesia, negara yang kaya akan potensi dan sumber daya, sangat mungkin untuk mencapai hal tersebut. Berawal dari keyakinan itu, dan dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan, Perseroan berkomitmen untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Agar peran Perseroan dapat berjalan dengan efektif dan menciptakan manfaat nyata secara maksimal, Perseroan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara menyeluruh untuk program CSR Perseroan. Bahkan, Perseroan telah mengarahkan program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) nya sebagai bagian yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan rencana perusahaan.

Sebagai perusahaan yang berbisnis di bidang telekomunikasi dan terkait erat dengan teknologi, Perseroan bertujuan untuk merencanakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam bidang tersebut untuk program CSR Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengerti bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, masih terdapat bagian masyarakat yang membutuhkan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Berangkat dari pemahaman ini, Perseroan sejauh ini telah mewujudkan usaha pengembangan pendidikan melalui program CSR, Indonesia Berprestasi, serta secara bersamaan menjalankan program pengembangan masyarakat dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya.

Indonesia Berprestasi

Perseroan secara khusus merancang 'Indonesia Berprestasi' sebagai program CSR yang besar dan menyeluruh. Program ini berakar dari rasa optimis Perseroan terhadap potensi, semangat berinovasi dan antusiasme dari bangsa Indonesia. Program yang telah dimulai sejak tahun 2006 ini, memiliki dua fokus, yaitu pendidikan masyarakat dan pendidikan di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi (ICT). Selama dua tahun terakhir Perseroan telah membuat berbagai program dan kegiatan. Di tahun 2008 Perseroan telah menjalankan aktivitas-aktivitas berikut di bawah payung Indonesia Berprestasi.

- **Indonesia Berprestasi Awards (IBA)**
IBA merupakan penghargaan yang diberikan kepada warga Indonesia, yang melalui bidang keahlian masing-masing, memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap lingkungan dan masyarakat. Program IBA ini dimulai pada tahun 2007, di mana penentuan para pemenangnya melalui berbagai tahapan yang dinilai oleh grup juri independen. Tahapan ini membantu XL dalam menemukan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah secara nyata membuat suatu perubahan untuk bangsa yang lebih tangguh.



- **Komputer untuk Sekolah**
Komputer untuk Sekolah dirancang sebagai rangkaian kegiatan 5 (lima) tahun. Diluncurkan sejak November 2008, melalui program ini Perseroan menyediakan fasilitas komputer dan koneksi internet kepada lebih dari 60 sekolah dan 300 murid setiap tahunnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan training mengenai penggunaan komputer dan internet yang baik serta bahasa Inggris kepada guru-guru. Aktivitas ini juga merupakan usaha Perseroan mewujudkan prinsip-prinsip Indonesia *Global Compact Network* (ICGN), terutama berhubungan dengan Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan.

Perseroan telah mengarahkan program ini sebagai rencana dalam 5 (lima) tahun dan telah berhasil mengajak partisipasi dari tiga rekanan, yaitu PT Sun Microsystems Indonesia, PT Huawei Tech. Investment, and PT Alita Praya Mitra sebagai *supporting members* dari ICGN. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan tiga lembaga swadaya pendukung yaitu: UN Global Compact, The British Council, dan Nurani Dunia Foundation.

Hingga November 2009, semua proses donasi *hardware* dan pelatihan telah selesai dan kini Perseroan sedang mengevaluasi efektifitasnya, sekaligus mempersiapkan implementasi tahun berikutnya.

- **Internet Sehat**
Bekerjasama dengan ICT Watch, sebuah LSM dalam bidang informatika, Perseroan mengkampanyekan Internet Sehat, sebuah program edukasi tentang penggunaan internet yang baik dan benar. Menggunakan alat *booklet* Internet Sehat yang dicetak Perseroan, dilakukanlah berbagai acara sosialisasi ke guru-guru, sekolah, dan lainnya termasuk sekolah dalam program Komputer untuk Sekolah.
- **Beasiswa Khazanah**
Tahun 2009 merupakan kali pertama Perseroan menjalankan program beasiswa. Kolaborasi antara Yayasan Khazanah, CIMB Niaga dan Perseroan membuahkan sebuah program beasiswa, yang berhasil menentukan 4 (empat) orang siswa D3 Indonesia untuk meneruskan jenjang S1 nya di universitas ternama Malaysia. Ribuan orang diseleksi secara ketat dan pemberangkatan akan berjalan di Januari 2010.
- **Taman Pintar**
Perseroan mendirikan Taman Pintar di Yogyakarta, suatu tempat belajar yang membantu anak-anak belajar mengenai telekomunikasi. Per Juli 2009, Perseroan memperbaharui materi pembelajaran tersebut sehingga lebih interaktif dan menarik bagi para pengunjung Taman Pintar, khususnya anak-anak. Sekarang pembelajaran tentang internet, 3G bahkan Blackberry bisa didapatkan dengan interaktifitas yang tinggi.
- **Pembangunan Sekolah, Taman Membaca, dan Perpustakaan**
Perseroan membangun sekolah, taman membaca, dan perpustakaan di beberapa lokasi di Indonesia, serta menyerahkan bantuan berupa alat-alat sekolah.
- **Bantuan Perpustakaan Keliling**
Bersama dengan Yayasan Nurani Dunia, Perseroan menyerahkan bantuan berupa perpustakaan keliling, yang mengunjungi daerah perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Perseroan juga memberikan buku-buku kepada Taman Membaca Jendela Dunia, di Cimanggis, Banten dan Rumah Dunia Gola Gong, Serang, bantuan untuk menumbuhkan minat membaca anak-anak Indonesia.

Pembangunan Masyarakat dan aktivitas CSR lainnya

Perseroan senantiasa melihat kejadian di lingkungan sekitar dan secara aktif terlibat dalam aktivitas sosial dan di dalam masyarakat.

- **Pembangunan Masyarakat**
Perseroan memandang masyarakat secara menyeluruh, terdiri dari pemangku kepentingan dan mereka yang secara langsung atau tidak terkait dengan usaha Perseroan. Perseroan melakukan berbagai kegiatan di tahun 2008. Sebagai contoh, untuk masyarakat di sekitar daerah operasional atau BTS Perseroan, Perseroan membantu membangun fasilitas, menyediakan layanan kesehatan, dan mendukung kegiatan olah raga serta keagamaan.

Selain itu, Perseroan sangat memperhatikan perkembangan dari mitra bisnis, seperti para retailer dan pihak yang membantu dalam distribusi. Perseroan selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang, dan dapat meningkatkan taraf hidup melalui kemitraan dengan



Perseroan. Sampai saat ini, Perseroan telah memberikan berbagai program training, memberikan bantuan untuk saat-saat khusus, dan menyelenggarakan program untuk mereka.

- **Bantuan untuk Bencana**
Untuk meringankan penderitaan korban bencana alam, Perseroan secara cepat mengambil tindakan ketika terjadi bencana alam di Indonesia. Perseroan telah membuat standar operasi prosedur dalam memberikan bantuan dan memastikan segala upaya dijalankan sebaik mungkin.

Pada tahun 2009, serangkaian gempa bumi terjadi, seperti di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Perseroan dengan kesiapan perangkat dan personel telah membuktikan bahwa Perseroan cepat tanggap memberikan bantuan bagi masyarakat. Terbukti tidak lebih dari 2 jam sejak gempa terjadi, Posko Darurat XL sudah berdiri di Garut, juga di Padang, untuk membantu korban bencana. Bantuan darurat juga diberlakukan selama 2 (dua) minggu dalam pengadaan kebutuhan utama dan telekomunikasi, berlanjut juga ke penggalangan dana melalui SMS Donasi. Perseroan juga tak lupa menggandeng Komunitas Postel, di bawah arahan DitJen Postel Kominfo, untuk bersama-sama dengan para anggota komunitas lainnya, untuk turun langsung memberikan bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan.

- **Kegiatan Sosial**
Dalam melaksanakan aktivitas sosial, Perseroan didukung oleh kompetensi Perseroan di bidang telekomunikasi. Melalui cara ini, Perseroan secara rutin menyediakan fasilitas telepon umum gratis (TUG), koneksi internet, dan fasilitas lainnya. Perseroan juga memberikan bantuan, khususnya untuk anak dengan kebutuhan khusus, masyarakat di daerah terpencil, juga untuk pemberantasan kemiskinan.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, komitmen Perseroan dalam bidang CSR terus meningkat melalui kesempatan-kesempatan untuk terus memperluas jangkauan dan peran Perseroan. Di tahun 2008, Perseroan meningkatkan jangkauan program CSR dengan menjadi anggota aktif Indonesia *Global Compact Network* (ICGN) PBB. Melalui ICGN, Perseroan berkomitmen untuk menjadi agen perubahan dalam mempercepat transformasi ke arah yang lebih baik, dan secara aktif mendukung, memfasilitasi dan mewujudkan sepuluh prinsip-prinsip dasar dari UN Global seperti tertera dalam UN's *Millennium Development Goals* di Indonesia. Komputer untuk Sekolah akhirnya dipilih oleh ICGN menjadi salah satu collaborative program terpilih yang dipresentasikan di pertemuan internasional *Global Compact Network*.

Langkah lain untuk meningkatkan pengaruh dari program CSR adalah dengan mengajak para karyawan untuk berpartisipasi. Partisipasi mereka diwujudkan, antara lain, dengan menjadi sukarelawan dalam kegiatan pendidikan, membantu korban bencana alam, dan donor darah.

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM

a. Indocel Holding Sdn. Bhd. ("Indocel")

Berdasarkan *Corporate Certificate* tanggal 30 September 2009, dikeluarkan oleh Suryani binti Hussein, sebagai *Company Secretary* dari Indocel:

Pendirian

Indocel berkedudukan di Malaysia dan adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1995 menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Indocel yang sebelumnya bernama Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd. ini dimiliki 100% oleh TM International (L) Limited ("TMIL") sejak tanggal 11 Januari 2005.

Kegiatan Usaha

Indocel merupakan perusahaan induk untuk investasi yang 100% dimiliki oleh TM International (L) Limited . Indocel tidak memiliki kegiatan operasi usaha lain kecuali dalam bidang investasi.

Permodalan

Susunan permodalan Indocel adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	RM 100.000
Modal Ditempatkan	:	RM 100.000
Modal Disetor	:	RM 100.000

Modal Dasar terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal RM 1 per saham.



Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Indocel, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal RM 1 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (RM)	
Modal Dasar	100.000	100.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TM International (L) Limited	100.000	100.000	100
Modal Dalam Portepel	-	-	-

Indocel Holding Sdn. Bhd mendapatkan pinjaman dari Axiata Group Bhd. (melalui TMI (L) Ltd.) untuk mendanai penyertaannya pada Perseroan.

Susunan Pengurusan

Susunan pengurusan yang terakhir adalah sebagai berikut:

1. Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
2. Dato' Yusor Annuar bin Yaacob
3. Mdm Suryani binti Hussein

b. Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd ("Etisalat").

Berdasarkan *Certificate of Incorporation* tertanggal 27 November 2007 dan *Articles of Association* serta *Memorandum of Association for an Offshore Company in Jebel Ali Free Zone* Etisalat :

Riwayat Singkat

Etisalat adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Uni Emirat Arab pada tanggal 27 November 2007 dengan nomor pendaftaran 101752, dan berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Etisalat adalah untuk menyediakan dan melakukan investasi di bidang jasa telekomunikasi, media dan peralatan, termasuk jasa penyediaan kontrak dan konsultasi kepada perusahaan dan konsorsium telekomunikasi internasional, dan melakukan investasi saham di perusahaan-perusahaan lain.

Kegiatan usaha

Perusahaan adalah sebuah induk perusahaan yang bertanggung jawab memonitor, mengontrol dan mengawasi anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan selain disebutkan diatas tidak memiliki kegiatan operasi lainnya.

Permodalan

Modal dasar Etisalat adalah sebesar AED100.000 terbagi atas 100 saham dengan nilai nominal AED1.000 per saham. Dari saham-saham tersebut telah ditempatkan sebanyak 100 saham dan disetor penuh sebesar AED100.000 oleh Emirates Telecommunications Corporation – Etisalat.

Susunan Pengurusan

Susunan manajemen Etisalat adalah sebagai berikut:

Chief Executive Officer (CEO): Mohamed Khalfan Ahmed Al Qamzi



8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

Penyertaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Domisili	Persentase Kepemilikan saat ini (%)	Status
Excel Phoneloan 818 BV	Jasa Manajemen Keuangan	1997	Belanda	100	Tidak Aktif
Excelcomindo Finance Company BV	Jasa Manajemen Keuangan	2003	Belanda	100	Aktif
GSM One (L) Limited	Jasa Manajemen Keuangan	1996	Malaysia	100	Tidak Aktif
GSM Two (L) Limited	Jasa Manajemen Keuangan	1997	Malaysia	100	Tidak Aktif

a. Excel Phoneloan 818 BV ("Excel Phoneloan") – 100%

Pendirian

Excel Phoneloan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda dan berkedudukan di Amsterdam. Excel Phoneloan didirikan berdasarkan Akta tertanggal 12 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik van Wilsum, Esq. di Amsterdam, Belanda.

Kegiatan Usaha

Excel Phoneloan bergerak di bidang usaha, antara lain (i) aktif di bidang telekomunikasi; (ii) memberikan jasa layanan di bidang administrasi, teknik, keuangan, ekonomi, dan manajerial untuk perusahaan lain; (iii) membeli, menjual, mengatur, dan menggunakan properti seperti: paten, merek, lisensi, izin dan izin-izin industri lainnya; dan (iv) meminjam atau memberikan pinjaman dana dan bertindak sebagai penjamin. Pada saat ini Excel Phoneloan tidak memiliki kegiatan usaha.

Saat ini tidak ada keterkaitan kegiatan usaha Excel Phoneloan dengan Perseroan, karena Excel Phoneloan sudah tidak aktif.

Permodalan

Modal dasar Excel Phoneloan adalah sebesar NLG 200.000 (Gulden Belanda) terbagi atas 200 saham dengan nilai nominal setiap saham adalah EUR 453,78 (setara dengan NLG 1.000) per saham.

	Nilai Nominal EUR 453,78 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	
Modal Dasar	200	90.756	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama Tbk	40	18.151	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40	18.151	100
Modal Dalam Portepel.....	160	72.605	

Pengurusan

Pengurusan Excel Phoneloan pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur* : PT Excelcomindo Pratama Tbk

* Presiden Direktur Perseroan, atau seorang Direktur Perseroan lainnya, berhak mewakili Perseroan sebagai Managing Director Excel Phoneloan 818 BV.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan (Rp juta)	1 tahun (Rp juta)	1 tahun (Rp juta)	1 tahun (Rp juta)
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Beban Usaha.....	-	(2,2)	(168,2)	(2,4)
Laba / (Rugi) Bersih	(943,8)	1.687,5	240,4	(1.109,4)



	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Jumlah Aset	14.089,5	14.916,1	13.101,6	20.384,4
Jumlah Kewajiban	778,9	661,7	534,7	8.057,9
Jumlah Ekuitas	13.310,6	14.254,4	12.566,9	12.326,5

Beban usaha Excel Phoneloan mengalami peningkatan sebesar 6908,3% dari Rp2,4 juta pada tahun 2006 menjadi Rp168,2 juta pada tahun 2007 yang disebabkan oleh biaya jasa konsultasi pajak yang terjadi di tahun 2007. Beban usaha Excel Phoneloan mengalami penurunan sebesar 98,7% dari Rp168,2 juta pada tahun 2007 menjadi Rp2,2 juta pada tahun 2008 yang disebabkan oleh biaya jasa konsultasi pajak yang terjadi di tahun 2007.

Laba bersih Excel Phoneloan mengalami peningkatan sebesar 121,7% dari negatif Rp1.109,4 juta pada tahun 2006 menjadi Rp240,4 juta pada tahun 2007. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh penurunan kurs Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Laba bersih Excel Phoneloan mengalami peningkatan sebesar 602,0% dari Rp240,4 juta pada tahun 2007 menjadi Rp1.687,5 juta pada tahun 2008. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh penurunan kurs Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 31 Desember 2007, jumlah aset Excel Phoneloan sebesar Rp13.101,6 juta mengalami penurunan sebesar 35,7% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp20.384,4 juta. Seiring dengan penurunan aset tersebut, jumlah kewajiban Excel Phoneloan pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp534,7 juta juga mengalami penurunan sebesar 93,4% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp8.057,9 juta yang disebabkan oleh adanya *offset* piutang perusahaan induk & piutang pajak dengan hutang perusahaan induk dan hutang pajak.

b. Excelcomindo Finance Company BV ("Excelcomindo Finance")– 100%

Pendirian

Excelcomindo Finance didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda dan berkedudukan di Amsterdam. Excelcomindo Finance didirikan berdasarkan Akta tertanggal 23 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Gerard Cornelis van Eck di Amsterdam, Belanda.

Kegiatan Usaha

Excelcomindo Finance bergerak di bidang usaha, antara lain (i) berpartisipasi, mendirikan, mengelola, mengawasi atau membiayai usaha dan perusahaan; (ii) meminjam, meminjamkan dan memberikan dana dan membuat perjanjian sehubungan dengan hal-hal tersebut; (iv) memberikan saran dan jasa kepada usaha dan perusahaan; (v) memberikan jaminan untuk kewajiban usaha dan perusahaan; (vi) memperoleh, memisahkan, mengelola dan mengeksploitasi properti; (vii) memperdagangkan mata uang, surat berharga dan properti secara umum; (viii) mengembangkan dan memperdagangkan hak paten, hak merek, ijin-ijin, keahlian teknis dan hak-hak kekayaan industri lainnya; (ix) melakukan setiap dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan industri, keuangan dan perdagangan; dan (x) melakukan semua hal yang berkaitan atau yang mendukung seluruh hal tersebut di atas

Kegiatan usaha Excelcomindo Finance saat ini adalah sebagai perusahaan yang melakukan setiap dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan industri, keuangan dan perdagangan. Perseroan menerbitkan obligasi USD melalui Excelcomindo Finance.

Permodalan

Modal dasar Excelcomindo Finance adalah sebesar EUR 100.000 (Euro) terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal setiap saham adalah EUR 1 per saham.

	Nilai Nominal EUR 1 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama Tbk	100.000	100.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000	100
Modal Dalam Portepel	100.000	100.000	



Pengurusan

Pengurusan Excelcomindo Finance pada saat Prospektus diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Managing Director A : Willem Lucas Timmermans
Managing Director B : Vreewijk Management B.V.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan (Rp juta)	1 tahun (Rp juta)	1 tahun (Rp juta)	1 tahun (Rp juta)
Pendapatan Usaha	3.882,9	8.754,8	21.909,9	20.627,1
Beban Usaha	(1.346,0)	(1.603,0)	(1.490,2)	(490,7)
Laba / (Rugi) Bersih	(513,3)	(9.584,3)	2.259,4	4.591,0

	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Jumlah Aktiva	1.339.938,5	1.478.695,8	5.850.946,7	5.580.742,6
Jumlah Kewajiban	1.297.415,3	1.435.659,3	5.798.325,9	5.530.381,1
Jumlah Ekuitas	42.523,2	43.036,5	52.620,8	50.361,5

Pendapatan usaha Excelcomindo Finance mengalami penurunan sebesar 60,0% dari Rp21.909,9 juta pada tahun 2007 menjadi Rp8.754,8 juta pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga yang sejalan dengan penurunan hutang ke perusahaan induk pada tahun 2008.

Beban usaha Excelcomindo Finance mengalami peningkatan sebesar 203,7% dari Rp490,7 juta pada tahun 2006 menjadi Rp1.490,2 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional.

Laba bersih Excelcomindo Finance mengalami penurunan sebesar 50,8% dari Rp4.591,0 juta pada tahun 2006 menjadi Rp2.259,4 juta pada tahun 2007. Penurunan laba bersih ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa profesional dan beban pajak. Laba bersih Excelcomindo Finance mengalami penurunan sebesar 524,2% dari Rp2.259,4 juta pada tahun 2007 menjadi negatif Rp9.584,3 juta pada tahun 2008. Penurunan laba bersih ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya biaya amortisasi penerbitan obligasi di tahun 2008.

Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah aset Excelcomindo Finance sebesar Rp1.478.695,8 juta mengalami penurunan sebesar 74,7% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2007 yang tercatat sebesar Rp5.850.946,7 juta yang disebabkan oleh penurunan piutang perusahaan induk dan penurunan piutang bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2008, jumlah kewajiban Excelcomindo Finance sebesar Rp1.435.659,3 juta mengalami penurunan sebesar 75,2% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2007 yang tercatat sebesar Rp5.798.325,9 juta yang disebabkan oleh penurunan hutang obligasi dan hutang bunga obligasi.

c. GSM One (L) Limited ("GSM One") – 100%

Pendirian

GSM One didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia dan berkedudukan di Labuan. GSM One didirikan pada tanggal 17 Desember 1996.

Kegiatan Usaha

GSM One dapat melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: (i) untuk melakukan segala usaha, kecuali usaha yang dilarang oleh Offshore Companies Act 1990 atau peraturan lainnya; (ii) untuk melakukan kegiatan sebagai pemegang investasi atas efek, saham, pinjaman, deposito, instrumen hutang dan bentuk lainnya; (iii) untuk bertindak sebagai perusahaan induk; dan (iv) untuk mendirikan, memasarkan, mengembangkan dan mengelola segala atau sebagian dari kegiatan usaha investor, *capitalist*, *financiers*, *promoters*, *concessionaires*, *general commissions agents*, *arrangers* dan *dealers* atas barang, komoditi dan



produk lainnya dan untuk mengeksekusi segala hal yang berhubungan dengan keuangan, komersial dan transaksi perdagangan baik sebagai principal, agen atau lainnya. Pada saat ini GSM One tidak memiliki kegiatan usaha.

Saat ini tidak ada keterkaitan kegiatan usaha GSM One dengan Perseroan, karena GSM One sudah tidak aktif.

Permodalan

Modal dasar GSM One adalah sebesar USD 18.000, terbagi atas 18.000 saham dengan nominal setiap saham adalah USD 1 per saham.

	Nilai Nominal USD 1 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	
Modal Dasar	18.000	18.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama Tbk*.....	1	1	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100
Modal Dalam Portepel	17.999	17.999	

* melalui nominee Perseroan, Wira International Limited

Pengurusan

Pengurusan GSM One pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Chin Chee Kee
Sekretaris : Noblehouse Corporate Services Ltd

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan (Rp Juta)	1 tahun (Rp Juta)	1 tahun (Rp Juta)	1 tahun (Rp Juta)
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Beban Usaha.....	-	-	-	-
Laba Bersih	(725)	1.531	399	(810)
	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Jumlah Aktiva	10.225	10.950	9.419	9.020
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	10.225	10.950	9.419	9.020

Laba bersih GSM One mengalami peningkatan sebesar 149,3% dari negatif Rp810 juta pada tahun 2006 menjadi Rp399 juta pada tahun 2007. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh penurunan kurs Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Laba bersih GSM One mengalami peningkatan sebesar 283,7% dari Rp399 juta pada tahun 2007 menjadi Rp1.531 juta pada tahun 2008. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan kurs Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

d. GSM Two (L) Limited ("GSM Two") – 100%

Pendirian

GSM Two didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia dan berkedudukan di Labuan. GSM Two didirikan pada tanggal 24 November 1997.

Kegiatan Usaha

GSM Two dapat melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: (i) untuk melakukan segala usaha, kecuali usaha yang dilarang oleh *Offshore Companies Act* 1990 atau peraturan lainnya; (ii) untuk melakukan



kegiatan sebagai pemegang investasi atas efek, saham, pinjaman, deposito, instrumen hutang dan bentuk lainnya; (iii) untuk bertindak sebagai perusahaan induk; dan (iv) untuk mendirikan, memasarkan, mengembangkan dan mengelola segala atau sebagian dari kegiatan usaha investor, *capitalist, financiers, promoters, concessionaires, general commissions agents, arrangers* dan *dealers* atas barang, komoditi dan produk lainnya dan untuk mengeksekusi segala hal yang berhubungan dengan keuangan, komersial dan transaksi perdagangan baik sebagai principal, agen atau lainnya. Pada saat ini GSM Two tidak memiliki kegiatan usaha.

Saat ini tidak ada keterkaitan kegiatan usaha GSM Two dengan Perseroan, karena GSM Two sudah tidak aktif.

Permodalan

Modal dasar GSM Two adalah sebesar USD 14.000 terbagi atas 14.000 saham dengan nominal setiap saham adalah USD 1 per saham.

	Nilai Nominal USD 1 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	
Modal Dasar	14.000	14.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama Tbk*	1	1	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100
Modal Dalam Portepel	13.999	13.999	

* melalui nominee Perseroan, Wira International Limited

Pengurusan

Direktur : Chin Chee Kee
Sekretaris : Noblehouse Corporate Services Ltd

Ikhtisar Data Keuangan Penting

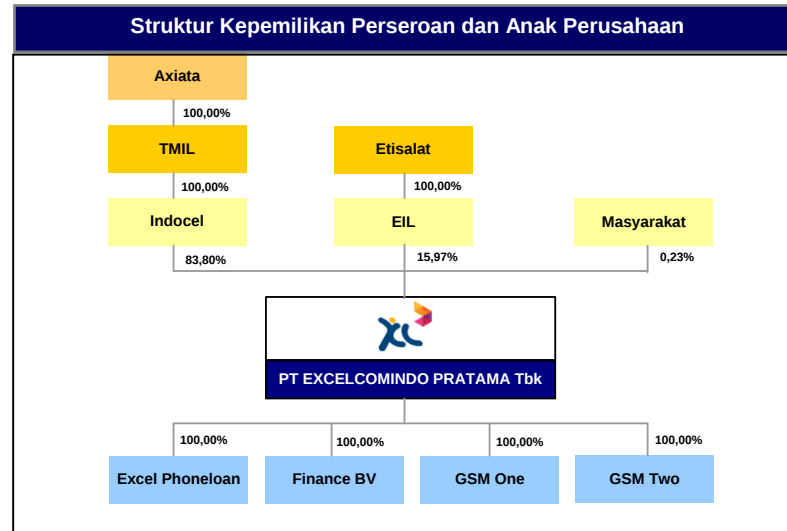
	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Beban Usaha.....	-	-	-	-
Laba Bersih	(725)	1.531	399	(810)

	30 Juni	31 Desember		
	2009	2008	2007	2006
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
Jumlah Aktiva	10.225	10.950	9.419	9.020
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	10.225	10.950	9.419	9.020

Laba bersih GSM Two mengalami peningkatan sebesar 149,3% dari negatif Rp810 juta pada tahun 2006 menjadi Rp399 juta pada tahun 2007. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh penurunan kurs Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Laba bersih GSM Two mengalami peningkatan sebesar 283,7% dari Rp399 juta pada tahun 2007 menjadi Rp1.531 juta pada tahun 2008. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan kurs Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

9. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN, PEMEGANG SAHAM DAN ANAK PERUSAHAAN

Berikut ini kami sajikan hubungan kepemilikan Perseroan, Anak Perusahaan dan pemegang saham berbentuk Badan Hukum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

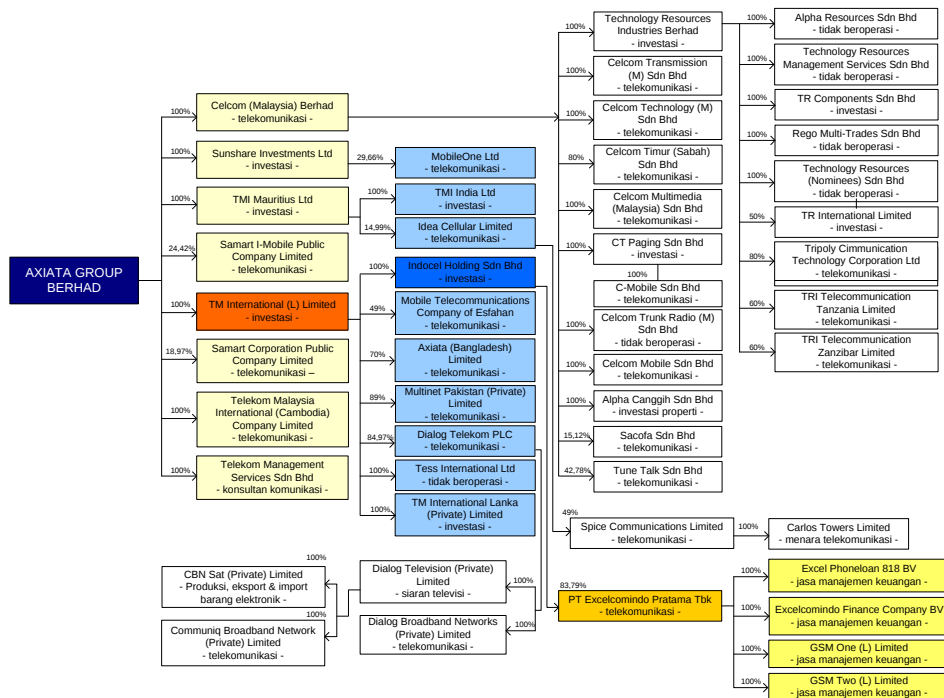


Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Excel Phoneloan | : Excel Phoneloan 818 BV |
| 2. Finance BV | : Excelcom Finance Company BV |
| 3. GSM One | : GSM One (L) Limited |
| 4. GSM Two | : GSM Two (L) Limited |
| 5. Etisalat | : Emirates Telecommunication Corporation |
| 6. Indocel | : Indocel Holding Sdn Bhd |
| 7. TMIL | : TM International (L) Limited |
| 8. Axiata | : Axiata Group Berhad |

* Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan data dari PT Datindo Entrycom per tanggal 30 September 2009.

Berdasarkan bagan di atas, berikut dibawah ini merupakan bagan yang menggambarkan kelompok usaha dari Axiata sebagai *ultimate shareholders* dari Perseroan



Berdasarkan jenjang kepemilikan tertinggi, pemegang saham pengendali dari masing-masing pemegang saham Perseroan adalah:

- Pemegang saham pengendali dari Indocel adalah Pemerintah Malaysia melalui Axiata Group Berhad.



Antara Perseroan dengan pemegang saham utama dan pengendali serta Anak Perusahaan terdapat hubungan kepengurusan dan kepengawasan sebagai berikut:

* *Managing Director Excel Phoneloon adalah PT Excelcomindo Pratama Tbk. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Presiden Direktur atau setiap dua Direktur berhak mewakili Perseroan sebagai Managing Director Excel Phoneloon.*

Nama	Perseroan	Axiata Group Berhad	Indocel Sdn Bhd	Etisalat	Etisalat Int'l Indonesia Limited	Finance B.V.	Excel Phoneloon*	GSM One	GSM Two
Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor	Presiden Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-
Dato' Yusof Annuar bin Yacoob Ahmad	Komisaris	Group Chief Financial Officer (CFO)	Direktur	-	-	-	-	-	-
Abdulkarim Mohd Julfar	Komisaris	-	-	Group Chief Operations Officer (COO)	-	-	-	-	-
Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim	Komisaris	Presiden dan Group Chief Executive Officer (CEO)	Direktur	-	-	-	-	-	-
Gita Irawan Wirjawan	Komisaris	Independent Non-Executive Director	-	-	-	-	-	-	-
Peter John Chambers	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elisa Lumbantoruan	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasnul Suhaimi	Presiden Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Joris de Fretes	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Paul Nicanor V. Santiago III	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Joy Wahjudi	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Willem Lucas Timmermans	Direktur	-	-	-	-	Direktur	-	-	-
Dian Siswarini	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-

10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Beberapa transaksi dan hubungan usaha dengan pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk hubungan dengan Pihak Terafiliasi	Bentuk transaksi	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Per 30 Juni 2009 (dalam jutaan Rupiah)
Telekom Malaysia Bhd.	Entitas sepengendali	Pendapatan ITKP/VoIP, pendapatan sirkuit langganan, beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi lainnya, dan penggantian biaya.	a. Perjanjian Layanan jasa Voice Over Internet Protocol tertanggal 11 Agustus 2005.	a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2005 untuk jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp50.103 - Hutang usaha: Rp11.985 - Pendapatan usaha: Rp61.678 - Beban interkoneksi: Rp4.617
			b. Perjanjian Layanan jasa Voice over Internet Protocol International tertanggal 1 Desember 2007.	b. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007 untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.	- Beban jasa telekomunikasi lainnya: Rp10.477
			c. Perjanjian Jasa Telekomunikasi No. 997.A/XXII.S.4184 /XII/2005 tanggal 15 Desember 2005.	c. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Desember 2005 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak	



Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk hubungan dengan Pihak Terafiliasi	Bentuk transaksi	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Per 30 Juni 2009 (dalam jutaan Rupiah)
				berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	
Telekom Malaysia (Hong Kong) Limited	Entitas sependengali	Pendapatan ITKP/VoIP, pendapatan sirkuit langganan.	a. Perjanjian Berlangganan Produk dan/atau Jasa Telekomunikasi (<i>Leased Circuit</i>) No. 1063.A/4217/XL/IV/ 2006 tanggal 12 Juni 2006.	a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2006 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp72
			b. Perjanjian Jasa Telekomunikasi No. 954.A/XXII.S.4139 /X/2005 tertanggal 12 Oktober 2005, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III tertanggal 19 Januari 2006).	b. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2005 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	
Telekom Malaysia (S) Pte., Ltd.	Entitas sependengali	Pendapatan ITKP/VoIP, beban interkoneksi dan beban jasa telekomunikasi lainnya.	Perjanjian Jasa Telekomunikasi Internasional tertanggal 31 Maret 2005.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2005 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp89 - Hutang usaha: Rp328 - Pendapatan usaha: Rp821 - Beban interkoneksi: Rp1.650
Celcom (Malaysia) Berhad	Entitas sependengali	Pendapatan ITKP/VoIP, pendapatan <i>roaming</i> internasional, beban interkoneksi dan penggantian biaya-biaya.	a. Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 8 Juli 1997. b. Addendum atas Perjanjian Jelajah Internasional tanggal 8 Juni 2005.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juli 1997 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp3.329 - Hutang usaha: Rp5.477 - Pendapatan usaha: Rp14.234 - Beban interkoneksi: Rp15.014
Dialog Telekom Limited (dahulu MTN Networks (Pvt.) Limited)	Entitas sependengali	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 27 Juni 1997.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Juni 1997 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp28 - Pendapatan usaha: Rp80 - Beban interkoneksi: Rp32
Telekom Malaysia International (Cambodia) Co. Ltd. (dahulu Cambodia Samart Communications Co. Ltd.)	Entitas sependengali	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 27 Februari 2001.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2001 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Hutang usaha: Rp26 - Pendapatan usaha: Rp3 - Beban interkoneksi : Rp57
TM International (Bangladesh) Limited	Entitas sependengali	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 18 Oktober 2005.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2005 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah	- Piutang usaha: Rp2 - Pendapatan usaha: Rp2 - Beban interkoneksi:



Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk hubungan dengan Pihak Terafiliasi	Bentuk transaksi	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Per 30 Juni 2009 (dalam jutaan Rupiah)
				satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	Rp6
PT Rajawali Corpora (dahulu PT Telekomindo Primabhakti)	Pemegang saham (sampai dengan Mei 2007), salah satu Direktur PT Rajawali Corpora adalah Komisaris Perseroan	Penggantian biaya-biaya dan sewa gedung.	Perjanjian Sewa tanggal 17 Januari 2000.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1997 untuk jangka waktu 15 tahun.	- Beban sewa: Rp2.309
MobileOne Ltd.	Entitas sependengali	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	a. Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 2 Agustus 1996 sebagaimana diamandemen dengan Addendum tertanggal 23 Agustus 2005. b. Perjanjian Layanan Telekomunikasi tertanggal 25 September 2006.	a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 1996 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini. b. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 September 2006 untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp141 - Hutang usaha: Rp211 - Pendapatan usaha: Rp8.676 - Beban interkoneksi: Rp3.474
Spice Communications Limited	Entitas sependengali	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 10 Januari 2006 sebagaimana diamandemen dengan Addendum 26 Maret 2008.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2006 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp23 - Pendapatan usaha: Rp43 - Beban interkoneksi: Rp71
Axiata Group Berhad (dahulu Telekom Malaysia International Berhad)	Entitas sependengali	Penggantian biaya-biaya.	Transaksi dengan Axiata Group Berhad tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian karena sifatnya insidental.	-	- Piutang lain-lain: Rp62
PT Bank CIMB Niaga, Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk dan Lippo Bank)	Entitas sependengali	Pendapatan sirkuit langganan, kas dan setara kas.	a. Perjanjian Berlangganan Jasa Internet (ISP) No. 032.A/0032/XL-BS/VI/2006 tanggal 25 September 2006, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 15 November 2007. b. Perjanjian Berlangganan Layanan Pesan Singkat atau SMS No. 032.A/0032/XL-BS/VI/2006 tanggal 25 September 2006, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 15 November 2007.	a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini. b. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Kas dan setara kas: Rp26.017 - Piutang usaha: Rp2.644 - Pendapatan usaha: Rp6.585
			c. Perjanjian	c. Perjanjian ini	



Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk hubungan dengan Pihak Terafiliasi	Bentuk transaksi	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Per 30 Juni 2009 (dalam jutaan Rupiah)
			Berlangganan Fasilitas VoIP No. 032.A/0032/XL-BS/VI/2006 tanggal 25 September 2006, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 15 November 2007.	berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	
			d. Perjanjian Kerjasama Operasional sehubungan dengan Pemanfaatan Fasilitas Bank untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan secara Off-line melalui Pendebetan Rekening Kartu Kredit No. 1218.A/XVI.L3.441 6/XL/XII/2006 tanggal 15 Januari 2007.	d. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2006 untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.	
			e. Perjanjian Berlangganan Sewa Sirkuit (leased line) No. 032.A/0032/XL-BS/VI/2006 tanggal 25 September 2006, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 15 November 2007.	e. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	
			f. Perjanjian Berlangganan Jaringan MPLS, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 15 November 2007.	f. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2007 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	
Emirates Telecommunications Corporation	Afiliasi Pemegang Saham	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 23 November 2006.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 November 2006 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Piutang usaha: Rp446 - Pendapatan usaha: Rp1.507 - Beban interkoneksi: Rp563
Etihad Etisalat	Afiliasi Pemegang Saham	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban interkoneksi.	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 26 Oktober 2004.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2005 untuk jangka waktu tidak terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	- Hutang usaha: Rp2 - Pendapatan usaha: Rp766 - Beban interkoneksi: Rp638
Thuraya Satellite Telecommunications Company	Afiliasi Pemegang Saham	Pendapatan <i>roaming</i> internasional dan beban	Perjanjian Jelajah Internasional tertanggal 10 Oktober 2005.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2005 untuk jangka waktu tidak	- Piutang usaha: Rp9 - Pendapatan usaha: Rp11



Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk hubungan dengan Pihak Terafiliasi	Bentuk transaksi	Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Per 30 Juni 2009 (dalam jutaan Rupiah)
		interkoneksi.		terbatas sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini.	
PT VADS Indonesia	Entitas sependali	Beban jasa outsource contact centre, penjualan aset dan penggantian biaya.	a. Perjanjian Contract Management Services tertanggal 3 November 2008 sebagaimana diubah dengan amandemen tanggal 20 April 2009. b. Perjanjian Penjualan Aset tertanggal 10 Juli 2009.	a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2008 untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. b. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2009.	- Piutang lain-lain: Rp16.572 - Hutang usaha: Rp14.174 - Beban jasa: Rp25.619

Seluruh transaksi dengan Pihak Terafiliasi, berdasarkan penilaian manajemen Perseroan, telah dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian pengadaan peralatan jaringan telekomunikasi	Ericsson AB	Pengadaan peralatan telekomunikasi (1 Juli 2007 – 31 Desember 2010).
2.	Perjanjian penyediaan jasa instalasi peralatan jaringan telekomunikasi	PT Ericsson Indonesia	Penyediaan jasa instalasi peralatan jaringan telekomunikasi (1 Juli 2007 – 31 Desember 2010).
3.	Perjanjian penyediaan jasa pemeliharaan peralatan jaringan telekomunikasi	PT Ericsson Indonesia	Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan jaringan telekomunikasi. Berlaku sejak 27 September 2007 dan akan berakhir pada saat berakhirnya pemesanan pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur di perjanjian.
4.	Perjanjian pembelian peralatan jaringan	Nokia Siemens Networks GmbH & Co.KG	Berlaku sejak 28 Oktober 1998 sampai dengan 31 Desember 2009, atau sampai dengan ditandatanganinya (a) equipment supply agreement dengan Nokia Siemens Networks Oy. atau (b) equipment installation agreement dengan PT Nokia Siemens Network, mana yang lebih dulu terjadi.
5.	Perjanjian pemeliharaan jaringan	PT Nokia Siemens Network	Berlaku sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur di perjanjian.
6.	Perjanjian implementasi dan integrasi sistem (Professional Service Agreement)	Amdocs Software Solutions Kft	Jasa yang berkaitan dengan sistem AMDOCS yang sudah terpasang (1 Juli 2005 – 31 Desember 2010).
7.	Perjanjian lisensi dan pemeliharaan software	Amdocs Software Solutions Kft	Lisensi dan jasa pemeliharaan software AMDOCS (1 Januari 2007 – 31 Desember 2011).
8.	Perjanjian penyediaan peralatan 3G	PT Huawei Tech Investment	Berlaku sejak 8 Juni 2006 sampai berakhirnya masa garansi pembelian terakhir. Jangka waktu pembelian berakhir 7 Juni 2011.
9.	Perjanjian instalasi peralatan 3G	PT Huawei Tech Investment	Berlaku sejak 8 Juni 2006 sampai berakhirnya masa garansi pembelian terakhir. Jangka waktu pembelian berakhir 7 Juni 2011.
10.	Perjanjian penyediaan peralatan	PT Huawei Tech Investment	Berlaku sejak 15 September 2008 sampai dengan berakhirnya masa jaminan pembelian terakhir. Jangka waktu pembelian berakhir pada tanggal 3 September 2011.
11.	Perjanjian instalasi peralatan	PT Huawei Tech Investment	Berlaku sejak 4 September 2008 sampai dengan berakhirnya masa jaminan pembelian terakhir. Jangka waktu pembelian berakhir pada tanggal 3 September 2011.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
12.	Perjanjian pemeliharaan peralatan	PT Huawei Tech Investment	Berlaku sejak 1 Januari 2008 dan akan berakhir pada saat berakhirnya pemesanan pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur di perjanjian.
13.	Perjanjian instalasi kabel	NSW Submarine Cable System Sdn. Bhd.	Berlaku sejak 12 April 2004 sampai dengan berakhirnya masa jaminan (5 tahun) setelah tanggal berita acara serah terima.
14.	Perjanjian pembelian peralatan	PT Alita Praya Mitra	Berlaku sejak 1 Januari 2008 – 31 Desember 2010, atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
15.	Perjanjian instalasi peralatan	PT Alita Praya Mitra	Berlaku sejak 1 Januari 2008 – 31 Desember 2010, atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
16.	Perjanjian pemeliharaan peralatan	PT Alita Praya Mitra	Berlaku sejak 1 Januari 2008 dan akan berakhir pada saat berakhirnya pemesanan pembelian terakhir, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur di perjanjian.
17.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan Kabel Serat Optik di Sepanjang Jalur Jalan Kereta Api di Pulau Jawa	PT Kereta Api (Persero) d/h Perusahaan Umum Kereta Api	Berlaku sejak tanggal 20 Desember 1996 dan akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2022.
18.	Perjanjian interkoneksi dan penggunaan bersama fasilitas (sharing of facilities)	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk (Indosat), PT Mobile-8 Telecom, Tbk (Mobile-8), PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), PT Smart Telecom (Smart), PT Bakrie Telecom, Tbk, (BakrieTel), PT Batam Bintan Telekomunikasi, (BBT), PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT)	Dengan Telkomsel dan NTS: berlaku selama 2 tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap 2 tahun berikutnya, berturut-turut terhitung sejak 1 November 2007 dan 19 Desember 2007. Dengan Mobile-8: berlaku terus menerus sejak 17 Desember 2007 (untuk interkoneksi dengan jaringan bergerak seluler Mobile-8) dan sejak 28 Mei 2008 (untuk interkoneksi dengan jaringan tetap lokal Mobile-8). Dengan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap Indosat: berlaku sejak 19 Desember 2007 sampai diakhiri oleh para pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian. Dengan Telkom: berlaku sejak 1 Januari 2008 dan berakhir pada 31 Desember 2009. Dengan operator lainnya: berlaku selama 5 tahun sejak 18 Desember 2007 (dengan Smart), 19 Desember 2007 (dengan BakrieTel, BBT dan STI), 27 Desember 2007 (dengan HCPT) dan 27 Februari 2008 (dengan PSN).
19.	Perjanjian jelajah internasional	Rekanan-rekanan operator di luar negeri sekitar 355 mitra per 30 Juni 2009	Berlaku terus menerus selama tidak ada pengakhiran (pemberitahuan 6 bulan sebelumnya).
20.	Perjanjian sirkuit langganan	PT Mora Telematika Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Nettocyber Indonesia, Telekom Malaysia Berhad, PT Indosat Tbk dan lain-lain.	Berlaku antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan atau tidak terbatas sampai diakhiri oleh para pihak.
21.	Perjanjian Konsorsium Konstruksi dan Pemeliharaan Palapa Ring	PT Bakrie Telecom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Infokom Elektrindo, PT Powertek Utama Internusa dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Berlaku selama 15 tahun sejak tanggal dimana jasa komersial dapat dilaksanakan atas keseluruhan atau sebagian jaringan Palapa Ring.
22.	Perjanjian Pokok Penyewaan Menara	PT Mobile-8 Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Hutchison CP Telecommunications, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Natrindo Telepon Seluler	Dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk., berlaku sejak 12 Agustus 2008, yang akan terus berlaku sepanjang perjanjian sewa menara yang terkait dengan Perjanjian ini tetap berlaku, dan akan berakhir saat tidak ada lagi perjanjian sewa menara yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini. Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., berlaku sejak 4 Februari 2009, yang akan terus berlaku sepanjang perjanjian sewa menara yang terkait dengan Perjanjian ini tetap berlaku, dan akan berakhir saat tidak ada lagi perjanjian sewa menara yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini. Dengan PT Bakrie Telecom Tbk, berlaku sejak 16 Juli 2008, yang akan terus berlaku sepanjang perjanjian sewa menara yang terkait dengan Perjanjian ini tetap berlaku, dan akan berakhir saat tidak ada lagi



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
			perjanjian sewa menara yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini.
			Dengan PT Sampoerna Telekom Indonesia, berlaku sejak 19 Mei 2008, yang akan terus berlaku sepanjang perjanjian sewa menara yang terkait dengan Perjanjian ini tetap berlaku, dan akan berakhir saat tidak ada lagi perjanjian sewa menara yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini.
			Dengan PT Hutchison CP Telecommunications, berlaku sejak 4 April 2008, yang akan terus berlaku sepanjang perjanjian sewa menara yang terkait dengan Perjanjian ini tetap berlaku, dan akan berakhir saat tidak ada lagi perjanjian sewa menara yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini.
			Dengan PT Natrindo Telepon Seluler, berlaku sejak 18 Juli 2008 – 17 Juli 2018, yang akan terus berlaku sepanjang perjanjian sewa menara yang terkait dengan Perjanjian ini tetap berlaku, dan akan berakhir saat tidak ada lagi perjanjian sewa menara yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini.

* Nilai seluruh kontrak perjanjian penting yang telah disampaikan di atas tidak dapat disampaikan karena jumlahnya tergantung dari kebutuhan pembelian Perseroan dimana nilainya dapat berubah.

Dalam menjalankan operasinya, Perseroan senantiasa didukung oleh pemasok-pemasok dan rekanan-rekanannya, antara lain terlihat dari fasilitas pinjaman untuk penyediaan infrastruktur Perseroan yang ditawarkan oleh pemasok-pemasok utama Perseroan.

12. AMDAL

Perseroan telah memperoleh sebagian perijinan lingkungan hidup yang diperlukan untuk kegiatan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada dokumen Amdal, Andal, UKM dan UPL, dan sebagian ijin yang lain masih dalam proses pengurusan.

Berikut adalah dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan pendirian dan/atau pembangunan menara telekomunikasi Perseroan:

No	Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Yang Mengeluarkan	Alamat BTS
1.	Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") Site 3755-Andalas	669/41/Kep/B/X/04	14 Oktober 2004	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Makasar	Andalas
2.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 3735E-Tonasa Bungoro	660.1/81/DLHK	10 Mei 2003	Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kelurahan Bontoa Kecamatan Minahasa Tene, Kabupaten Pangkep
3.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 4453A-Sri Meranti	660.1/Bapedal/UKL-UPL/13/2005	8 Juni 2005	Kepala Bapedal Kota Pekanbaru	Jl. Palasari/Siak II. Gg. Kasih RT02/RW14, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
4.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 4082A-Tanjungpinang	660.3/BPLD/006/I/2005	18 Januari 2005	Kepala Bapedal Kota Tanjungpinang	Jl. Pantai Indah RT02/RW04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat
5.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 2675A-Kuripan Kediri	n.a.*	13 Juni 2004	Bupati Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Kepala Bapedal Kabupaten Lombok Barat	Jl. TGH. Abdul Hafiz Dusun Kuripan Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat
6.	Pengesahan Dokumen UKL dan UPL Site C681-Langga	01/VI/UKL-UPL/2007	19 Juni 2007	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Bapedalda, Kabupaten Pinrang	Kelurahan/Desa Langnga, Kecamatan MT. Sompe, Kabupaten Pinrang
7.	Pengesahan Dokumen UKL dan UPL Site 3617-Langoan	660/BPDL/87/XI/04	5 November 2004	Kepala Bapedalda, Kabupaten Minahasa	Desa Walantakan, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa
8.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site 3646-Amurang	176/Distamben-LH/XI-2004	5 November 2004	Kepala Dinas Pertambangan Energi Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa	Kelurahan Buyungon, Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan
9.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 3655-Munte	660/BPDL/87/XI/04	5 November 2004	Kepada Bapedalda Kabupaten Minahasa	Desa Senduk, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa
10.	Rekomendasi Dokumen	660.1/81/DLHK	10 Mei 2003	Kepala Dinas	Jalan Kipas Perumahan



No	Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Yang Mengeluarkan	Alamat BTS
	UKL dan UPL Site 3735-Tonasa Bungoro			Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene	Karyawan Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene, Propinsi Sulawesi Selatan
11.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site C744-Bungi	02-VI/UKL-UPL/2007	19 Juni 2007	Bapedalda Kabupaten Pinrang	Kelurahan Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
12.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 2418-Purwokerto Selatan	660.1/1516/VIII/2007	30 Agustus 2007	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Jalan KH. Wahid Hasyim RT/RW 03/X, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah
13.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 3637-Singkil	008/BPLH/VIII/2005	29 Agustus 2005	Kepala BPLH Kota Manado	Lingkungan III, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado; Lingkungan I, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado
14.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site C605-Motoling	143/DISTAMBEN-LH/IX/05	22 September 2005	Kepala Dinas Pertambangan Energi Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa	Jalan Desa Motoling Dua, Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara
15.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site C780-Pattallassang	009/IKL/II/2008	1 Februari 2008	Kepala Bapedal Kabupaten Gowa	Jalan Poros Malino Pattallassang, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa
16.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site MM662-Pontolo	660/KLH/16/XI/2007	5 November 2007	Kantor Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara	Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo
17.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 3640-Tatelu	660.1/DKLH/X-124/04	14 Oktober 2004	Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	Jl. Raya Manado Likupang, Desa tatelu Rondor, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara
18.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 3641-Kauditan	660.1/DKLH/X-125/04	14 Oktober 2004	Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	Jl. Setapak Masu di Kauditan Dua, Desa Kauditan Dua, Kecamatan kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara
19.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site 3646-Amurang	176/Distamben-LH/XI-2004	5 November 2004	Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Kelurahan Buyungan, Kecamatan Tombasi, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara
20.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 3641-Munte	660/BPDL/87/XI/04	5 November 2004	Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa	Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mangondow
21.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site 3735-Tonasa Bungoro	660.1/81/DLHK	10 Mei 2003	Kepala Dinas Kasubdin Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan
22.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site 3755-Andalas	668/41/Kep/B/X/04	14 Oktober 2004	Kepala Bapedalda Kota Makassar	Andalas, Jl. Bandang No.42, Makassar
23.	Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Site 3795-Segeri	660.1/58/DL	15 Maret 2005	Kapala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Jl. As.Dg.Kelebbu Kampung Tonjong, Kel. Segeri Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep
24.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 4082-Tanjung Keriting	660.3/BPDL/006/I/2005	18 Januari 2005	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang	Jl. Pantai Indah, RT02/RW IV, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
25.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site 2624823-Selengan	660/46.a/BPM-PLH/2008	24 Mei 2008	Bupati Lombok Barat, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kabupaten Lombok	Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Lombok Barat
26.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site A655-Sekarpuro	660/1904/420.123/2005	4 Oktober 2005	Walikota Malang, Sekretaris Daerah Malang	Jl. Simp.Sulfat Utara No. 64, Kel.Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Malang



No	Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Yang Mengeluarkan	Alamat BTS
27.	Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL Site BC21-Paduraksa	n.a.**	April 2007	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Kepala Bidang Lingkungan Hidup	RT 02/RW 01, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

* Nomor sudah tidak teridentifikasi dengan jelas

** Tidak ada nomor

13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Berikut ini adalah ringkasan daftar tanah yang terdaftar atas nama Perseroan berikut status kepemilikannya:

No.	PROPINSI	JUMLAH	Luas (m2)	STATUS
1.	Bali	5	6.330	Hak Guna Bangunan
2.	Banten	29	10.221	Hak Guna Bangunan
3.	Jambi	18	44.100	Hak Guna Bangunan
4.	Jawa Barat	57	22.926	Hak Guna Bangunan
5.	Jawa Tengah	27	11.390	Hak Guna Bangunan
6.	Jawa Timur	31	14.482,60	Hak Guna Bangunan
7.	Kalimantan Barat	31	16.197,50	Hak Guna Bangunan
8.	Kalimantan Selatan	11	7.092	Hak Guna Bangunan
		1	1.564	Hak Pakai
9.	Kalimantan Tengah	12	25.827,80	Hak Guna Bangunan
10.	Kalimantan Timur	32	16.059	Hak Guna Bangunan
11.	Lampung	20	19.518,60	Hak Guna Bangunan
12.	Nusa Tenggara Barat	22	9.624,50	Hak Guna Bangunan
13.	Aceh	26	10.678	Hak Guna Bangunan
14.	Kepulauan Riau	27	19.669,10	Hak Guna Bangunan
15.	Sulawesi Selatan	56	31.119,50	Hak Guna Bangunan
16.	Sulawesi Tengah	10	4.093	Hak Guna Bangunan
17.	Sulawesi Tenggara	7	7.473	Hak Guna Bangunan
18.	Sulawesi Utara	29	19.293,80	Hak Guna Bangunan
19.	Sulawesi Barat	1	942	Hak Guna Bangunan
20.	Sumatera Barat	5	2.580	Hak Guna Bangunan
21.	Sumatera Selatan	18	31.119,50	Hak Guna Bangunan
22.	Sumatera Utara	43	27.958,60	Hak Guna Bangunan
23.	Jogjakarta	9	5.323,80	Hak Guna Bangunan
24.	Kepulauan Bangka Belitung	2	1.241	Hak Guna Bangunan
25.	Bengkulu	1	1.248	Hak Guna Bangunan
26.	JABODETABEK	46	113.381,88	Hak Guna Bangunan
		1	9,03	Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
TOTAL		575	479.090,18	Hak Guna Bangunan
		1	1.564	Hak Pakai
		1	9,03	Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

14. ASURANSI

Perseroan terus mengelola asuransi terhadap risiko kerusakan-kerusakan properti dan gangguan usaha. Per 30 Juni 2009, infrastruktur telekomunikasi Perseroan, termasuk gangguan usaha, memiliki nilai pertanggungan asuransi sebesar USD 2,5 miliar (atau setara dengan Rp25.562,5 miliar). Polis asuransi ini memiliki beberapa pengecualian, antara lain kerugian yang disebabkan kegiatan teroris maupun peperangan. Perseroan memiliki polis asuransi dengan tanggung jawab menyeluruh (*all risks*) yang mencakup asuransi kewajiban publik dan kewajiban produk dengan total nilai pertanggungan sebesar USD 5 juta (atau setara dengan Rp51,13 miliar) atau serta asuransi kewajiban pemberi kerja dengan total nilai pertanggungan sebesar USD 250.000 (atau setara dengan Rp2,56 miliar) dan asuransi kewajiban kendaraan dengan total nilai pertanggungan sebesar USD 250.000 (atau setara dengan Rp2,56 miliar) untuk setiap kejadian maupun untuk beberapa insiden. Polis asuransi dengan tanggung jawab menyeluruh (*all risks*) ini tidak hanya terbatas di Indonesia tetapi diperluas ke seluruh dunia. Perseroan memiliki asuransi kendaraan dan sepeda motor yang mencakup kerusakan kendaraan dan klaim pihak ketiga. Perseroan memiliki asuransi kecelakaan perorangan bagi karyawan yang mempunyai pertanggungan terhadap kecelakaan, cacat fisik seumur hidup, pengeluaran biaya perawatan medis serta kematian. Setiap dari polis asuransi terkena pengurangan dan pengecualian yang dapat mencegah dari kewajiban membayar seluruh



tanggungan, atau tidak sama sekali, terhadap kerugian yang dapat terjadi. Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian asuransi sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Daftar Asuransi Perseroan Per 30 Juni 2009		
No.	Jenis & Nomor Polis	Nama & Alamat Penanggung
1.	- Risiko Khusus Industri dan Gangguan Usaha No. Polis: 02.01.08.000571 - Standar Gempa No. Polis: 02.01.08.000572	Penjamin asuransi: MAA General Insurance
2.	Sabotase, Terorisme dan Gangguan Usaha No. Polis: 15117/00372-003	Penjamin asuransi: PT Asuransi Bintang Tbk
3.	Tanggung Jawab Menyeluruh No. Polis: 0301002856	Penjamin asuransi: PT Asuransi AIU Indonesia
4.	Kendaraan Bermotor No. Polis: JKT00-G-0709-01V0018417	Penjamin asuransi: PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
5.	Kecelakaan Perorangan No. Polis: APG 00094786	Penjamin asuransi: PT Asuransi AXA Indonesia
6.	Tanggung Jawab Pembayaran Kembali Direktur & Pekerja No. Polis: 230.30.10103	Penjamin asuransi: PT Asuransi AIU Indonesia

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi kepada Perseroan.

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan saat ini, Perseroan menghadapi beberapa perkara hukum. Namun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa perkara-perkara hukum tersebut tidak secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Daftar perkara-perkara yang saat ini sedang dihadapi Perseroan adalah:

No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Pengadilan Pajak (Mahkamah Agung)	Perpajakan Sengketa PPN BM	Perseroan (Pengugat) Dirjen Bea Cukai (DJP) (Tergugat)	Put. 0367/PP/A/M.IV/ 19/2002, tanggal 15 Juli 2002.	1.070.334.878	Perseroan telah mengajukan keberatan terhadap Dirjen Bea dan Cukai karena telah mengklasifikasikan produk yang diimpor dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No.: 087317 tanggal 5 September 2001 untuk dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) sebesar 20%. Sementara Perseroan berargumen bahwa produk yang diimpor seharusnya tidak terkena PPNBM. Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa pajak ini dengan Putusan No: 0367/PP/A/M.IV/ 19/2002 tertanggal 15 Juli 2002 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dari Perseroan tidak dapat diterima. Atas Putusan Pengadilan Pajak ini, Perseroan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Atas permohonan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Sela No. 15/C/PK/PJK/2003 tertanggal 25 Februari 2003 yang keputusannya adalah memerintahkan Pengadilan



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa dan kemudian mengembalikan hasil pemeriksaan materi sengketa beserta perkaranya ke Mahkamah Agung. Bahwa atas Putusan Sela tertanggal 25 Februari 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No. 15/C/PK/PJK/2003 tertanggal 1 Februari 2006 yang isi putusannya: 1. mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon PK (Perseroan); 2. membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 0367/PP/A.M.IV/19/2002 tertanggal 15 Juli 2002; 3. mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT Excelcomindo Pratama untuk seluruhnya; 4. menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,-. Proses saat ini adalah menunggu surat rekomendasi dari Kantor Dirjen Bea dan Cukai yang di tujukan kepada Kantor Pajak untuk pengembalian dana yang menjadi obyek sengketa.
2.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa PPN Tahun 2001	Perseroan (Penggugat) Dirjen Pajak (DJP) (Tergugat)	No. 07166/PP/M.VII/16/2005	59.688.751	Perseroan melalui surat No. 055/FIN/TAX/II/04 tanggal 21 Januari 2004 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2001 No. 00020/207/01/091/03 tanggal 27 Oktober 2003. Melalui keputusan No. KEP-401/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 21 Oktober 2004, Dirjen Pajak menolak seluruh keberatan tersebut. Selanjutnya Perseroan mengajukan banding atas Putusan No. KEP-401/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 21 Oktober 2004 ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 83/FIN-Ctrl/XII/04 tanggal 30 Desember 2004 dengan Register Perkara No. 16-020543-2001. Atas sengketa pajak ini, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 07166R/PP/ M.VII/16/2005 tertanggal 21 Desember 2005 yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan. Atas Putusan Pengadilan Pajak di atas, DJP sudah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali masing-masing Nomor S-333/PJ.54/2006 tertanggal 7 Juni 2006. Hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas.
3.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa PPN Tahun 2001	Perseroan (Penggugat) Dirjen Pajak	No. 07200/PP/M.VII/16/2005	62.044.745	Perseroan melalui surat No. 060/FIN/TAX/II/04 tanggal 21 Januari 2004 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
			(DJP) (Tergugat)			Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2001 No. 00023/207/01/091/03 tanggal 27 Oktober 2003. Melalui keputusan No. KEP-393/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 21 Oktober 2004, Dirjen Pajak menolak seluruh keberatan tersebut. Selanjutnya Perseroan mengajukan banding atas Putusan No. KEP-393/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 21 Oktober 2004 ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 02/FIN/FACR/I/05 tanggal 176 Januari 2005 dengan Register Perkara No. 16-020730-2001. Atas sengketa pajak ini, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 07200R/PP/M.VII/16/2005 tertanggal 23 Desember 2005 yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan. Atas Putusan Pengadilan Pajak di atas, DJP sudah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-332/PJ.54/2006 tertanggal 7 Juni 2006. Hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas 2 (dua) permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas.
4.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa Pajak Roaming Internasional tahun 2001	Perseroan (Pengugat) Dirjen Pajak (DJP) (Tergugat)	No. 05969/PP/M.VII/13/ 2005	11.800.556.191	Perseroan melalui surat No. 025/FIN/TAX/VII/03 tanggal 12 Agustus 2003 mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 No. 00021/204/01/091/03 tanggal 26 Mei 2003. Melalui keputusan No. KEP-196/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 21 April 2004, Dirjen Pajak menerima sebagian keberatan tersebut. Namun, Perseroan masih merasa keberatan atas putusan No. KEP-196/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 36/FIN/TAX/VII/04 tanggal 20 Juli 2004 dengan Register Perkara No. 13-019172-2001. Atas banding yang diajukan oleh Perseroan, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 05969/PP/ M.VII/13/2005 tertanggal 22 Juli 2005 yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan. Pada tanggal 16 November 2005, DJP mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-407/PJ.4/2005. Sampai saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya atas upaya Peninjauan Kembali



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						tersebut.
5.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa PPH Pasal 26 Tahun 2004 (Bunga Luar Negeri & Roaming Internasional)	Perseroan (Penggugat) Dirjen Pajak (DJP) (Tergugat)	No: 13-031583- 2004	69.484.022.576	Pada tanggal 23 Oktober 2007, Perseroan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-366/WPJ.19 /BD.05/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00014/204/04/091/06 tanggal 26 Juni 2006. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu putusan dari Pengadilan Pajak.
6.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa PPH Pasal 26 Tahun 2005 (Bunga Luar Negeri & Roaming Internasional)	Perseroan (Penggugat) Dirjen Pajak (DJP) (Tergugat)	No: 13-034657- 2005	87.992.787.162	Pada tanggal 22 Mei 2008, Perseroan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-074/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00013/204/05/091/07 tanggal 18 Juni 2007. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu putusan dari Pengadilan Pajak.
7.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa PPN Tahun 2002	Perseroan (Penggugat) Dirjen Pajak (DJP) (Tergugat)	No. 09329/PP/M.VII/13/ 2006	398.326.938	Perseroan melalui Surat No. 42/FIN/FACR/VIII/05 tanggal 30 Agustus 2005, mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00007/207/02/091/05 tanggal 30 Agustus 2005. Melalui Keputusan No. KEP-030/WPJ.19/BD.05/2006 tanggal 2 Februari 2006 DJP menolak seluruh keberatan tersebut. Namun Perseroan masih merasa keberatan atas Putusan KEP-030/WPJ.19/BD.05/2006 di atas sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 94/FIN/TAX/IV/06 tanggal 27 April 2006 dengan Register Perkara No. 16-024115-2002. Atas banding yang diajukan oleh Perseroan, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 09329/PP/M.VII/13/2006 tertanggal 8 November 2006 yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan. Pada tanggal 5 Maret 2007, DJP mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-505/PJ.074/2007 tanggal 5 Maret 2007. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya atas upaya Peninjauan Kembali tersebut.



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
8.	Pengadilan Pajak	Perpajakan Sengketa PPH Pasal 26 Tahun 2002 (Roaming Internasional)	Perseroan (Penggugat) Dirjen Pajak ("DJP") (Tergugat)	No. 09608/PP/M.VII/13/ 2006	1.524.011.166	Perseroan melalui Surat No. 43/FIN/FACR/VIII/05 tanggal 29 Agustus 2005, mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 No. 00005/204/02/091/05 tanggal 31 Mei 2005. Melalui Keputusan No. KEP-029/WPJ.19/ BD.05/2006 tanggal 2 Februari 2006 DJP menolak seluruh keberatan tersebut. Namun Perseroan masih merasa keberatan atas Putusan KEP-029/WPJ.19/BD.05/2006 di atas sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding No. 93/FIN/TAX/IV/06 tanggal 27 April 2006 dengan Register Perkara No. 13-024114-2002. Atas banding yang diajukan oleh Perseroan, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. 09608/PP/M.VII/13/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan. Pada tanggal 17 April 2007, DJP mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. S-1171/PJ.07/2007 tanggal 17 April 2007. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya atas upaya Peninjauan Kembali tersebut.
9.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata (Kasus Tanah)	Munawaroh (Penggugat); Ulung Husein Purba (Tergugat I); Perseroan (Tergugat II); Notaris Susana Tanu (Tergugat III), Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur (Turut Tergugat)	No. 96/Pdt.G/2005/ PN.JKT.TIM	1.023.000.000	Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Perseroan telah menyewa lahan dan mendirikan alat komunikasi di atas lahan tersebut secara tidak sah karena menyewa kepada pihak yang bukan pemilik sebenarnya dari lahan tersebut. Penggugat berargumen bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki dan berhak atas lahan sengketa tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Putusan No. 96/Pdt.G/2005/ PN.JKT.TIM yang pada pokoknya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat yaitu antara lain: - menyatakan Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum; - memerintahkan Perseroan untuk membongkar sarana peralatan telekomunikasi yang didirikan di atas lahan sengketa; - menghukum Perseroan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.023.000.000. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Perseroan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas upaya banding yang diajukan Perseroan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						mengeluarkan Putusan No. 42/Pdt/2007/PT.DKI tertanggal 6 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan: a. membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 96/Pdt.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 5 Desember 2005; b. menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Desember 2007. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya atas upaya hukum kasasi tersebut.
10.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta	Perburuhan	Yudi Iriandoyo (Penggugat) Perseroan (Tergugat)	No. 72/G/2002/PT.TUN. JKT.	108.830.000	Perseroan telah mengajukan izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ("P4D") dengan alasan Penggugat tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dan kinerja Penggugat sudah tidak baik. Namun Penggugat menolak alasan dari Perseroan tersebut dan mengajukan keberatannya di P4D. Atas sengketa perburuhan ini, P4D telah mengeluarkan Putusan No. 205/P.711-2000/14/IX/PHK/V-2001, tanggal 9 Mei 2001. Atas Putusan P4D, Perseroan mengajukan upaya hukum ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ("P4P"). Atas upaya hukum yang diajukan Perseroan, P4P telah mengeluarkan Putusan No. 1503/1168/235-8/IX/PHK/10/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang pada pokoknya menguatkan Putusan P4D. Atas Putusan P4P, Perseroan kemudian mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (PT TUN). PT TUN DKI Jakarta kemudian telah mengeluarkan Putusan No. 72/G/2002/PT.TUN.JKT tertanggal 13 November 2002 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut: 1. menyatakan batal/tidak sah Putusan P4P No. 1503/1168/235-8/IX/PHK/10/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 ; 2. memerintahkan P4P untuk mengeluarkan surat putusan baru yang isinya memberi izin kepada Perseroan untuk melakukan PHK terhadap Penggugat serta mewajibkan Perseroan untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp28.980.000,-. Atas putusan PT TUN DKI Jakarta tersebut, P4P mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 7 Juli 2007, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 509 K/TUN/2003 yang pada pokoknya memutuskan sebagai



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						berikut: 1. memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat; 2. mewajibkan kepada Perseroan untuk membayarkan secara tunai/tanpa cicilan kepada Penggugat sebesar Rp81.880.000,-.
11.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Perdata	Nuhsyafi'in (Penggugat) Aulia Rasyid Rajo Bandaro (Tergugat A.I); Hj. Titin Sumarni (Tergugat A.II); Bustami (Tergugat A.III); Anas Anton (Tergugat A.IV); Fajris (Tergugat A.V); Irwan (Tergugat A.VI); Elpi Marantika (Tergugat A.VII); Perseroan (Tergugat B); Pemerintah Republik Indonesia cq. Kecamatan Bonjol di Bonjol Kab. Pasaman (Tergugat C) Wali Nagari Ganggo Hilia (Tergugat D)	06/PDT.G/2007/PN. Lubuk Sikaping	210.000.000	Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa lahan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah milik Penggugat. Sementara di atas lahan tersebut, Perseroan melalui perjanjian sewa menyewa telah mendirikan menara telekomunikasi. Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah mengeluarkan Putusan No. 06/PDT.G/2007/PN.LBS tertanggal 22 November 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di atas, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Pada tanggal 13 April 2009, Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan putusan Banding No. 67/PDT/2008/PT.PDG yang isinya menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya. Atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Penggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 29 Juni 2009. Pada tanggal 28 Juli 2009, Perseroan telah mengajukan kontra Memori Kasasi. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya atas upaya hukum kasasi tersebut.
12.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Perdata	Perseroan (Pelawan) Johanes Irwanto Putro, Ny. Griet Patras Tarandung, Ny. Norma CF. Tambayong, Frits Nikolas Laoh, Raden Noto Soewito, Hengkie Soediono, Notaris Daliso Rudianto, SH (Para Terlawan)	No.05/Pdt.Plw/2007/PN.YK	110.000.000.000	Perseroan menerima surat Pemberitahuan Pengadilan Negeri Yogyakarta atas Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.38/Pdt.G/1994/Pn.Jkt.Ut tanggal 26 Desember 2006 dan tanggal 11 Januari 2007 sehubungan dengan eksekusi atas tanah dan bangunan milik Perseroan yang terletak di Jl. Pangeran Mangkubumi No. 20 & 22, Yogyakarta. Atas adanya upaya eksekusi tersebut di atas, Perseroan mengajukan gugatan perlawanan Pihak Ketiga (<i>derden verzet</i>) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Atas upaya perlawanan yang diajukan oleh Perseroan, Pengadilan Yogyakarta telah mengeluarkan Putusan No.05/Pdt.Plw/2007/PN.YK tertanggal 22 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						a. menyatakan Perseroan adalah pemilik yang sah atas SHGB No. B117/Gowongan yang terletak di Jl. Pangeran Mangkubumi No. 20 & 22, Yogyakarta; b. menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas, Johannes Irwanto Putro sebagai salah satu Terlawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Putusan No. 59/PDT/2007/PTY tertanggal 16 Januari 2008 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.05/Pdt.Plw/2007/PN.YK. Atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, Johannes Irwanto Putro mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya atas upaya hukum kasasi tersebut.
13.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	PT Medcom Indosa Engineering (Penggugat) PT Sumber Sarma Sempurna (Tergugat 1) Soetoro Soerodipoero (Tergugat II) Sukirman (Tergugat III) Perseroan (Turut Tergugat)	No. 423/Pdt.G/2007/PN.Jkt Sel	262.295.687	Atas perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 423/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Slt tertanggal 25 Oktober 2007 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp262.295.687,-. Perseroan selaku Turut Tergugat dihukum untuk turut mematuhi Putusan ini. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Hingga saat ini, Pengadilan Tinggi Jakarta belum mengeluarkan putusannya atas upaya hukum banding tersebut.
14	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Dugaan Kartel Tarif SMS	Perseroan dan operator telekomunikasi lainnya yaitu PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Indosat, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Hutchison Telecommunication, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, dan PT Smart Telecom	No. 03/PDT.KPPU/2008/PN.JKT.Sel	25.000.000.000	KPPU telah melakukan penyelidikan atas adanya dugaan kartel SMS di antara para operator telekomunikasi. KPPU kemudian telah mengeluarkan Putusan No. No. 26/KPPU-L/2007 tertanggal 18 Juni 2008 yang antara lain menyatakan: a. Perseroan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-undang No.5 Tahun 1999; b. Menghukum Perseroan membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,-. Atas putusan KPPU tersebut di atas, Perseroan telah mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Operator telekomunikasi yang lain juga telah mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukumnya masing-masing yang melibatkan Perseroan sebagai



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						(i) pihak Turut Termohon Keberatan dalam perkara No. 04/Pdt.KPPU/2008/PN.JAK.SEL; dan (ii) pihak Turut Termohon I dalam perkara No. 05/Pdt.KPPU/2008/PN.JAK.SEL. Karena adanya beberapa upaya keberatan terhadap putusan KPPU yang sama, maka KPPU mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Agung untuk dapat ditunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan mengkonsolidasikan pemeriksaan perkara keberatan ini. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum menjawab surat permohonan dari KPPU tersebut sehingga pemeriksaan atas upaya hukum keberatan ini belum dapat dimulai.
15.	Pengadilan Sumedang	Gugatan Hak Atas Tanah	PT Subur Setiadi Corp (Penggugat) Ahli Waris Bpk. Soekarja Oemar (Tergugat I) Engku Suherman (Tergugat II) Ahli Waris Bpk. Arma (Tergugat III) Udi (Tergugat IV) Ibu Euis (Tergugat V) PT Telkomsel (Tergugat VI) PT Esia (Tergugat VII) Perseroan (Tergugat VIII) Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Sumedang (Turut Tergugat I) Camat Kecamatan Tanjungsari (Turut Tergugat II)	11/PDT/G/2008/PN .SMD	Nilai Sewa Menyewa yang dilakukan oleh Perseroan untuk jangka waktu 20 tahun adalah sebesar Rp80.000.000	Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa lahan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah milik Penggugat. Sementara di atas lahan tersebut, Perseroan melalui perjanjian sewa menyewa telah mendirikan menara telekomunikasi. Dalam tuntutananya, Penggugat antara lain meminta kepada Pengadilan Negeri Sumedang untuk memerintahkan Perseroan untuk menyerahkan lahan sengketa tersebut dalam keadaan kosong. Pada tanggal 18 Maret 2009, Pengadilan Negeri Sumedang telah mengeluarkan putusannya yang intinya memutuskan: – menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Cimarias, yang diterbitkan tanggal 19 Maret 1997, surat ukur tanggal 7 Maret Nomor 98/1997, luas 5190m2 atas nama Penggugat; – menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum; – menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa sesuatu beban apapun; – menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.173.800,-. Bahwa atas putusan tersebut, Perseroan telah mengajukan banding pada tanggal 6 April 2009. Hingga saat ini, Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum mengeluarkan putusannya atas upaya hukum banding tersebut.
16.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	Perseroan (Penggugat) PT. Boer Properti Indonesia (Tergugat 1) Sweeta Melanie Boer (Tergugat 2) Robinson Bakara, Netty Sianturi,	No. 262/Pdt.G/2009 /PN.Jkt Sel.	171.844.276	Pada tanggal 5 Februari 2009, Perseroan telah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap PT Boer Properti Indonesia dan Sweeta Melanie Boer ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam argumennya, Perseroan menyatakan bahwa Perseroan telah mempercayakan pengerjaan proyek pendirian menara telekomunikasi dan



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
			Sriwijaya, PT Ingin Jaya utama, Anthony Simon, Indra Fauzi, Harapan Pangabeian, Cyrus Yansen Silalahi dan Samuel Sianipar (Para Turut Tergugat)			peralatan pendukungnya untuk wilayah Sumatera Utara kepada PT Boer Properti Indonesia. Namun ternyata PT Boer Properti Indonesia malah menyuruh Para Turut Tergugat untuk mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Boer Properti Indonesia. Namun PT Boer Properti Indonesia ternyata tidak melakukan pembayaran kepada Para Turut Tergugat sehingga menyebabkan Para Turut Tergugat mengajukan tagihan kepada Perseroan dan melakukan tindakan-tindakan pemadaman atas menara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian pada Perseroan. Hingga saat ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih melakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan belum mengeluarkan putusan.
17.	Kasus Perobohan BTS Perseroan di Kabupaten Badung, Bali	Pidana	Perseroan (Pelapor)	No. Laporan LP/354/VIII/2009/ Ditreskrim	-	Base Transceiver Station (BTS) milik Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Badung (site Lukluk dan Sangheh) dirobokkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Atas perobohan BTS tersebut, Perseroan telah mengajukan laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada tanggal 11 Agustus 2009 atas dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 <i>juncto</i> Pasal 38 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (mengenai gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi) dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (mengenai penghancuran atau perusakan barang). Pada tanggal 20 Agustus 2009, seorang staf Perseroan di Bali telah memberikan keterangan kepada Penyidik di Polda Bali dalam kapasitasnya selaku Saksi Pelapor. Saat ini laporan masih dalam proses penyidikan oleh Polda Bali. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal 17 September 2009, Pemda Badung telah merobokkan 4 BTS yang berlokasi di Ambiansemal, Sangheh, Lukluk dan Uluwatu.
18.	Pengadilan Negeri Medan	Kasus Konsumen	Perseroan (Penggugat) Jhon Parlyn H. Sinaga (Tergugat)	Perkara No. 206/Pdt. G/2006/PN. Mdn, tanggal 21 Juni 2006	4.000.000	Pada tanggal 30 Maret 2006 Perseroan mendistribusikan brosur tentang Program Tarif Ngirit XL Bebas untuk pelanggan, yang menginformasikan program tersebut mulai berlaku tanggal 1 April 2006 – 30 Juni 2006. Pada tanggal 31 Maret 2006, Perseroan mengetahui kesalahan cetak dalam brosur tersebut, dimana seharusnya program yang dimaksud berlaku mulai tanggal 6 April 2006, tetapi di brosur dinyatakan dimulai tanggal 1 April 2006. Perseroan kemudian menarik seluruh brosur yang salah cetak tersebut pada tanggal 2 April 2006. Tergugat yang tertarik dengan program tersebut pada tanggal 1 April telah membeli produk Perseroan.



No	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai (dalam Rupiah)	Keterangan
						Namun, Program Tarif Ngirit XL Bebas tersebut tidak dapat dijalankan oleh Tergugat. Pada tanggal 16 April 2006, Tergugat membuat pengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan, yang dalam putusannya No. 7/PEN/BPSK/2006/Mdn, tanggal 1 Juni 2006 memutuskan antara lain sebagai berikut: - menyatakan Perseroan bersalah karena mengedarkan brosur yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya; - menghukum Perseroan untuk tidak lagi memberlakukan program yang dimaksud kepada Tergugat; - menghukum Perseroan untuk membayar ganti rugi yang dialami Tergugat sebesar Rp4.000.000,-; - menghukum Perseroan untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.- setiap harinya apabila lalai/tidak mau melaksanakan keputusan BPSK. Atas keputusan BPSK tersebut, Perseroan mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 206/Pdt.G/2006/PN.MDN, tanggal 21 Juni 2006. Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tanggal 2 Agustus 2006, antara lain memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan keberatan Perseroan. Pada tanggal 29 Agustus 2006, Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Pada tanggal 8 Oktober 2007, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan atas upaya Kasasi No. 01 K/Per.Kons.2007 yang intinya memutuskan: - menolak keberatan Pemohon (Perseroan); - menyatakan sah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No. 7/PEN/BPSK/ 2006/MDN tanggal 1 Juni 2006 tentang Arbitrase; - menghukum Termohon Kasasi/Pemohon (Perseroan) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah). Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2008. Pada tanggal 4 November 2008 Tergugat mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Hingga saat ini, Mahkamah Agung masih melakukan pemeriksaan atas Permohonan Peninjauan Kembali ini.



Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, atau perkara tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, perkara perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia serta tidak ada permohonan pailit ataupun pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan pendapat hukum dari Simmons & Simmons Nomor Amsterdam/016/037463-00009/D10B/RAVD tanggal 12 Oktober 2009 atas Excel Phoneloan 818 B.V, Loyens & Loeff N.V. tanggal 13 Oktober 2009 atas Excelcomindo Finance B.V., dan Zaid Ibrahim & Co. Nomor 296029/WMC tanggal 13 Oktober 2009 atas GSM One (L) Limited serta Nomor 296029/WMC atas GSM Two (L) Limited menyatakan bahwa semua Anak Perusahaan Perseroan tidak terlibat perkara.



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam bab ini Perseroan menggunakan berbagai data yang berhubungan dengan industri telekomunikasi di Indonesia, ekonomi Indonesia, dan data statistik lainnya, termasuk informasi yang berhubungan dengan posisi Perseroan dan para kompetitornya di industri telekomunikasi Indonesia. Berbagai informasi tersebut diperoleh berdasarkan publikasi-publikasi industri telekomunikasi yang independen, berbagai sumber yang dipublikasikan dan tersedia untuk umum dan pendapat manajemen Perseroan.

1. KEGIATAN USAHA

a. Pendahuluan

PT Excelcomindo Pratama Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Grahame Metropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 229 tertanggal 29 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan surat No. AHU. 83359.AH.01.02 Tahun 2008, tertanggal 10 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan no.AHU-0106524.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan dengan agenda no. 1223/RUB.09.03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009. Sampai saat ini, proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta No. 229 tanggal 29 Juli 2008 masih berlangsung, sesuai dengan keterangan Kantor Notaris Sutjipto, SH, dalam suratnya tanggal 15 Mei 2009.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, dan Perseroan saat ini adalah penyedia layanan seluler dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia bagi pelanggan ritel (Consumer Solutions) dan solusi bagi pelanggan korporat (*Business Solutions*). Perseroan merupakan satu-satunya operator yang memiliki jaringan serat optik yang luas.

b. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat membedakan Perseroan dengan operator telekomunikasi seluler lain dan menjadikan Perseroan dapat terus berkembang dengan teknologi-teknologi baru dan mampu bersaing secara kompetitif.

Brand Awareness yang kuat

Perseroan berkeyakinan bahwa merek XL memiliki *brand awareness* yang kuat di mata pengguna seluler Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa program tarif promosi, khususnya melalui layanan prabayar telah memperkuat citra Perseroan di mata pelanggan sebagai operator layanan suara yang terjangkau oleh masyarakat dan menawarkan kualitas yang sebanding dengan operator lain.

Jaringan distribusi yang luas dan sistem penagihan yang terintegrasi

Produk dan layanan Perseroan disalurkan melalui jaringan tradisional *dealer* dan *modern channel* yang luas, terdiri dari 120 *dealer* tradisional dan 22 *modern channel* yang mencakup lebih dari 220.000 *outlet* ritel di seluruh Indonesia pada 30 Juni 2009. Perseroan juga memiliki 109 XL Center dan 234 XL Center Outlet. Sistem penagihan yang terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan informasi secara mendetail tentang basis pelanggan dan jumlah penggunaan secara segmen geografis, yang membantu Perseroan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan konsumen dan meningkatkan kinerja operasi.



Tim manajemen yang kuat dan berpengalaman didukung dengan struktur kompensasi yang berbasis kinerja

Tim manajemen Perseroan yang dipilih oleh pemegang saham mayoritas, (operator telekomunikasi internasional Axiata Group Berhad dan Etisalat) telah memiliki pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi di dalam dan di luar Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian operasional dan pengalaman untuk mengembangkan bisnis dalam pasar telekomunikasi Indonesia dan meningkatkan sinergi potensial dengan Axiata Group Berhad dan Etisalat. Perseroan berfokus untuk mencapai target pertumbuhan tanpa penambahan yang signifikan pada jumlah karyawan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki karyawan yang berbakat dan bekerja secara efisien melalui kebijakan kenaikan jabatan dan kompensasi yang berbasis kinerja. Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan terus menciptakan efisiensi dalam struktur manajemen dan ditempatkan dengan baik untuk menangani pertumbuhan di masa yang akan datang dengan struktur karyawan yang ada.

c. Strategi Perseroan

Sejak bulan Juni tahun 2007, Perseroan telah berupaya untuk membuat layanan panggilan prabayar lebih terjangkau melalui program-program promosi tarif dengan tujuan untuk menstimulasi pertumbuhan MoU. Program promosi tarif telah berfokus pada layanan prabayar dan karenanya, layanan prabayar telah tumbuh dengan sangat pesat. Jumlah pelanggan prabayar telah meningkat dari sekitar 3,7 juta per 31 Desember 2004 menjadi sekitar 6,8 juta per 31 Desember 2005 kemudian sekitar 9,1 juta per 31 Desember 2006 menjadi sekitar 15 juta per 31 Desember 2007, dan sekitar 25,6 juta per 31 Desember 2008 yang merepresentasikan CAGR sebesar 67,7%. Sedangkan jumlah pelanggan prabayar per 30 Juni 2009 adalah sekitar 24,3 juta.

Perseroan selalu berupaya memperhatikan pola trafik pelanggan pada jaringan Perseroan dan meninjau serta memperbaharui tarif sesuai dengan strategi penetapan harga yang ekonomis untuk meningkatkan MoU dan memaksimalkan pendapatan dari penggunaan layanan panggilan pelanggan.

- Menyesuaikan segmentasi periode sibuk dan tidak-sibuk untuk menyelaraskan tarif promosi dengan volume trafik jaringan.
- Mendorong peningkatan volume trafik jaringan saat periode tidak-sibuk melalui promosi potongan tarif yang ditujukan untuk meningkatkan MoU saat periode tersebut.

Penurunan pada ARPM yang dihasilkan karena strategi penetapan harga yang ekonomis akan ditutup dengan kenaikan MSM yang terjadi. ARPM Perseroan telah menurun dari sekitar Rp1.560 di tahun 2004 menjadi Rp1.160 di tahun 2005 dan menjadi sekitar Rp870 di tahun 2006 menjadi Rp540 di tahun 2007, Rp120 di tahun 2008, dan Rp80 di bulan Juni 2009.

Sementara itu, MSM Perseroan telah meningkat dari 23 menit di tahun 2004, 26 menit di tahun 2005, 29 menit di tahun 2006, 50 menit di tahun 2007, dan 212 menit untuk tahun 2008 yang merepresentasikan CAGR sebesar 170,4% untuk periode ini. Di bulan Juni 2009 MSM Perseroan adalah 268 menit. Peningkatan MSM ini lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan jumlah pelanggan prabayar.

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi penetapan harga yang ekonomis telah menghasilkan peningkatan MoU dari 970 juta menit di tahun 2004, 1.479 juta menit di tahun 2005, 2.886 juta menit di tahun 2006, dan 6.815 juta menit di tahun 2007, dan 54.886 juta menit di tahun 2008, merepresentasikan CAGR sebesar 174,3% untuk periode ini, tanpa pengaruh yang signifikan pada ARPU atau rata-rata *churn* bulanan. Sedangkan MoU untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 adalah 41.041 juta menit. ARPU untuk pelanggan prabayar adalah sekitar Rp52 ribu di tahun 2004, Rp50 ribu di tahun 2005, Rp42 ribu di tahun 2006, Rp43 ribu di tahun 2007, Rp35 ribu untuk tahun 2008 dan Rp30 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009. Rata-rata *churn* bulanan untuk pelanggan prabayar adalah sekitar 10,0% di tahun 2004, 5,6% di tahun 2005, 12,2% di tahun 2006, 13,5% di tahun 2007, 16,8% di tahun 2008, dan 22,2% di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009.

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
MoU (juta)						
Total	41.015	54.886	6.815	2.886	1.479	970
MSM						
Total	268	212	50	29	26	23
ARPM (Rp)						
Total	80	120	540	870	1.160	1.560



Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
ARPU (ribu Rupiah)						
Prabayar	30	35	43	42	50	52
Pascabayar	156	152	155	172	251	439
Total	32	37	47	46	54	56
Jumlah Pelanggan (ribu)						
Prabayar	24.323	25.599	14.988	9.141	6.803	3.743
Pascabayar	371,7	416,7	481,0	386,6	176,2	48,1
Total	24.694	26.016	15.469	9.528	6.979	3.791
Rata-rata <i>churn</i> bulanan						
Prabayar	22,2%	16,8%	13,5%	12,2%	5,6%	10,0%
Pascabayar	3,6%	4,6%	4,8%	2,9%	0,3%	1,8%

Di tahun 2009 strategi Perseroan akan lebih berfokus pada penyampaian pengalaman pelanggan yang lebih lengkap, karena Perusahaan percaya bahwa bila pelanggan telah terbiasa menggunakan volume percakapan yang cukup tinggi dengan harga yang terjangkau, maka kompetisi akan bergeser tidak hanya di tarif. Oleh karena itu setelah berhasil menjalankan strategi penyederhanaan produk dan harga yang terjangkau, Perseroan melanjutkan dengan strategi baru yaitu menjadi operator yang menyenangkan dan memuaskan pelanggan (*fun and excitement*).

d. Bisnis Perseroan

Perseroan menyediakan layanan suara, data, dan layanan *value-added* lainnya, termasuk layanan 3G, melalui jaringan telekomunikasi GSM. Perseroan juga menyediakan layanan *leased line*, layanan internet dan VoIP pada perusahaan-perusahaan, dan layanan *value-added* lainnya melalui infrastruktur jaringan yang dimiliki Perseroan.

Pendapatan kotor Perseroan terutama berasal dari jasa telekomunikasi seluler. Perseroan menawarkan layanan telekomunikasi prabayar dan pasca bayar. Layanan prabayar menargetkan segmen masyarakat yang sensitif terhadap harga dengan menyediakan layanan dasar SMS dan suara, layanan *value-added* dan layanan *roaming* internasional terbatas. Layanan pasca bayar menyediakan layanan dasar SMS dan suara, layanan *value-added*, dan layanan *roaming* internasional penuh. Pada 30 Juni 2009, jumlah pelanggan prabayar sekitar 24,3 juta dan jumlah pelanggan pasca bayar sekitar 372 ribu.

Jasa telekomunikasi Perseroan terdiri dari jasa telekomunikasi seluler, jasa interkoneksi seluler, dan jasa telekomunikasi lainnya. Tabel dibawah menunjukkan rincian pendapatan dari setiap kategori layanan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004:

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Jasa telekomunikasi seluler	4.947,7	9.767,7	6.500,7	4.987,5	3.263,5	2.483,6
Jasa interkoneksi seluler	750,0	1.537,4	1.383,6	1.201,8	922,5	768,8
Jasa telekomunikasi lainnya	556,6	850,9	480,4	276,8	115,5	70,7
Jumlah Pendapatan Kotor	6.254,3	12.156,0	8.364,7	6.466,1	4.301,5	3.323,1

(1). Jasa Telekomunikasi Seluler

Sebagian besar porsi pendapatan Perseroan diperoleh dari Jasa telekomunikasi seluler. Layanan telekomunikasi Perseroan sebagian besar diperoleh dari penjualan paket perdana dan *voucher* isi ulang pelanggan prabayar, dan dari pembayaran tagihan pelanggan pasca bayar. Pelanggan prabayar membeli *voucher* isi ulang yang berisi jumlah nominal tertentu dan tidak membayar biaya pemakaian minimum bulanan. Pelanggan pasca bayar membayar biaya pemakaian dan sejumlah pemakaian minimum bulanan.

Tabel berikut menunjukkan komposisi dari pendapatan Jasa telekomunikasi seluler untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004:



Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	6 bulan (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)
Percakapan	3.207,5	6.622,6	3.866,3	2.747,2	1.922,4	1.536,6
Non-percakapan	1.737,1	3.140,7	2.632,5	2.239,4	1.340,4	926,6
Abonemen	3,1	4,4	1,9	0,9	0,7	20,4
Jumlah Pendapatan dari jasa telekomunikasi seluler	4.947,7	9.767,7	6.500,7	4.987,5	3.263,5	2.483,6

(a). Layanan Percakapan

Layanan percakapan komunikasi seluler memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk dapat melakukan panggilan "*on-net*" terhadap sesama pelanggan Perseroan lainnya dalam jaringan XL serta "*off-net*" terhadap operator lain.

Penetapan tarif percakapan prabayar dan pasca bayar diatur oleh Pemerintah melalui Menkominfo, yang merupakan regulator industri telekomunikasi Indonesia dan bertanggung jawab untuk menentukan tarif yang dapat dibebankan oleh operator seluler di Indonesia berdasarkan rentang harga yang ditetapkan sesuai dengan tarif interkoneksi yang berlaku.

BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) memperbolehkan operator seluler untuk menawarkan program promosi dimana tarif percakapan ditetapkan di bawah rentang harga yang ditetapkan di atas.

i. Layanan Panggilan Prabayar

Perseroan bermaksud untuk menjadikan layanan prabayar Perseroan lebih terjangkau bagi masyarakat melalui serangkaian tarif promosi dari tahun 2007 sampai sekarang.

Pada tanggal 30 Juni 2009, jumlah pelanggan prabayar sekitar 24,3 juta atau sekitar 98% dari jumlah total basis pelanggan Perseroan. Layanan prabayar ditargetkan pada pelanggan yang membutuhkan layanan *value-added* sebagai tambahan dari layanan dasar SMS dan data.

Seseorang dapat menjadi pelanggan prabayar Perseroan dengan membeli paket kartu perdana (termasuk kartu SIM). Paket perdana ditawarkan dengan harga paling murah Rp2.000, berisi *voucher* isi ulang dengan jumlah yang sama. Perseroan tidak mengenakan biaya aktivasi untuk mengaktifkan kartu SIM. Paket perdana memiliki saldo awal sehingga pelanggan bisa langsung melakukan atau menerima panggilan.

Pelanggan prabayar dapat mengisi ulang saldo dengan membeli *voucher* isi ulang fisik atau secara elektronik. *Voucher* isi ulang fisik adalah kartu kertas, dimana terdapat bagian yang harus digosok oleh pelanggan untuk menemukan nomor kode *voucher* tersebut. Pelanggan melakukan panggilan ke nomor tertentu untuk melakukan isi ulang dan memasukkan nomor kode tertentu, dan kemudian saldo akan terisi ulang. Isi ulang elektronik dilakukan secara otomatis melalui jaringan seluler Perseroan ketika pelanggan melakukan isi ulang secara elektronik.

Pelanggan prabayar bisa membeli *voucher* isi ulang di XL Center, XL Center Outlet dan di ritel-ritel lainnya. Pelanggan juga bisa membeli isi ulang elektronik di seluruh XL Center dan XL Center Outlet, di ATM berbagai bank besar di seluruh Indonesia, melalui phone banking dan dari beberapa distributor baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sekitar 90% isi ulang dilakukan secara elektronik dan Perseroan mengharapkan proporsi tersebut untuk terus meningkat di masa yang akan datang.

Pelanggan prabayar dapat membeli isi ulang elektronik dengan nominal Rp5.000, Rp10.000, Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000 atau pelanggan dapat membeli *voucher* isi ulang fisik dengan nominal Rp5.000, Rp10.000, Rp25.000, Rp35.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Masa aktif isi ulang berkisar antara 15 sampai 120 hari.

Pelanggan prabayar XL bisa menikmati kemudahan dalam melakukan migrasi baik dari prabayar ke pasca bayar maupun sebaliknya, tanpa mengubah nomor telepon, membayar biaya tambahan, atau membeli kartu SIM baru.



ii. Layanan Panggilan Pasca bayar

Pada 30 Juni 2009, Perseroan memiliki sekitar 372 ribu pelanggan pasca bayar, atau sekitar 2% dari jumlah total basis pelanggan. Layanan pasca bayar menyediakan layanan seluler lengkap seperti 3G video conferencing, MMS dan GPRS dan browsing internet, serta kenyamanan dan fleksibilitas layanan purna jual dan penagihan.

Pelanggan XL pasca bayar juga dapat menikmati jelajah internasional di lebih dari 140 negara melalui kerja sama dengan 355 operator seluler.

Pelanggan pasca bayar juga bisa menikmati kemudahan pindah layanan dari pasca bayar ke prabayar tanpa membayar biaya tambahan atau membeli kartu SIM baru. Pelanggan pasca bayar juga menikmati keuntungan lain seperti bebas biaya abonemen dan tagihan percakapan per detik.

(b). Layanan Non Percakapan – SMS

Perseroan menawarkan pelanggan prabayar dan pasca bayar sejumlah layanan data dan layanan *value-added* lainnya, termasuk SMS. SMS memungkinkan pelanggan untuk mengirim pesan teks singkat hingga 160 karakter melalui ponsel seluler yang mendukung fungsi SMS. Pelanggan Perseroan dapat mengirim SMS ke seluruh operator layanan seluler lokal dan ke beberapa operator layanan seluler asing yang telah membuat perjanjian dengan Perseroan.

Pada bulan November 2008 Perseroan mulai meluncurkan layanan VAS berbasis SMS yaitu SMSPlus. Layanan ini merupakan pengembangan dari layanan SMS dan terdiri dari beberapa layanan antara lain: *Auto Reply*, *Auto Forward*, *Auto Copy*, dll. Layanan ini dapat digunakan pelanggan pada beberapa kondisi seperti pada saat *meeting*, *travelling*, atau pada saat berada diluar area jangkauan jaringan XL sekalipun. Biasa pada kondisi seperti ini pelanggan tidak dapat menerima SMS atau melakukan *reply* SMS, namun dengan layanan SMSPlus masih memungkinkan pelanggan untuk *me-reply*, *forward*, atau *copy* SMS ke nomor lain.

Penggunaan SMS telah meningkat dari sekitar 66 SMS per pelanggan per bulan pada tahun 2004 menjadi sekitar 75 SMS per pelanggan per bulan pada tahun 2005, menjadi sekitar 86 SMS per pelanggan per bulan pada tahun 2006 menjadi sekitar 92 SMS per pelanggan per bulan pada tahun 2007 menjadi sekitar 69 SMS per pelanggan per bulan pada tahun 2008 dan sekitar 154 SMS per pelanggan per bulan pada bulan Juni 2009.

(c). Layanan Non Percakapan – Fitur Tambahan Lainnya

Perseroan menawarkan beberapa fitur dan layanan tambahan kepada seluruh pelanggan prabayar dan pasca bayar Perseroan tanpa dikenakan tambahan biaya termasuk *caller identification*, *call holding*, *call waiting*, dan *call forwarding*.

Perseroan juga menawarkan pelanggan prabayar dan pasca bayar sejumlah layanan tambahan selain SMS, meliputi layanan data dan fax seluler, *Voicemail*, *Mobile Banking*, dan layanan yang ditawarkan kepada bank-bank utama yang memungkinkan semua pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, *Sim Tools Kit* (STK) yang memungkinkan seluruh pelanggan untuk menerima data seperti nada dering, gambar, dan layanan interaktif lainnya, *Location Based Service*, yang membantu para pelanggan dalam mencari keberadaan anggota keluarga atau teman yang juga berlangganan layanan ini, *Multimedia Messaging Service* (MMS), GPRS, dan *Ring Back Tone*.

(2). Jasa Interkoneksi Seluler

Perseroan menyediakan jasa interkoneksi seluler yang meliputi interkoneksi lokal dan internasional serta interkoneksi *roaming* internasional di bawah perjanjian *roaming* dan interkoneksi internasional dengan operator telekomunikasi lain, yang memungkinkan interkoneksi antara jaringan seluler Perseroan dan PSTN, *gateway* internasional yang dioperasikan Indosat dan PT Bakrie Telekomunikasi Indonesia, Tbk., maupun jaringan lokal dan internasional yang dioperasikan operator *fixed-line* dan seluler lain. Perjanjian *roaming* dan interkoneksi internasional memungkinkan pelanggan Perseroan untuk melakukan dan menerima panggilan dari pelanggan operator lain.

i. Interkoneksi Lokal dan Internasional

Saat ini, Perseroan memiliki perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi dan operator IDD lain di Indonesia, dimana Perseroan mendapat pendapatan interkoneksi lokal dan internasional ketika pelanggan mereka menggunakan jaringan Perseroan.

Perjanjian interkoneksi tersebut mengikuti pedoman penetapan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menkominfo.



Perseroan menerima pendapatan interkoneksi lokal apabila terjadi panggilan dari PSTN ke pelanggan Perseroan, ataupun panggilan dari pelanggan operator lain ke pelanggan Perseroan dan menerima pendapatan interkoneksi IDD apabila terjadi panggilan dari luar negeri ke pelanggan Perseroan. Untuk panggilan dari luar negeri ke pelanggan Perseroan, Perseroan akan membayarkan tarif IDD kepada operator IDD.

Demikian pula, Perseroan akan membayarkan beban interkoneksi lokal dan IDD, apabila pelanggan Perseroan melakukan panggilan ke pelanggan operator lain ataupun pelanggan luar negeri.

Pada saat ini pendapatan interkoneksi yang Perseroan terima dari panggilan yang masuk ke pelanggan Perseroan lebih tinggi daripada pembayaran interkoneksi yang Perseroan lakukan kepada operator telekomunikasi lain karena panggilan masuk dari operator lain ke pelanggan Perseroan lebih banyak daripada panggilan keluar.

ii. **Roaming Internasional**

Perjanjian *roaming* internasional dengan operator di negara lain memungkinkan wisatawan asing yang berada di Indonesia untuk menggunakan telepon selulernya dengan menggunakan jaringan XL. Perseroan memiliki perjanjian *roaming* dengan operator seluler lain sehubungan dengan biaya *roaming in-bound* internasional atas panggilan dan SMS yang dilakukan dan diterima oleh pelanggan operator lain ketika berada di jaringan Perseroan. Biaya *roaming in-bound* internasional serta pembayaran yang diterima oleh Perseroan dari operator di luar Indonesia menggunakan mata uang asing sesuai dengan perjanjian *roaming* internasional dengan masing-masing operator di negara lain. Saat ini pelanggan prabayar XL dapat melakukan panggilan dan mengirim SMS serta menerima panggilan masuk ketika berada di Singapura, Arab Saudi, UAE, Taiwan, Hong Kong, Belgia, Inggris, India, Spanyol, China, Ukraina, Malaysia, Thailand, Perancis, Jepang dan New Zealand.

(3). **Jasa Telekomunikasi Lainnya**

Perseroan juga menyediakan layanan *leased line*, VoIP, dan internet kepada pelanggan dengan menggunakan *backbone* transmisi *end to end* yang terdiri dari jaringan serat optik yang mencakup seluruh kota besar di Jawa, jaringan serat optik bawah laut; BRCS yang merupakan jaringan internasional utama Perseroan menghubungkan Batam dan Johor (Malaysia) dan jaringan kabel bawah laut antara Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan.

Pendapatan dari layanan telekomunikasi lain telah meningkat dari Rp70,7 miliar di tahun 2004, Rp115,5 miliar di tahun 2005 menjadi Rp276,8 miliar di tahun 2006, Rp480,4 miliar di tahun 2007, Rp850,9 miliar di tahun 2008 dan Rp556,6 miliar di periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009. Pendapatan dari layanan telekomunikasi lain tersebut merupakan 2,1%, 2,7%, 4,3%, 5,7%, 7,0% dan 8,9% dari pendapatan kotor Perseroan tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 secara berurutan.

Layanan telekomunikasi lain terdiri dari layanan yang dijual kepada pelanggan korporasi, baik secara langsung atau melalui perantara, yang terdiri dari layanan komunikasi tetap seperti *leased line* domestik dan internasional, VoIP, akses *broadband*, layanan *collocation*, layanan komunikasi seluler seperti *push mail* dan komunikasi data seluler lainnya, dan layanan komunikasi konvergen seperti lokasi kendaraan dan penggunaan ATM melalui telepon genggam.

Pada tahun 2008, Perseroan mulai menyewakan ruang pada menara telekomunikasi kepada operator telekomunikasi seluler lainnya dan operator layanan internet dan perusahaan telekomunikasi lainnya termasuk Hutchison, NTS, Bakrie Telecom, Mobile 8, Sampoerna Telecom dan Telkom Indonesia.

2. **FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR**

a. **Infrastruktur Jaringan dan Transmisi**

Infrastruktur Perseroan beroperasi pada spektrum radio frekuensi yang dialokasikan kepada Perseroan dibawah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan terdiri dari kapasitas transmisi jaringan, kapasitas BTS, dan sistem penagihan.

Perseroan berhasil mengembangkan dan memperkuat jaringan serat optik di beberapa kota besar di Indonesia. Secara nasional, Perseroan telah membangun jaringan infrastruktur transmisi yang terdiri dari



jaringan serat optik di semua kota besar di Jawa, dan jaringan transmisi gelombang mikro di luar Jawa yang didukung oleh jaringan VSAT. Sampai 30 Juni 2009, Perseroan telah memasang sekitar 12.700 kilometer kabel darat dan dasar laut.

Jaringan serat optik darat Perseroan yang sudah dipasang sepanjang lebih kurang 9.750 kilometer, termasuk jaringan transmisi pendukung yang membentang sepanjang jalur kereta api utara dari Jawa Barat ke Surabaya di Jawa Timur, juga lima jaringan pendukung (*ring*) serat optik yang terhubung dengan jaringan transmisi utama (*backbone*).

Konfigurasi ini bertujuan untuk meningkatkan redundansi jaringan dan mengakses trafik telekomunikasi dari kota-kota di tengah dan selatan Jawa. Selain itu, terdapat dua jaringan pendukung di Lingkaran Luar Jakarta untuk melayani area Jakarta. Di wilayah Sumatera, Perseroan telah membangun dan mengoperasikan kabel darat yang menghubungkan Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung.

Untuk kabel bawah laut, sampai 30 Juni 2009 Perseroan telah memasang dan mengoperasikan kurang lebih 3.000 kilometer kabel berkapasitas besar. Di Indonesia sendiri, Perseroan telah memasang jaringan bawah laut antara Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, jaringan yang menghubungkan Kalianda (Lampung) ke Anyer, dan Jawa ke Kalimantan telah beroperasi. Dengan selesainya pembangunan ini, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan telah terhubung dalam konfigurasi jaringan pendukung dan koneksi langsung.

Didukung dengan jaringan transmisi serat optik dan jaringan transmisi gelombang berkapasitas tinggi, Perseroan dapat menyediakan layanan berkualitas untuk pelanggan Perseroan dengan ketergantungan minimal terhadap jaringan yang dioperasikan operator lain. Sistem komunikasi berbasis VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) digunakan untuk mendukung perluasan di daerah berpenduduk rendah. Teknologi ini juga memungkinkan penetrasi jaringan seluler ke daerah-daerah di seluruh Indonesia yang belum memiliki jaringan utama.

Agar dapat menyediakan solusi komunikasi yang cepat, berkapasitas besar dengan tarif terjangkau secara nasional dan internasional, Perseroan telah memasang kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Batam dengan Johor (Malaysia). Sistem ini didukung dengan jaringan transmisi gelombang mikro yang menghubungkan Batam dan Singapura, serta Batam dan Penggarang (Malaysia).

Perseroan juga terus memperluas jaringan internasional melalui kerja sama dengan mitra Perseroan di negara lain. Sampai dengan 30 Juni 2009, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan 355 operator seluler di 140 negara, sehingga pengguna XL pasca bayar dapat menikmati fasilitas jelajah internasional. Kerja sama ini terdiri dari kerjasama GPRS internasional dengan 136 operator, kerja sama MMS internasional dengan 53 operator, dan kerja sama 3G internasional dengan 58 operator.

Mulai tahun 2008, pelanggan prabayar Perseroan dapat menerima dan melakukan panggilan di Singapura, Arab Saudi, UAE, Taiwan, Hong Kong, Belgia, Inggris, India, Spanyol, China, Ukraina, Malaysia, Thailand, Perancis, Jepang dan New Zealand. Mereka juga mendapatkan layanan GPRS melalui kerja sama dengan Mobile 1 (Singapura), Chunghwa (Taiwan), Smartone (Hong Kong), Celcom (Malaysia), DTAC (Thailand), IDEA (India), Smartone (Macau), Telstra (Australia), Softbank (Jepang), Cingular (Amerika), KPN (Belanda), Vodafone D2 GmbH (Jerman), Dialog (Sri Lanka), Vodafone (Inggris), TMIC (Kamboja), Orange (Perancis), Vodafone (Selandia Baru), Vodafone (Spanyol), Swisscom (Swiss), Vodafone (Turki), Vodafone (Portugis), Vodafone (Irlandia), Vodafone (Italia), Vodafone (Republik Ceko), DST (Brunei) dan Aktel (Bangladesh).

Untuk perluasan jaringan transmisi, Perseroan telah berhasil mengaplikasikan teknologi canggih dengan membangun jaringan multiplex berkapasitas besar ROADM (Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexing), DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*), MPLS and NGN (*New Generation Network*), di samping TDM (*Time Division Multiplexing*) technology seperti PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*), SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) dan CWDM (*Coarse Wavelength Division Multiplexing*) yang konvensional.

b. Spektrum

Perseroan mengoperasikan jaringan telekomunikasi GSM di bawah ijin jaringan seluler yang dikeluarkan Pemerintah (Menkominfo) yang mengalokasikan frekuensi 2 x 7.5 MHz pada 907.5-915 MHz dan 952.5-960 MHz untuk Jasa telekomunikasi seluler GSM frekuensi 900, frekuensi 2 x 7.5 MHz pada 1710-1717.5 MHz dan 1805-1812.5 MHz untuk Jasa telekomunikasi seluler GSM frekuensi 1800, dan frekuensi 2 x 5 MHz pada 1945-1950 MHz dan 2135-2140 MHz untuk layanan telekomunikasi 3G.

Pesaing utama Perseroan, Telkomsel dan Indosat, mendapat alokasi frekuensi 2 x 15 MHz untuk layanan GSM 900 dan 2 x 15 MHz untuk layanan GSM 1800. Karena Perseroan mendapatkan spektrum yang lebih



kecil, Perseroan perlu mengoperasikan BTS yang lebih banyak di daerah yang memiliki tingkat kepadatan trafik seluler yang tinggi untuk menjaga kualitas jaringan.

c. Kapasitas BTS

Untuk mendukung peningkatan pendapatan melalui menit pemakaian dan menangani peningkatan pelanggan yang disebabkan oleh strategi penetapan tarif baik untuk SMS, voice maupun data, Perseroan telah membangun 1.399 BTS selama enam bulan pertama di tahun 2009, sehingga total BTS Perseroan di akhir Juni 2009 adalah 18.128.

Perseroan menempatkan sebagian besar BTS Perseroan dengan model regular grid, sehingga Perseroan dapat mengatur kepadatan trafik dari satu BTS ke BTS lain. Dengan cara ini, penggunaan BTS dan spektrum lebih efisien di seluruh jaringan, tanpa mengabaikan kualitas jaringan. Perseroan juga terus mencari kemungkinan untuk mengulang penggunaan frekuensi untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan mengimplementasikan fitur-fitur jaringan radio dalam menjaga kualitas suara. Perseroan tercatat sebagai operator pertama yang mengimplementasikan BTS berkapasitas besar dengan efisiensi di spektrum frekuensi yang menggabungkan penggunaan frekuensi 900 MHz dan 1800MHz di dalam satu sel yang sama (Multi Band Cell) dengan konfigurasi 12-12-12. Teknologi ini telah diterapkan sejak bulan Maret 2009 di Serang Banten, dan kini juga sudah diterapkan di Tegal, Pemalang, dan pulau Madura dan Lombok. Semenjak awal tahun 2009, Perseroan juga sudah menerapkan konsep ramah lingkungan dengan memakai teknologi BTS yang hemat listrik (*Green BTS*) serta teknologi ramah lingkungan penunjang lainnya.

Untuk memastikan penyelesaian BTS tepat pada waktunya, Perseroan membangun BTS dengan manajemen in-house, pemilihan lokasi BTS secara terpadu, dan juga menjalin kerja sama dengan beberapa *vendor* melalui pola sewa. Sebagian besar BTS dan infrastruktur jaringan Perseroan dibeli dari Ericsson AB, Huawei Technologies Company Limited dan Alcatel Lucent. Selain itu, Perseroan lebih efisien dalam mendirikan BTS melalui model *owner-managed* dibanding operator lainnya, yang umumnya menggunakan *turnkey model*. Pemanfaatan pola sewa ke operator lain atau perusahaan pengelola menara sudah dilakukan sejak 2007, dan sekarang pola sewa ini merupakan pilihan pertama Perseroan untuk menurunkan biaya investasi dan mengurangi waktu bangun yang cukup lama.

Komponen utama jaringan seluler meliputi :

- *BTS* : peralatan elektronik yang menghubungkan panggilan telepon seluler ke sistem GSM,
- *Base Station Controller* : alat untuk mengatur sumber radio seperti BTS,
- *Mobile Switching Center* : Pusat yang mengendalikan *base station controller* dan mengatur *routing* panggilan telepon, dan
- *Home Location Registers* : register yang berisi profil tiap pelanggan dan secara konstan meng-*update* lokasi pelanggan di dalam jaringan.

Saat ini Perseroan menggunakan teknologi *switch* terkini yaitu NGN (*New Generation Network*), yang merupakan perpaduan antara MGW (*Media Gateway*) dan MSC-S (*MSC-Serve*). Teknologi baru ini telah berbasis IP menggantikan teknologi lama yang berbasis TDM pada jaringannya.

NGN juga dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas dan kehandalan dari telepon dan mengambil kecanggihan internet dan telepon seluler. NGN memungkinkan akses jaringan yang tak terbatas dan memiliki daya saing tinggi dengan *provider* lainnya. Selain itu, NGN juga mendukung mobilitas secara umum yang menghasilkan layanan yang konsisten dan merata kepada pelanggan.

Keunggulan utama dari teknologi ini adalah memiliki fitur yang lebih kuat untuk 2G dan 3G, dengan kapasitas empat kali lebih besar, menghasilkan lebih sedikit residu, serta pemakaian energi yang lebih kecil.

Dengan kecanggihan yang dimiliki, Perseroan dapat memberikan kualitas terbaik bagi pelanggan. Di akhir tahun 2008, *Successful Call Rate* Perseroan adalah 95,4% sedangkan *Call Completion Rate* adalah 98,7%, dan *Blocking Rate* di bawah 0,8%. Selain manfaat yang diperoleh sekarang, NGN membuat Perseroan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Perseroan telah memiliki 18.128 BTS (termasuk Node B untuk transmisi 3G), 214 *base station controller unit*, 72 *mobile switching center*, 404 *high speed downlink packet access* (HSDPA) dan 17 *home location register*. BTS dan *mobile switching center* ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan informasi yang berkaitan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan meliputi:



Pertumbuhan Infrastruktur Jaringan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Pelanggan (dalam jutaan)	24,7	26,0	15,5	9,5	7,0	3,8
BTS	18.128	16.729	11.157	7.260	4.324	2.357
HSDPA hotspot	404	350	300	95	-	-
Base Station Controller	214	214	107	64	42	28
Mobile Switching Center	72	82	43	15	10	12
Home Location Register	17	17	10	7	7	8
Pengeluaran Modal untuk Infrastruktur (Rp miliar)	2.871,3	10.844,9	7.087,7	4.503,1	3.368,4	1.849,4

Perseroan telah mendirikan pusat operasi jaringan di Jakarta yang memonitor jaringan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan menggunakan sistem manajemen jaringan terintegrasi yang memungkinkan Perseroan untuk memantau seluruh infrastruktur jaringan melalui sebuah *platform*. Perseroan membeli sebagian besar BTS dan jaringan infrastruktur dari Ericsson AB, Huawei Technologies Company Limited dan Alcatel. Sebagian besar BTS didirikan di daerah yang dimiliki atau disewa untuk jangka waktu 5-20 tahun. Perseroan telah menggabungkan redundansi jaringan ke dalam infrastruktur jaringan untuk menyediakan sistem *back-up* untuk menjaga kegiatan operasional jaringan Perseroan apabila terjadi kegagalan atau kerusakan sistem jaringan.

d. Bisnis Menara

Untuk mendayagunakan nilai yang tersimpan dalam infrastruktur pasif Perseroan, di 2008 Perseroan mulai melakukan beberapa langkah bisnis terkait dengan menara Perseroan. Inisiatif yang telah diwujudkan pada awal 2008 adalah menyewakan sebagian ruang menara kepada operator lainnya. Sampai dengan 30 Juni 2009 Perseroan telah menyewakan 3.984 ruang menara kepada enam operator.

e. Sistem Penagihan

Sistem penagihan terintegrasi yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2003, memungkinkan Perseroan untuk menyatukan penagihan, jaringan, dan layanan konsumen bagi pelanggan prabayar dan pasca bayar ke dalam satu *platform* yang terintegrasi. Sistem tersebut menyediakan kemampuan untuk menyatukan penagihan percakapan, data, dan fitur, memberikan fleksibilitas dalam penagihan dan menawarkan paket layanan data dan suara yang terintegrasi kepada pelanggan XL.

Untuk mengakomodasi kenaikan penggunaan, Perseroan mengembangkan aplikasi sistem penagihan baru pada kuartal ketiga 2008 dengan memperbaharui sistem penagihan AMDOCS versi 4.0 ke AMDOCS versi 7.0. Peningkatan ini membantu Perseroan menjaga kualitas layanan kepada para pelanggan yang jumlahnya meningkat sebesar 68% di tahun 2008 dan menyebabkan aktivitas *recharging* yang lebih sering.

Dengan pengembangan sistem penagihan ke AMDOCS versi 7.0, Perseroan dapat memperbesar kapasitas pelanggan dua kali lipat dan meningkatkan kapasitas *recharging* dua sampai tiga kali lipat. Selain itu, Perseroan mendapat akses untuk informasi secara *real-time* dan proses unduh data yang lebih efisien untuk skema tarif baru dan promosi.

Didukung sistem manajemen layanan pelanggan, Perseroan juga bisa mendapatkan detail segmentasi pelanggan dan menelusuri pemakaian, sehingga Perseroan dapat menawarkan layanan yang tepat untuk kebutuhan para pelanggan dan menangani *churn* bulanan dengan lebih baik.

3. PEMASARAN, PENJUALAN, DAN DISTRIBUSI

a. Pemasaran

Perseroan membukukan biaya untuk kegiatan promosi dan periklanan sebesar Rp209,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2009, Rp655,2 miliar pada tahun 2008, Rp433 miliar pada tahun 2007, dan Rp332,3 miliar pada tahun 2006, Rp218,6 miliar pada tahun 2005, Rp179,0 miliar pada tahun 2004 untuk kegiatan promosi dan periklanan.

Sesuai dengan strategi untuk memberikan skema tarif yang sederhana, Perseroan menyederhanakan cara memilih produk dan layanan bagi pelanggan. Ketika operator lain cenderung untuk mengeluarkan berbagai nama *brand* untuk menarik pelanggan, Perseroan memutuskan untuk menyederhanakan produk Perseroan dan membuat *brand* tunggal.



Pada tahun 2007, Perseroan masih memiliki tiga produk, yaitu: Bebas dan Jempol untuk prabayar dan Xplor untuk pasca bayar. Pada tahun 2008, Perseroan menyatukan ketiga *brand* tersebut menjadi: XL. Strategi ini ternyata berhasil membentuk *brand awareness* yang lebih kuat di pasar dan membantu Perseroan membuat program pemasaran yang lebih fokus dan efisien dalam hal biaya.

Dengan *brand* tunggal, pelanggan lebih mudah dalam memilih antara layanan prabayar dan layanan pasca bayar sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Para pelanggan juga lebih leluasa untuk beralih ke pasca bayar dan sebaliknya, tanpa mengganti nomor telepon atau membayar biaya tambahan dan membeli kartu SIM baru.

Perseroan memperkenalkan *voucher* isi ulang yang sama untuk XL Bebas dan XL Jempol pada Februari 2008 baik untuk isi ulang fisik atau elektronik. Hal ini membuat proses isi ulang lebih sederhana dan mudah.

b. Penjualan dan Distribusi

Pada tahun 2007, Perseroan melakukan peningkatan dengan memberlakukan sistem distribusi baru. Sebelum tahun 2007, Perseroan memiliki sistem distribusi langsung, mulai tahun 2007 Perseroan menggunakan sistem distribusi *hybrid*, gabungan antara sistem *indirect* (*dealer management*) dan *direct*. Sistem ini mengambil manfaat dari sistem distribusi untuk *fast moving consumer goods* (FMCG) yang dapat menjangkau pelanggan dan mengawasi saluran distribusi serta ketersediaan produk dan layanan dengan lebih baik.

Dengan sistem tidak langsung (*indirect*), Perseroan telah menjalin perjanjian kerja sama dengan *dealer* area (DA) dan *dealer* regional (DR) untuk distribusi produk dan layanan secara non-eksklusif kepada pemakai melalui pengecer atau *retailer* independen. Masing-masing *dealer* pada setiap kategori memiliki target dan kuota pengambilan produk yang harus dicapai dan dipertahankan. Pada akhir Juni 2009, DA dan DR masing-masing berjumlah 67 dan 53.

Dalam hal cakupan, para *dealer* juga memiliki area penjualan berbeda sebagai berikut:

- *Dealer Area*: mempunyai satu fokus area di kabupaten tertentu.
- *Dealer Regional*: merupakan lapisan kedua, yang mempunyai cakupan area yang lebih luas dengan dua atau lebih fokus area yang berbeda.

Dengan merangkul *retailer* independen ke dalam sistem, Perseroan semakin mampu meningkatkan distribusi dan ketersediaan dari paket perdana dan pulsa isi ulangnya. Pada akhir Juni 2009, Perseroan memiliki lebih dari 220.000 *retailer* independen. Secara langsung, Perseroan menyalurkan produk dan layanan melalui XL Center dan XL Center Outlet, ATM dan *phone banking*, serta *retail outlet* di hypermarket. Selain untuk distribusi fisik, Perseroan juga memanfaatkan saluran distribusi untuk fungsi layanan pelanggan. Sebagian besar dari fungsi tersebut dilakukan melalui XL Center yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh Perseroan, serta XL Center Outlet yang dioperasikan pihak ketiga lewat perjanjian waralaba.

Pada XL Center dan XL Center Outlet, pelanggan dapat mendaftar untuk layanan pasca bayar, membeli *voucher* pulsa isi ulang atau pulsa elektronik, paket perdana, serta memperoleh informasi mengenai produk dan layanan XL. Petugas customer service Perseroan membantu pelanggan dalam proses pembayaran tagihan, migrasi dari prabayar ke pasca bayar dan sebaliknya, serta menjawab pertanyaan dan keluhan. XL Center dan XL Center Outlet merupakan sarana untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah XL Center dan XL Center Outlet per tanggal 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004:

	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
XL Center	109	337	106	125	130	89
XL Center Outlet	234	211	132	213	-	-

4. PERSAINGAN

Operator jasa telekomunikasi seluler di Indonesia bersaing dari segi kualitas jaringan, tarif, ketersediaan layanan data, jangkauan jaringan, dan fitur-fitur tambahan seperti *voice mail* dan SMS. Perseroan beranggapan bahwa seiring dengan berkembangnya pasar seluler di Indonesia, para pelanggan akan meminta layanan konsumen yang lebih baik. Jangkauan jaringan Perseroan yang luas memberikan keuntungan untuk bersaing dengan pemain baru yang tidak memiliki jangkauan jaringan yang luas. Perseroan juga berkeyakinan bahwa pendekatan terhadap konsumen dan kemampuan Perseroan dalam menawarkan berbagai paket layanan dan penetapan harga regional dengan menggunakan sistem



penagihan terintegrasi bisa membuat Perseroan berbeda dari pesaing Perseroan baik untuk layanan Prabayar maupun Pasca Bayar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang memungkinkan Perseroan untuk terus bersaing dalam industri telekomunikasi Indonesia.

Pasar telekomunikasi Indonesia semakin kompetitif dengan masuknya sejumlah pemain baru, yang beberapa di antaranya menggunakan teknologi CDMA. Kemampuan beroperasi secara menguntungkan tergantung pada kemampuan bersaing dengan pesaing lama dan baru. Pesaing utama Perseroan adalah Telkomsel, yang menawarkan jasa telekomunikasi seluler dengan merek Telkomsel yang menggunakan teknologi GSM, Telkom yang menawarkan jasa telekomunikasi seluler merek Flexi yang menggunakan teknologi CDMA, dan Indosat yang menawarkan Jasa telekomunikasi seluler dengan merek Indosat yang menggunakan teknologi GSM dan merek StarOne yang menggunakan teknologi CDMA. Selain itu, Hutchison, beroperasi dengan merek Three, dan NTS yang beroperasi dengan merek Axis, juga menawarkan layanan GSM, serta Bakrie Telecom yang beroperasi dengan merek Esia, Mobile-8 yang beroperasi dengan merek Fren, Smart Telecom yang beroperasi dengan merek Smart dan Sampoerna Telecom yang beroperasi dengan merek Ceria, menawarkan layanan *fixed wireless* menggunakan teknologi CDMA.

5. PENAGIHAN DAN MANAJEMEN KREDIT

a. Penagihan

Perseroan mengirim tagihan melalui surat ke pelanggan pasca bayar tiap bulan melalui jasa kurir. Pelanggan dapat membayar tagihan melalui ATM, debit langsung, kartu kredit, transfer melalui bank, ataupun langsung ke XL Center.

b. Layanan Pelanggan

Perseroan mendukung pelanggan dengan informasi dan layanan setiap saat melalui *contact center*. Untuk peningkatan layanan kepada pelanggan, di tahun 2008 Perseroan menggunakan *single point of contact* yaitu nomor telepon 818 dan 817.

Melalui nomor 818, pelanggan dapat mencari informasi yang umum, seperti tarif promosi terkini, produk VAS, dan fitur-fitur terbaru untuk produk Perseroan lewat mesin penjawab.

Nomor 817 adalah nomor layanan pelanggan yang tersambung langsung dengan petugas *customer service* XL untuk pertanyaan yang spesifik.

Selain layanan di atas, XL Contact Center juga dilengkapi dengan fitur Video Contact Center, di mana petugas layanan pelanggan Perseroan dapat mengadakan pembicaraan video dengan pelanggan. Layanan ini tersedia untuk pelanggan 7 hari seminggu dari jam 8 pagi sampai 5 sore.

Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk berfokus pada bisnis utama dan meningkatkan layanan pelanggan, Perseroan menandatangani perjanjian *Contact Management Services* dan menjual aset tetap tertentu yang terkait dengan aktivitas *call centre* di bulan November 2008 kepada VADS, perusahaan *call center* yang memiliki spesialisasi beserta perangkat lunak dan keras untuk layanan ini. Selama menjalin kerja sama dengan XL, VADS diharapkan dapat mempertahankan komitmen XL terhadap layanan pelanggan berkualitas.

Sebagai penghargaan Perseroan terhadap pelanggan terpilih dan memperkuat loyalitas mereka, Perseroan mengadakan berbagai program dan acara di 2008, melalui acara edukatif, hiburan, juga program berhadiah dan program promosi khusus lainnya. Perseroan juga menawarkan layanan personal dan manfaat lainnya untuk mereka.

c. Manajemen Kredit dan Deaktivasi

Keputusan alokasi kredit bergantung pada evaluasi kelayakan kredit pelanggan pasca bayar, apakah Perseroan akan mengalokasikan batas kredit antara Rp100.000 sampai dengan Rp5.000.000 tergantung pada metode pembayaran dan jenis kartu kredit yang digunakan.

Pelanggan pasca bayar memiliki waktu 26 hari untuk membayar tagihan setelah tanggal penagihan. Pelanggan pasca bayar menerima tagihan 13 hari sebelum tagihan tersebut jatuh tempo bagi pelanggan yang berada di daerah Jakarta atau 15 hari sebelum tagihan jatuh tempo bagi pelanggan yang berada di luar daerah Jakarta. Jika pelanggan terlambat membayar tagihan, Perseroan akan mengirimkan pesan untuk mengingatkan, memblokir panggilan keluar, mengirimkan surat peringatan, memblokir panggilan masuk



dan keluar, dan akhirnya setelah 63 hari setelah tanggal penagihan, Perseroan akan menonaktifkan layanan.

6. REVENUE ASSURANCE DAN FRAUD PREVENTION

Tim *revenue assurance* telah dibentuk sejak tahun 2002 yang berfungsi untuk mengawasi area-area di mana terdapat kemungkinan kebocoran pendapatan dan hilangnya peluang dan berusaha untuk menghilangkan atau meminimalkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tim *revenue assurance* memeriksa apakah pelanggan yang menggunakan jaringan Perseroan memang pada kenyataannya tercatat di dalam sistem *switch* dan sistem penagihan Perseroan, apakah panggilan yang dibuat oleh pelanggan yang terdaftar di jaringan Perseroan dicatat oleh *switch* dan apakah panggilan oleh *switch* telah seluruhnya ditransfer secara lengkap dari *switch* ke sistem penagihan, dan diperhitungkan secara akurat sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain itu, sistem terintegrasi yang dimiliki Perseroan juga memeriksa tagihan telah dikirim ke pelanggan dan dibayar tepat pada waktunya dan apakah saldo *voucher* pelanggan prabayar di *update* secara *real time*. Produk dan layanan baru juga harus melalui pengujian yang dilakukan oleh tim *revenue assurance* sebelum diluncurkan secara komersial.

Perseroan telah menerapkan usaha-usaha pencegahan *fraud* untuk mengevaluasi para pelanggan yang bermigrasi dari langganan prabayar ke pascabayar. Data para pelanggan tersebut dicocokkan dengan daftar hitam (*blacklist*) yang dimiliki Perseroan, misalnya dengan memverifikasi data pelanggan termasuk penggunaan kartu kredit, nomor telepon rumah dan kantor, dan informasi pribadi lainnya. Sampai saat ini Perseroan belum pernah mengalami kerugian pendapatan yang material yang disebabkan oleh *fraud*. Perseroan telah mengimplementasikan *fraud management system* untuk membantu Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud* pada layanan prabayar maupun pasca bayar.

7. DISASTER RECOVERY CENTER

Untuk mempertahankan kehandalan dari layanan Perseroan, Perseroan telah membangun pusat operasi jaringan di Jakarta yang terus memonitor jaringan Perseroan, yang memanfaatkan manajemen jaringan terpadu melalui platform tunggal.

Untuk melindungi pusat jaringan dari kegagalan operasi, Perseroan membangun *special network building* di beberapa daerah. Tujuan Perseroan adalah memiliki jaringan telekomunikasi yang aman dengan standar tinggi yang tersebar merata. Dengan ini, Perseroan dapat menyediakan layanan yang handal untuk seluruh pelanggan. Di tahun 2008, Perseroan mendirikan *special network building* di Bandung sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk aplikasi sistem rencana penanganan bencana (DRP/ *Disaster Recovery Plan*) dan memperbesar kapasitas jaringan. Di samping itu, Perseroan juga telah mencapai tahap pembangunan *special network building* baru di Surabaya.

Perusahaan juga telah memasukkan redundansi jaringan ke dalam infrastruktur jaringan untuk menyediakan sistem cadangan dan menjaga operasional jaringan jika terjadi gangguan.

Secara keseluruhan, XL telah memiliki rencana penanganan bencana untuk menangani gangguan bisnis yang bersifat teknis maupun operasional.

8. PROPERTI

Perseroan memiliki tanah seluas 480.663,21 meter persegi digunakan untuk kantor, BTS, dan XL Center. Perseroan menyewa sebagian besar properti yang digunakan termasuk kantor pusat di Jakarta.

9. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mencatat pertumbuhan sebesar 4,3% pada tahun 2009 dan 5,2% pada tahun 2010 (Sumber : laporan analis Mandiri Sekuritas tanggal 11 Nov 2009). Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah daripada tahun 2008 sebesar 6.1%.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 terutama didorong oleh investasi di bidang properti dan transportasi. Dari sisi fiskal, pengeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi secara efektif. Di sisi eksternal, kegiatan ekspor diperkirakan masih akan tumbuh lebih cepat daripada kegiatan impor.



Tingginya kepercayaan konsumen, ketersediaan pendanaan dari bank, perbaikan di pembelanjaan investasi, disertai dengan perbaikan permintaan secara global akan mempercepat pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Namun demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup kuat di Q3 2009, Bank Indonesia mungkin akan menahan diri untuk menaikkan suku bunga, karena suku bunga yang rendah masih tetap diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan permintaan domestik, terutama di tengah ketidakpastian perbaikan ekonomi global.

a. Layanan Seluler

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masa mendatang akan mengakibatkan terciptanya lapangan kerja yang lebih tinggi sehingga tingkat pengangguran pun akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi juga berdampak positif terhadap pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia akan mengakibatkan peningkatan daripada pengeluarannya. Salah satu pengeluaran yang akan ikut meningkat adalah pengeluaran untuk kebutuhan telekomunikasi. Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya tingkat penetrasi seluler di Indonesia.

Meningkatnya penetrasi seluler secara langsung akan berakibat kepada pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi. Perseroan sebagai salah satu pemain seluler di Indonesia juga akan merasakan dampak positif dari pertumbuhan tersebut. Hal ini akan tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan maupun pendapatan yang akan diperoleh Perseroan di masa yang akan datang.

Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan menikmati pertumbuhan yang tinggi dan Perseroan berkeyakinan bahwa industri seluler tetap akan berkembang di masa yang akan datang, sehingga akan memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk semakin meningkatkan pendapatannya.

Pendapatan usaha bruto Perseroan terus meningkat dari Rp 6.466,1 di tahun 2006, menjadi Rp 12.156,0 di tahun 2008, yang mewakili pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 37,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pelanggannya dalam menyediakan layanan telekomunikasi seluler. Perseroan akan terus meningkatkan kualitas jaringan serta mengembangkan produk dan fitur inovatif bagi masing-masing segmen pasar.

Peluang pertumbuhan jasa telepon seluler di Indonesia sangat besar, mengingat hal-hal sebagai berikut : tingkat penetrasi yang masih relatif rendah, pola pemakaian ponsel cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian, pelanggan sangat responsif terhadap daya tarik fitur baru yang dapat meningkatkan penggunaan jasa, dan risiko tunggakan pelanggan dapat dihindari berkat peningkatan penggunaan kartu prabayar.

b. Sinergi dengan Axiata

Axiata adalah pemegang saham mayoritas Perseroan yang dapat memberikan keuntungan sinergis bagi Perseroan antara lain tim manajemen yang handal dan berpengalaman, dukungan yang kuat, dan mengoptimalkan kegiatan pembelian dengan melibatkan jumlah pembelian yang besar dalam grup Axiata secara keseluruhan. Sinergi lainnya juga dapat diperoleh dari saling berbagi ilmu atas pengalaman-pengalaman mereka dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, produk dan layanan yang telah dikembangkan oleh grup Axiata yang mana mungkin sebagian dapat diterapkan oleh Perseroan di pasar Indonesia. Sinergi tersebut di atas akan sangat mendukung usaha Perseroan di masa yang akan datang dan membantu Perseroan untuk mencapai tujuannya sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia.



IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007, 2006, 2005, dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca Konsolidasian	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
ASET						
Aset Lancar	2.909,5	3.719,6	1.679,3	1.183,4	1.370,8	802,8
Aset Tidak Lancar	26.213,6	25.192,1	17.121,2	11.453,2	7.983,1	5.671,7
JUMLAH ASET	29.123,1	28.911,7	18.800,5	12.636,6	9.353,9	6.474,5
KEWAJIBAN						
Kewajiban Lancar	6.041,5	6.196,6	7.019,5	2.300,2	2.240,4	896,1
Kewajiban Tidak Lancar	18.067,3	18.407,2	7.316,2	6.055,2	3.484,2	4.547,7
JUMLAH KEWAJIBAN	24.108,8	24.603,8	14.335,7	8.355,4	5.724,6	5.443,8
JUMLAH EKUITAS	5.014,3	4.307,9	4.464,8	4.281,2	3.629,3	1.030,7
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	29.123,1	28.911,7	18.800,5	12.636,6	9.353,9	6.474,5

Laporan Laba Rugi Konsolidasian	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	6 bulan (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)	1 tahun (Rp miliar)
Pendapatan Usaha Bruto	6.254,3	12.156,0	8.364,7	6.466,1	4.301,5	3.323,2
Diskon	(43,7)	(94,8)	(375,2)	(688,4)	(511,5)	(190,1)
Pendapatan Usaha Bruto setelah dikurangi diskon	6.210,6	12.061,2	7.989,5	5.777,7	3.790,0	3.133,1
Beban Usaha	(5.461,3)	(10.308,2)	(6.229,7)	(4.749,8)	(3.219,9)	(2.470,7)
Laba Usaha	749,3	1.753,0	1.759,8	1.027,9	570,1	662,4
Penghasilan / (Beban) Lain-Lain	224,2	(1.828,2)	(1.241,7)	(25,5)	(883,3)	(709,0)
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	973,5	(75,2)	518,1	1.002,4	(313,2)	(46,6)
Manfaat / (Beban) Pajak Penghasilan	(267,1)	60,1	(267,3)	(350,5)	89,1	1,3
Laba / (Rugi) Bersih	706,4	(15,1)	250,8	651,9	(224,1)	(45,3)

Rasio-Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan Usaha Bruto	N.A.*	45,3%	29,4%	50,3%	29,4%	N.A.
Pendapatan Usaha Bruto setelah Dikurangi Diskon	N.A.*	51,0%	38,3%	52,4%	21,0%	N.A.
Beban Usaha	N.A.*	65,5%	31,2%	47,5%	30,3%	N.A.
Laba Usaha	N.A.*	(0,39%)	71,2%	80,3%	(13,9%)	N.A.
Penghasilan / (Beban) Lain-Lain	N.A.*	47,2%	4.769,4%	(97,1%)	(24,6%)	N.A.
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	N.A.*	114,5%	48,3%	(420,1%)	572,1%	N.A.
Manfaat / (Beban) Pajak Penghasilan	N.A.*	122,5%	23,7%	(493,4%)	6.753,8%	N.A.
Laba / (Rugi) Bersih	N.A.*	106,0%	61,5%	(390,9%)	394,7%	N.A.
EBITDA	N.A.*	46,3%	37,4%	47,2%	6,7%	N.A.



Rasio-Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	6 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
Jumlah Aset	0,7%	53,8%	48,8%	35,1%	44,5%	N.A.
Jumlah Kewajiban	(2,0%)	71,6%	71,6%	46,0%	5,2%	N.A.
Jumlah Ekuitas	16,4%	(3,5%)	4,3%	18,0%	252,1%	N.A.
Rasio Usaha						
EBITDA / Pendapatan Usaha Bruto	N.A.*	42,2%	42,0%	39,5%	40,3%	48,9%
Laba Usaha / Pendapatan Usaha Bruto	N.A.*	14,4%	21,0%	15,9%	13,3%	19,9%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha Bruto	N.A.*	(0,1%)	3,0%	10,1%	(5,2%)	(1,4%)
EBITDA / Jumlah Aset	N.A.*	17,8%	18,7%	20,2%	18,5%	25,1%
Laba Usaha / Jumlah Aset	N.A.*	6,1%	9,4%	8,1%	6,1%	10,2%
Laba Bersih / Jumlah Aset	N.A.*	(0,1%)	1,3%	5,2%	(2,4%)	(0,7%)
EBITDA / Ekuitas	N.A.*	119,1%	78,6%	59,7%	47,8%	157,8%
Laba Usaha / Ekuitas	N.A.*	40,7%	39,4%	24,0%	15,7%	64,3%
Laba Bersih / Ekuitas	N.A.*	(0,4%)	5,6%	15,2%	(6,2%)	(4,4%)
Rasio Keuangan						
Aset Lancar / kewajiban lancar	48,2%	60,0%	23,9%	51,4%	61,2%	89,6%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	600,6%	571,1%	321,1%	195,2%	157,7%	528,2%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset	82,8%	85,1%	76,3%	66,1%	61,2%	84,1%

*Tidak disajikan karena data tidak dapat diperbandingkan



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
EKUITAS						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	709,0	709,0	709,0	709,0	709,0	566,3
Tambahan modal disetor	2.691,7	2.691,7	2.691,7	2.691,7	2.691,7	11,7
Saldo laba	1.613,6	907,2	1.064,1	880,5	228,6	452,7
Jumlah Ekuitas	5.014,3	4.307,9	4.464,8	4.281,2	3.629,3	1.030,7

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam dan LK melalui surat No. 107/CSEC/X/2009 pada tanggal 15 Oktober 2009 dalam rangka PUT I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) Saham Biasa Atas Nama baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ("PUT I") ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terjadi pada tanggal 30 Juni 2009, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah:

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo laba		Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)	(Rp miliar)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2009	709,0	2.691,7	0,2	1.613,4	5.014,3
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2009 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Penawaran Umum Terbatas sebesar 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp2.000,- per saham	141,8	2.694,2	-	-	2.836,0
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2009 setelah Penawaran Umum Saham	850,8	5.385,9	0,2	1.613,4	7.850,3

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2009 yang tertanggal 12 November 2009 hingga Prospektus ini diterbitkan.



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT I ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT I, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen kas.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen kas harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa apabila Perseroan membukukan laba bersih pada tahun berjalan, maka Perseroan dapat membagikan dividen kas kepada pemegang saham berdasarkan usulan Direksi setelah pembagian dividen kas tersebut disetujui dalam RUPS. Pembagian dividen kas tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen kas sewaktu-waktu sepanjang memperoleh persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sebesar 15% sampai dengan 20% atas laba bersih konsolidasian Perseroan setelah pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian atas laba/(rugi) kurs yang belum direalisasi. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Setelah memperoleh persetujuan dari RUPS, manajemen Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kas untuk tahun buku 2008 karena Perseroan membukukan rugi sebesar Rp15,1 miliar.

Riwayat pembayaran dividen kas yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Dividen (Rp)		Persentase Terhadap Laba Bersih*	Tanggal Pembayaran
	Per Saham	Total		
2005	-	-	-	-
2006	9,47	67.168.668.000	20,0%	11 Juni 2007
2007	20,00	141.800.000.000	19,7%	16 Mei 2008
2008	-	-	-	-

* Laba bersih konsolidasian Perseroan setelah Pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian atas laba/(rugi) kurs yang belum direalisasi.

Untuk Tahun Buku 2005 dan 2008 Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp224,092 miliar dan Rp15,109 miliar.



XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku Efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas [Undang-undang No. 7 Tahun 1983](#) Tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis atau Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari saldo laba dan,
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri bentuk usaha tetap dipotong sebesar 15 % dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 1(a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dengan ketentuan bilamana Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 .

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh" pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi



atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c).

Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi persyaratan dalam pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (“AKHH Lawyers”)

Chase Plaza, Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 520 8270
Fax. : (62-21) 520 8277

No. HKHPM: 200127
No. STTD: 386/PM/STTD-KH/2001 tanggal 23 Juli 2001
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 056/AK/II/09 tanggal 9 Februari 2009

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT I ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum/Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT I ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

: Haryanto Sahari & Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6
Jakarta 12940
Telp. : (62-21) 521 2901
Fax. : (62-21) 5290 5555/5290 5050

No. Ikatan Akuntan Indonesia: 100436322 atas nama Nita Skolastika Ruslim
No. STTD: 60/BL/STTD-AP/2009 tanggal 12 Maret 2009
Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penawaran dari Akuntan Publik No. 2009001273 tanggal 26 Agustus 2009.

Tugas Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit yang dilakukan.



NOTARIS : Kantor Notaris Sutjipto, S.H.

Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 520 4778
Fax. : (62-21) 520 4779

No. Ikatan Notaris Indonesia : 211.5.047.051050
No. STTD : 11/STTD-N/PM/1996
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 88/CFBA/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009.

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI : PT Datindo Entrycom
EFEK (BAE)

Puri Datindo, Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 570 9009
Fax. : (62-21) 570 9026

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 110/CFBA/IX/2009 tanggal 4 September 2009.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Pejatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PUT I sesuai peraturan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.



XIV. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan No. 116 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga adalah:

Indocel Holding Sdn. Bhd. ("Indocel")

Indocel sebagai pembeli siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETDnya yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.

Berdasarkan Corporate Certificate tanggal 30 September 2009, dikeluarkan oleh Suryani binti Hussein, sebagai Company Secretary dari Indocel:

Pendirian

Indocel berkedudukan di Malaysia dan adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1995 menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Indocel yang sebelumnya bernama Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd. ini dimiliki 100% oleh TM International (L) Limited ("TMIL") sejak tanggal 11 Januari 2005.

Kegiatan Usaha

Indocel merupakan perusahaan investasi (investment holding company) yang 100% dimiliki oleh TM International (L) Limited. Indocel tidak memiliki kegiatan usaha lain selain melakukan investasi.

Permodalan

Susunan permodalan Indocel adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	RM 100.000
Modal Ditempatkan	:	RM 100.000
Modal Disetor	:	RM 100.000

Modal Dasar terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal RM 1 per saham.

Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Indocel, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal RM 1 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (RM)	
Modal Dasar	100.000	100.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TM International (L) Limited	100.000	100.000	100,0
Modal Dalam Portepel	-	-	-

Indocel Holding Sdn. Bhd mendapatkan pinjaman dari Axiata Group Bhd. (melalui TMI (L) Ltd.) untuk mendanai penyertaannya pada Perseroan.

Susunan Pengurusan

Susunan Direksi yang terakhir adalah sebagai berikut:

1. Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
2. Dato' Yusor Annuar bin Yaacob
3. Mdm Suryani binti Hussein

Indocel sebagai pembeli siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.



XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Excelcomindo Pratama Tbk No. 121 tanggal 14 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham :

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham dengan Harga Pelaksanaan Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) setiap Saham.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau daftar pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yakni tanggal 26 November 2009.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham ("DPS") yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 November 2009. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 30 November 2009 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).



3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening Pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari yang sama
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE dokumen sebagai berikut:
 - Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) Pemegang HMETD yang melakukan Pelaksanaan HMETD;
 - Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus;
 - Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk menandatangani sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
 - b. Asli Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD
 - d. Asli surat kuasa, jika Pelaksanaan HMETD dilakukan oleh Pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas).
 - e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan Pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;



- Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
 4. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh Biro Administrasi Efek dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank khusus, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui system C-BEST);
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh Biro Administrasi Efek;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
3. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2009 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.



5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 10 Desember 2009 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.2 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

<u>Pembayaran</u> Dalam mata uang Rupiah	<u>Pembayaran</u> Dalam mata uang Dolar Amerika Serikat
PT Excelcomindo Pratama Tbk. Standard Chartered Bank Alamat: Jl. Prof. Dr. Satrio – Jakarta No Rekening: 30607213164	PT Excelcomindo Pratama Tbk. Standard Chartered Bank Alamat: Jl. Prof. Dr. Satrio – Jakarta No Rekening: 30607213172

Pembayaran Pemesanan Pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I dapat dilakukan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar 1 USD (satu Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp9.485,- (sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah)

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 9 Desember 2009.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.



Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat Pemesanan Saham yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 11 Desember 2009.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang diperhitungkan sejak tanggal 12 Desember 2009, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo, Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 – 35
Jakarta 10220
Telp. 021 – 570 9009
Fax. 021 – 570 9026

Dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Jati Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Tambahan asli

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 3 – 8 Desember 2009. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 9 Desember 2009. Pengambilan dilakukan di kantor BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:



- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi/Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku
- c. Asli surat kuasa sah (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu Indocel Holding Sdn. Bhd., berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Excelcomindo Pratama Tbk No. 116 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli saham yang masih tersisa tersebut pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham yang akan dibayarkan tunai.



XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini sejumlah 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.836.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah).

Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan harga penawaran sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per saham.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian pada tanggal 26 November 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan yang HMETD-nya tidak dijual; atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD; atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu Bursa Efek Indonesia, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasihat investasi, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No.SE-006/BEJ/1998, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated System* ("JATS") kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.



Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

4. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Pendistribusian Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai HMETD

Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	: Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT I	: Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	: A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	: R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT I	: A + R
Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD	:

$$\frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)} = RpX$$

Maka nilai HMETD adalah = $RpX - Rpr$

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam



bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 November 2009 di:

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo, Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 570 9009
Fax. : (62-21) 570 9026

Apabila sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 November 2009 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.



XVIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi:

PT Excelcomindo Pratama Tbk
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (021) 576 1881; Faksimili : (021) 579 59025
Website: www.xl.co.id